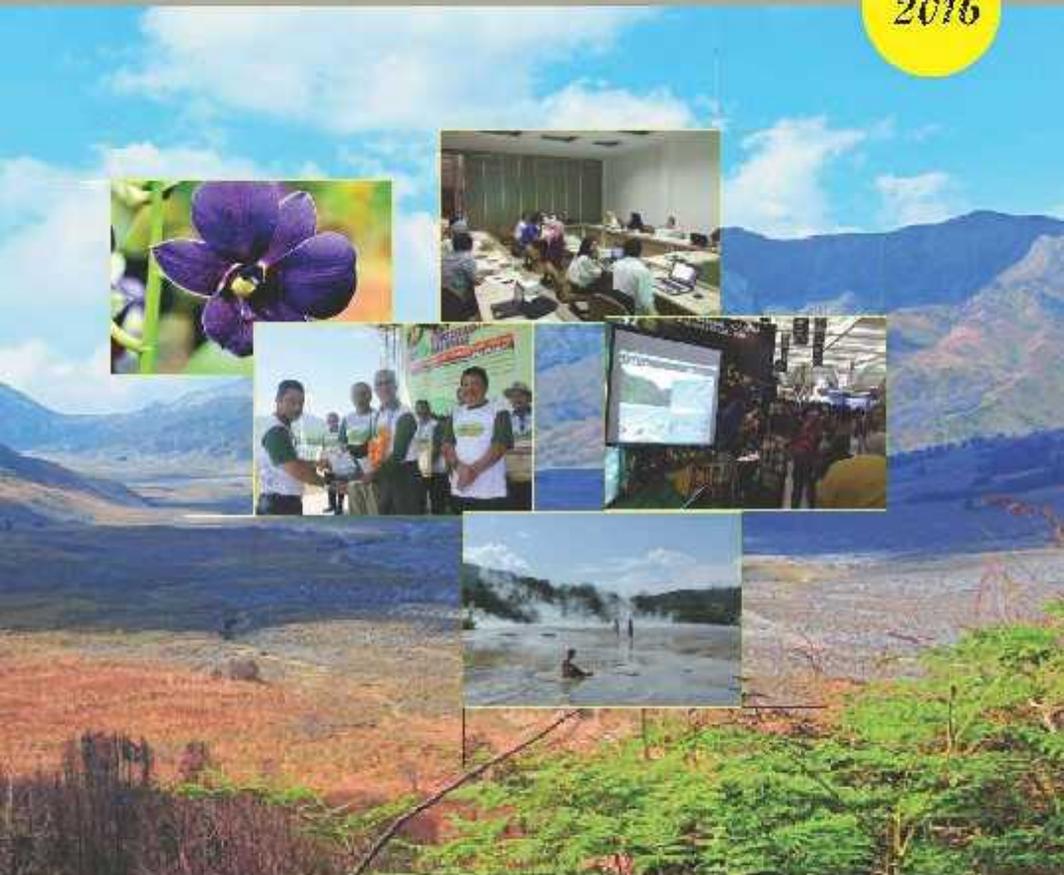


LAPORAN KINERJA

2016



Direktorat Jenderal KSDAE



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN, Hutan dan Kehutanan

Jakarta, Februari 2017



DITJEN KSDAE

KATA PENGANTAR



Sebagai institusi yang memiliki komitmen menjadi institusi yang akuntabel, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Komitmen kerja yang harus dicapai Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Tahun 2016.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan tugas selama satu tahun, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2016. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE serta mitra kerja, dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2017
Plt. DIREKTUR JENDERAL KSDAE,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.
NIP. 19640930 198903 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal KSDAE berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Tahun KSDAE, dan Perjanjian Kinerja (PK).

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program **Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. **Sasaran** program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
- b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :

- 1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3) Konservasi Spesies dan Genetik
- 4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
- 5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
- 6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- 7) Pengelolaan Taman Nasional
- 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2016 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2016. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.

Evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 dilakukan melalui pengukuran kinerja terhadap sembilan IKP. Beberapa kesimpulan atas pelaksanaan kinerja Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai berikut :



1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan IKP yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **109,16%**, meningkat 11,88% jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2015 (97,57%). Capaian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. Triliun	5	6,5	130,95
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan mancanegara	250.000	481.518	150 (192,61)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan nusantara	4.000.000	7.698.550	150 (192,46)
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit)	Unit	26	122	150 (395,00)
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	50	29	58
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi	Unit	80	37	46,25
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>)	%	2	3,95	150 (197,5)
		Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	Unit	13	8	61,54
		Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	4	57,14
Rata-rata Capaian Kinerja Program						109,16

2. Secara umum pada tahun 2016 Ditjen KSDAE telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada IKP yang tertuang dalam PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2016, dari sembilan IKP terdapat lima indikator yang realisasi kinerjanya melebihi target, sedangkan empat IKP lainnya belum tercapai kinerjanya sesuai target yaitu Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70%, Operasionalisasi KPHK Non TN, Pembentukan kawasan ekosistem esensial, dan ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% tidak dapat tercapai sesuai target karena untuk mencapai IKK ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dukungan dari Direktorat lain. Operasionalisasi KPHK non TN tidak dapat terealisasi sesuai target karena ada beberapa kawasan yang SK Pembentukannya baru turun di akhir tahun 2016 sehingga belum dianggarkan untuk kegiatan operasionalnya. Capaian pembentukan kawasan ekosistem esensial belum bisa memenuhi target karena dalam pembentukan kawasan tersebut peran pemerintah daerah sangat berpengaruh, sedangkan di daerah sendiri terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum adanya kesepakatan luas taman kehati serta belum terbitnya Peraturan Daerah terkait pengelolaan ekosistem esensial.



3. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pagu sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.126.868.520.807,-** atau **87,75%** (Sumber: SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 3 Februari 2017). Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2016 antara lain adanya kebijakan penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2, pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar **Rp. 124.065.791.000,-**. Besarnya *self blocking* ini mempengaruhi persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE. Jika menggunakan pagu setelah dikurangi *self blocking* yaitu sebesar **Rp. 1.159.969.241.000,-** maka persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **97,15%**. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 (97,15%) dengan pagu setelah dikurangi *self blocking* meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2015 (90,45%), dengan peningkatan sebesar 6,75%.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016 diantaranya adalah adanya kebijakan penghematan (*self blocking*) sehingga banyak kegiatan di Pusat maupun di UPT yang tidak dapat dilaksanakan misalnya kegiatan monitoring populasi satwa terancam punah prioritas dan kegiatan intervensi untuk mencapai nilai efektivitas melalui METT. Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ada, mencari sumber pendanaan lainnya dengan mitra terkait ataupun dengan Pemerintah Daerah sehingga kinerja yang ditargetkan dapat tetap terlaksana dengan baik. Serta penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B KELEMBAGAAN.....	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	3
C SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG	4
1. Kawasan Konservasi.....	4
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Sarana Dan Prasarana	8
II PERENCANAAN KINERJA	10
A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	10
1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis.....	10
2. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE	14
B TARGET JANGKA MENENGAH.....	15
C TARGET TAHUNAN.....	17
1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016	17
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.....	22
III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
1. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	24
2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2016	26
B PAGU DAN REALISASI ANGGARAN.....	87
1. Pagu Anggaran 2016	87
2. Realisasi Anggaran 2016	90
IV PENUTUP.....	93
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penggabungan UPT Ditjen KSDAE.....	3
Tabel 2	Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi	4
Tabel 3	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016	5
Tabel 4	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	6
Tabel 5	Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016	7
Tabel 6	Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016	7
Tabel 7	Aset Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016.....	9
Tabel 8	Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019.....	14
Tabel 9	IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 10	Target IKP Ditjen KSDAE Tahun 2016.....	17
Tabel 11	Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016	18
Tabel 12	Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016	18
Tabel 13	Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2016.....	18
Tabel 14	Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2016	19
Tabel 15	Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016	19
Tabel 16	Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2016	19
Tabel 17	Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016	20
Tabel 18	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016	21
Tabel 19	Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016	22
Tabel 20	Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2016.....	22
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2016.....	27
Tabel 22	Komoditi Sumber Nilai Ekspor TSL.....	29
Tabel 23	Nilai Devisa dari Pemanfaatan TSL Serta Bioprospecting	29
Tabel 24	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.....	31
Tabel 25	Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia.....	33
Tabel 26	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 juta Orang Wisatawan Nusantara 5 Tahun Terakhir.....	38
Tabel 27	Perbandingan Jumlah Wisman Ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisnus Secara Keseluruhan.....	40
Tabel 28	Capaian IKK Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebanyak 26 Unit	42
Tabel 29	Perbandingan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.....	43
Tabel 30	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.....	48
Tabel 31	Perbandingan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 dan 2016.....	51
Tabel 32	PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2012-2016.....	54
Tabel 33	Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Pengelolaan	55
Tabel 34	Capaian IKK Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Minimal 70% (Kategori Baik) Pada Minimal 50 Unit Dari 521 Unit KK Di Seluruh Indonesia	56
Tabel 35	Daftar Kawasan Konservasi Dengan Nilai METT Mencapai 70%	56
Tabel 36	Daftar KPHK yang Operasional Tahun 2016.....	63



Tabel 37	Capaian IKK Jumlah KPHK Pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional Yang Beroperasi Sebanyak 80 unit KPHK Tahun 2016.....	64
Tabel 38	Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas	68
Tabel 39	Data Peningkatan Populasi 25 Satwa Terancam Punah	68
Tabel 40	Capaian IKK Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016	75
Tabel 41	Ketersediaan Paket Data tahun 2015-2016	85
Tabel 42	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan Tahun 2016	88
Tabel 43	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Satker Tahun 2016	88
Tabel 44	Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE 2016 Berdasarkan Jenis Belanja.....	89
Tabel 45	Komposisi Pagu Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Dari Tahun 2012-2016	89
Tabel 46	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2016 Berdasarkan Sumber Dana.....	89
Tabel 47	Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan	90
Tabel 48	Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Per Jenis Satker	91
Tabel 49	Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja.....	91
Tabel 50	Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana	91
Tabel 51	Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Gambar 2	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2016	5
Gambar 3	Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016	5
Gambar 4	Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 ...	7
Gambar 5	Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016	8
Gambar 6	Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita	11
Gambar 7	Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE	13
Gambar 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016	28
Gambar 9	Capaian Nilai Ekspor Pemanfaatan Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam Serta Bioprospecting	30
Gambar 10	Perkembangan Nilai Devisa Pemanfaatan TSL Serta Bioprospecting Tahun 2010-2016 (Dalam Rp. Juta).....	30
Gambar 11	Penangkaran Buaya	30
Gambar 12	Komoditi Ekspor Kulit Buaya	30
Gambar 13	Komoditi Ekspor Kulit Biawak	30
Gambar 14	Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Ke Kawasan Konservasi	31
Gambar 15	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016	32
Gambar 16	Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisman Tahun 2015-2016 Dibandingkan Target 5 Tahun	32
Gambar 17	Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2016	33
Gambar 18	Pameran Indogreen dalam rangka Promosi dan Pemasaraan dan menjaring Wisatawan Mancanegara	36
Gambar 19	Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur....	36
Gambar 20	Aktivitas Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur	36
Gambar 21	Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara Ke Kawasan Konservasi.....	37
Gambar 22	Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2016.....	38
Gambar 23	Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisnus Tahun 2015-2016 Dibandingkan Target 5 Tahun	39
Gambar 24	Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak Yang Dikunjungi Wisnus Pada Tahun 2016	39
Gambar 25	Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2016.....	41
Gambar 26	Aktivitas Pengunjung (Wisatawan Nusantara) Berkemah Dan Mendaki di Taman Nasional Tambora	41
Gambar 27	Aktivitas Wisatawan Nusantara di Taman Nasional Lorentz	41
Gambar 28	Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016	44
Gambar 29	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)	44
Gambar 30	Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di Taman Wisata Alam(TWA) Lembah Harau, BKSDA Sumatera Barat	46
Gambar 31	Sarana Prasarana Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Alam di TWA Gunung Papandayan, BBKSDA Jawa Barat	46
Gambar 32	Sarana Prasarana yang Dibangun oleh Pemegang IUPSWA (PT. Pelengkung Indah Wisata) di TN Alas Purwo.....	46



Gambar 33	Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016....	48
Gambar 34	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)	48
Gambar 35	Bak Penampungan dan Penjernihan Air PDAM Tirta Sakti di Taman Nasional Kerinci Seblat yang Baru Dibangun Tahun 2016	50
Gambar 36	Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2016	51
Gambar 37	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)	52
Gambar 38	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN Gunung Halimun Salak	53
Gambar 39	Potensi Panas Bumi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	53
Gambar 40	PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2016	54
Gambar 41	Perbandingan Data PNBP Tahun 2015-2016	54
Gambar 42	Perbandingan Capaian IKK Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Minimal 70%	56
Gambar 43	Histogram Distribusi Normal Rata-Rata Nilai Efektivitas Pengelolaan di Indonesia.....	58
Gambar 44	Penyusunan Rencana Aksi di SM Rawa Singkil	61
Gambar 45	Pelatihan ToT Fasilitator METT	61
Gambar 46	Penyusunan Rencana Aksi di TN Kayan Mentarang	61
Gambar 47	Uji coba SMART di TN GHS	61
Gambar 48	Perbandingan Capaian IKK Operasionalisasi KPHK Non TN Tahun 2015-2016.....	64
Gambar 49	Sarana Prasarana Pendukung Operasional KPHK	67
Gambar 50	Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Tahun 2015-2016	72
Gambar 51	Kakatua Kecil Jambul Kuning yang Termonitor di Site Ai Manis	73
Gambar 52	Kakatua Kecil Jambul Kuning yang termonitor di Site Brang Singa	73
Gambar 53	Monitoring Populasi Orangutan	73
Gambar 54	Monitoring Populasi Monyet Hitam Sulawesi	73
Gambar 55	Monitoring Populasi Tarsius	73
Gambar 56	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah KEE Tahun 2015-2016	75
Gambar 57	Fasilitas di Taman Kehati Pelawan	76
Gambar 58	Jalan Setapak di Taman Kehati Kokolomboi	76
Gambar 59	Taman Bedegung, Kab. Muara Enim	77
Gambar 60	Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang	78
Gambar 61	Penyerahan Dokumen KEE Wehea-Kelay ke Dirjen KSDAE Kementerian LHK	79
Gambar 62	Dokumen Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	79
Gambar 63	Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016	80
Gambar 64	Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Paket Data Tahun 2015-2016	85
Gambar 65	Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat Di Demplot Pengembangan Tanaman Obat TN Dua Belas, Jambi	86
Gambar 66	Perkembangan Pagu Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016	87
Gambar 67	Perkembangan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Target Kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019	95
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2016.....	100
Lampiran 3	Data Komoditas Ekspor TSL dan Negara Tujuan	103
Lampiran 4	Data Ketersediaan Data Dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies Dan Genetik Yang Valid Dan Reliable Pada 7 Wilayah Biogeografi	109
Lampiran 5	Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satker Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016.....	115
Lampiran 6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2015-2016	118





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas penting dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor: 5 Tahun 1990, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam upaya pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Ditjen KSDAE melaksanakan Program **Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebagaimana telah dituangkan pula dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE disusunlah Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2016 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Ditjen KSDAE sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015 - 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016.





B. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik





BAB I PENDAHULUAN

baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditjen KSDAE dibantu oleh enam Eselon II Pusat, yaitu :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- c. Direktorat Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), yaitu sebagai berikut:

- a. Balai Besar KSDA : 8 UPT
- b. Balai Besar Taman Nasional : 8 UPT
- c. Balai KSDA : 18 UPT
- d. Balai Taman Nasional : 40 UPT

Pada tahun 2016, terdapat enam Balai Besar/Balai Taman Nasional yang digabung menjadi 3 Balai Besar/Balai Taman Nasional dan terdapat dua Balai KSDA yang digabung menjadi satu, yaitu sebagai berikut:

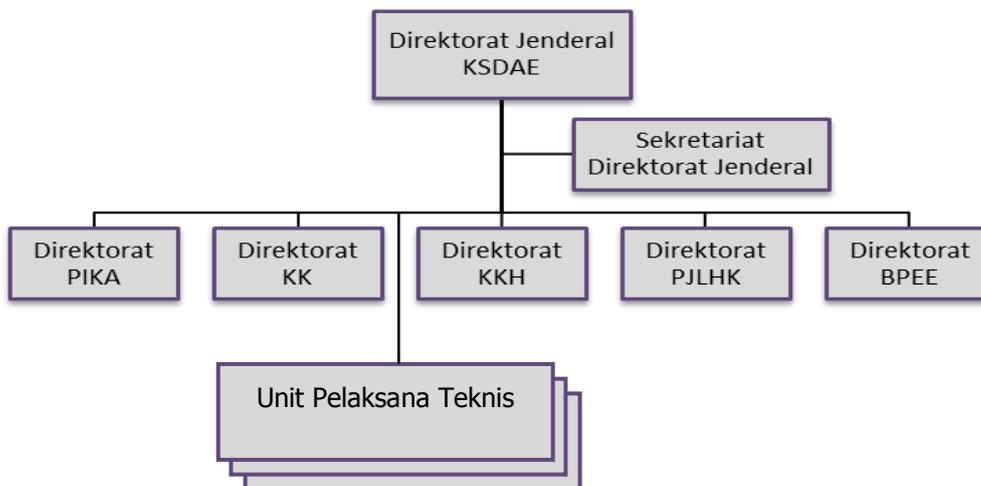
Tabel 1. Penggabungan UPT Ditjen KSDAE

No	UPT awal	Setelah Digabung
1	BTN Berbak	BTN Berbak dan Sembilang
2	BTN Sembilang	
3	BTN Manupeu Tanadaru	BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti
4	BTN Laiwangi Wanggameti	
5	BBTN Betung Kerihun	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
6	BBTN Danau Sentarum	
7	BKSDA Bengkulu	BKSDA Bengkulu
8	BKSDA Lampung	

Selain perubahan pada delapan UPT tersebut di atas, terdapat pula satu Taman Nasional baru yaitu Taman Nasional Gunung Tambora di Propinsi Nusa Tenggara Barat.



Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. SUMBER DAYA DAN SARANA PENDUKUNG

1. Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai **27.293.094,00** ha yang terbagi dalam 556 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi

NO	FUNGSI	JUMLAH	LUAS (ha)
1	CAGAR ALAM	219	4.083.414,76
2	SUAKA MARGASATWA	72	4.848.587,92
3	TAMAN WISATA ALAM	118	808.857,35
4	TAMAN BURU	11	171.289,39
5	TAMAN HUTAN RAYA	28	350.691,83
6	TAMAN NASIONAL *)	52	16.200.048,99
7	KSA/KPA	55	830.203,76
	TOTAL	556	27.293.094,00

Sumber: Data spasial Kawasan Konservasi untuk Kebijakan Satu Peta (KSP)
Ditjen PKTL tahun 2016

Data pada tabel di atas merupakan hasil kesepakatan antara Ditjen KSDAE dengan Ditjen PKTL sampai dengan akhir tahun 2016, yang dilaporkan untuk Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Namun demikian, data fungsi dan luas kawasan adalah data yang dinamis karena dalam prosesnya dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan luas kawasan konservasi. Misalnya perubahan fungsi KSA/KPA Gandang Dewata (Sulawesi Barat) menjadi Taman Nasional, dan KSA/KPA Gunung Maras (Bangka Belitung) menjadi Taman Nasional.

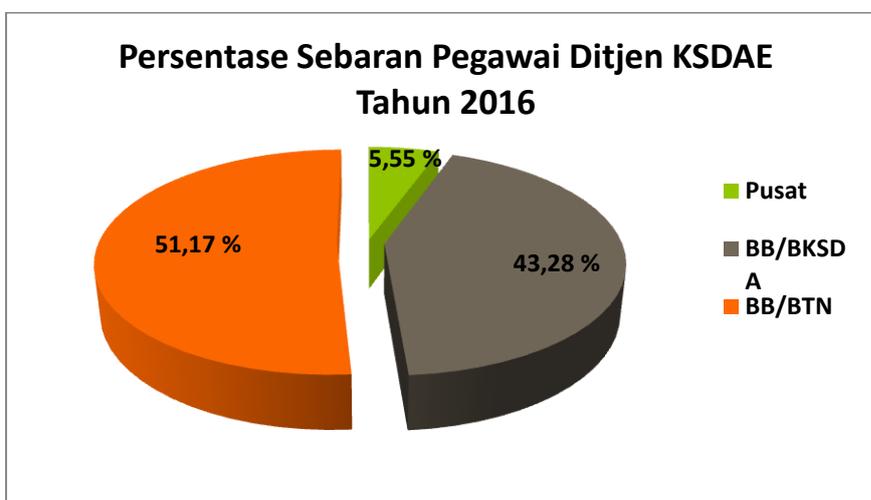
2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak 7.133 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016

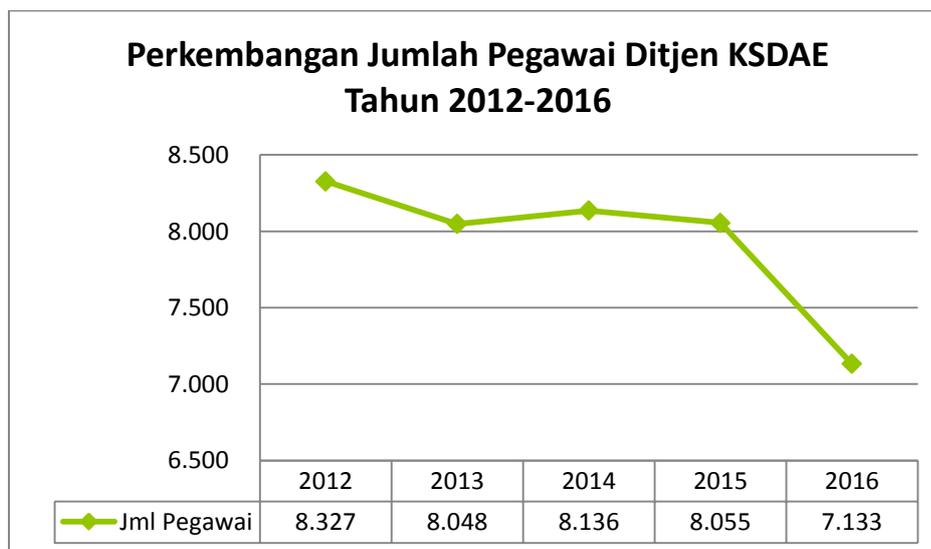
Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	396	5,55
BB/BKSDA	3.087	43,28
BB/BTN	3.650	51,17
Total	7.133	100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2016

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, jumlah pegawai Ditjen KSDAE terbanyak pada tahun 2012 dengan jumlah 8.327 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 7.133 orang. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2016 mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 terdapat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pada Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dipecah menjadi tiga Eselon I yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). Sehingga pegawai dari Ditjen PHKA dipecah juga pada tiga Eselon I tersebut, dan mengakibatkan turunnya jumlah pegawai pada Ditjen KSDAE.

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
PUSAT	4	105	130	44	101	6	6	396
UPT	11	434	1816	427	3811	139	99	6737
JUMLAH	15	539	1.946	471	3.912	145	105	7.133
%	0,21	7,56	27,28	6,60	54,84	2,03	1,47	100

Sumber: Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditjen KSDAE masih didominasi dari lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 3.912 orang (54,84%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4 sebanyak 1.946 orang (27,28%), sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan S3 sebanyak 15 orang (0,21%).

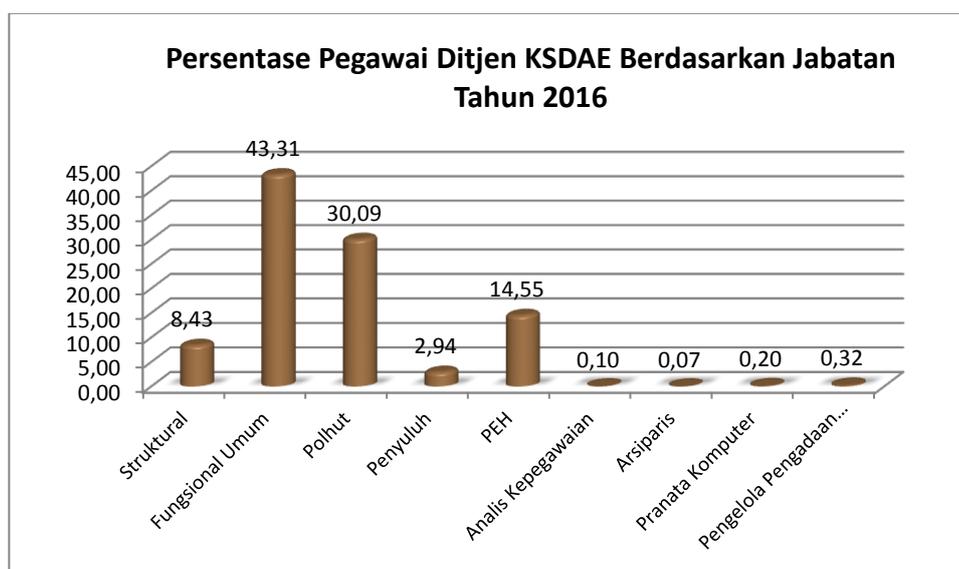
Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 3.089 orang (43,31%) diikuti Polisi Hutan sebesar 2.146 orang (30,09%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum terbit, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana Tabel 5.



Tabel 5. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	601	8,43
2	Fungsional Umum	3.089	43,31
3	Polhut	2.146	30,09
4	Penyuluh	210	2,94
5	PEH	1.038	14,55
6	Analisis Kepegawaian	7	0,10
7	Arsiparis	5	0,07
8	Pranata Komputer	14	0,20
9	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	23	0,32
	Jumlah	7.133	100

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017



Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

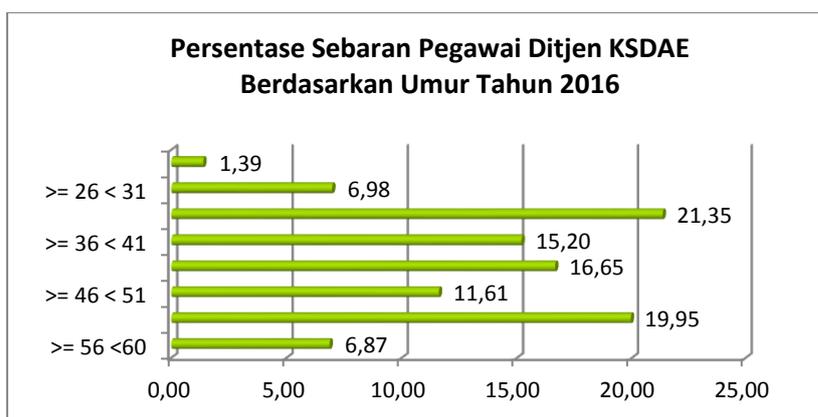
Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE adalah pada umur 31 - 36 tahun sejumlah 1.523 orang (21,35%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 99 orang (1,39%). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016

	>= 56 < 60	>= 51 < 56	>= 46 < 51	>= 41 < 46	>= 36 < 41	>= 31 < 36	>= 26 < 31	>= 21 < 26	Jumlah
Pusat	47	113	42	45	53	66	28	2	396
UPT	443	1.310	786	1.143	1.031	1.457	470	97	6.737
Jumlah	490	1.423	828	1.188	1.084	1.523	498	99	7.133

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017

Sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016

3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 per 3 Februari 2017 sebesar **Rp. 1.509.922.789.412,-**. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 16.987.316.802,-**.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 sebesar **Rp. 1.465.333.359.230,-**.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 27.602.113.380,-**.

Nilai aset yang dikelola Ditjen KSDAE selama tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 7. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Tahun	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lancar (Rp.)	Aset Lainnya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2012	2.018.946.452.683	30.195.926.272	31.865.762.028	2.081.008.140.983
2013	1.572.956.197.178	23.364.689.829	15.882.519.783	1.612.203.406.790
2014	1.595.824.750.913	14.781.005.558	24.320.165.935	1.634.925.922.406
2015	1.554.477.806.458	17.111.488.820	23.906.911.590	1.595.496.206.868
2016	1.465.333.359.230	16.987.316.802	27.602.113.380	1.509.922.789.412

Sumber : Setditjen KSDAE, 3 Februari 2017

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tahun 2016.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 6. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.





Gambar 6. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan



pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud, yaitu :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan, sebagaimana Gambar 7. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. **Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.**





Gambar 7. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari tiga sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu : (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, **sasaran program Ditjen KSDAE** dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
- b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBPNP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.



2. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan **Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui **delapan kegiatan**, yaitu :

- 1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 3) Konservasi Spesies dan Genetik;
- 4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- 5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
- 6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- 7) Pengelolaan Taman Nasional;
- 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut.

Tabel 8. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

Program	Tujuan	Sasaran (<i>Outcome</i> atau Hasil Yang diinginkan)	Impact (Dampak)	Indikator Kinerja Program
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) 2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit 3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013
		Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati		<ol style="list-style-type: none"> 4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun 5. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta





Program	Tujuan	Sasaran (<i>Outcome</i> atau Hasil Yang diinginkan)	<i>Impact</i> (Dampak)	Indikator Kinerja Program
				orang wisatawan mancanegara
				6. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara
				7. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara
				8. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit
				9. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)

B. TARGET JANGKA MENENGAH

Tahapan pencapaian IKP selama tahun 2015-2019 dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati						
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50	100	150	200	260
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20	100	100	100	100
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13	26	39	43	48
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah	7	7	7	7	7





No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
	biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)					
Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati						
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun	5	10	15	20	25
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,25	1,5
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit)	25	51	77	103	130

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yang menggambarkan kegiatan dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah). Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 diuraikan pada Lampiran 1.

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) pelaksanaan kinerja secara indikatif dari Program KSDAE sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 diuraikan dalam Lampiran 1. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/*output*), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.



C. TARGET TAHUNAN

1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

a. Rencana Kerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Ditjen KSDAE menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016 telah disusun sebagai Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.9/IV-SET/2015 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016. Matrik Renja Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target IKP Ditjen KSDAE Tahun 2016

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati			
1	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	KK	50
2	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	80
3	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2
4	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	Unit	13
5	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7
Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati			
1	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun	Rp. Triliun	5
2	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000
3	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000
4	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit)	Unit	26

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:





Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i>			
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	30
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	100
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i>			
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	50
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	30
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	Desa	77
5	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	30.000
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i>			
1	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2
2	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	2
3	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Unit	10
4	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rp. Triliun	5
5	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	10
6	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7
7	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	PIC	2
8	Jumlah hasil <i>assesment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekrayasa Genetik	PRG	4





BAB II PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
9	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	Unit	1
10	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Unit	10

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i>			
1	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000
2	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000
3	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20
4	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5
5	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10
6	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1
7	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK	Unit	-

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial</i>			
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	KEE	13
2	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	Paket Data	13
3	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen	13
4	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	Kawasan	2
5	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	Ekoregion	1
6	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	Spesies	60

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan</i>			
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	30
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	100
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521





BAB II PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20
6	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	50
7	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	30
8	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000
9	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	Desa	77
10	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	80
11	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34
12	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2
13	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	2
14	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	10
15	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7
16	Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	Unit	10
17	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000
18	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000
19	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20
20	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5
21	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10
22	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1
23	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	Orang	1.200
24	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Poin	77,25

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional</i>			
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	Dokumen	10
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	unit	10
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	Paket Data	50
4	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20





No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
5	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	Unit	10
6	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	10
7	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	30.000
8	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	Desa	50
9	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	40.000
10	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34
11	Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2
12	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7
13	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	Unit	10
14	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000
15	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	4.000.000
16	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20
17	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5
18	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10
19	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1
20	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK	Unit	-
21	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	Orang	1.200
22	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Poin	77,25

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i>			
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Poin	77,25

b. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen KSDAE pada tahun 2016, sebagaimana pagu indikatif pada Renja Ditjen KSDAE tahun 2016, direncanakan sebesar Rp. 1.841.300.000,-. Namun demikian, berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.312/Menlhk-Setjen/2015 sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor: S-505/MK.02/2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2016, pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 berkurang menjadi





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rp. 1.521.710.000,-. Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran. Sumber pembiayaan dan jenis belanja Ditjen KSDAE pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016

No	Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang		
			Operasional	Non Operasional	
1	Rupiah Murni	770.408.471	152.591.529	375.000.000	1.298.000.000
2	PNBP	-	-	200.000.000	200.000.000
3	HLN	-	-	23.710.000	23.710.000
	Total	770.408.471	152.591.529	598.710.000	1.521.710.000

Sumber: Renja Ditjen KSDAE 2016

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut

Tabel 20. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. 5 Triliun
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	250.000 orang wisatawan mancanegara
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	4.000.000 orang wisatawan nusantara
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi	26 Unit
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	50 Unit KK
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi	80 Unit
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>)	2%
		Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	13 Unit
		Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pernyataan PK Ditjen KSDAE Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam Lampiran 2.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu:

- 1) Perencanaan Strategis

- a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu:

- Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tidak spesifik dan terukur sehingga target kinerja juga tidak dapat ditetapkan dengan baik;
- Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu dokumen Renstra belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja.

- b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:

- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah ada, namun target kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Renstra dan belum ada penetapan oleh Direktur Jenderal KSDAE;





- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja;
 - Dokumen PK belum menyajikan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana IKP yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu 9 IKP yang ditetapkan pada Renstra, hanya 3 IKP yang dicantumkan pada dokumen PK.
- b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:
- Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, dimana penetapan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja;
 - Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra, khususnya terkait dengan penyajian IKP.
- c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- b. Pengukuran Kinerja
- 1) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I;
 - 2) Implementasi pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - b) IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - c) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
- 1) Penyajian informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya dapat diandalkan karena terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan terukur.
 - 2) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - b) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - c) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
- d. Evaluasi Internal
- 1) Kualitas evaluasi, kelemahannya yaitu:
 - a) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - b) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.





e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKP tidak seluruhnya tercapai. Terhadap permasalahan yang direkomendasikan catatan-catatan untuk dilakukan perbaikan, yaitu sebagai berikut :

a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar :

- 1) Penetapan target kinerja dapat mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
- 2) Dokumen rencana kinerja tahunan menyesuaikan dokumen Renstra dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;
- 3) Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 4) Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra 2015-2019;
- 5) Penetapan target kinerja mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
- 6) Dokumen PK tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada dokumen Renstra 2015-2019;
- 7) Menyusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala.

b. Terhadap komponen pengukuran kinerja :

- 1) Pengumpulan data kinerja kepada satker dapat ditingkatkan sehingga dapat dijadikan bahan pengukuran kinerja Eselon I;
- 2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja;

c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki;

e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKP.

2. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2016

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$(Target - (Realisasi - Target))$$

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016. Terdapat dua sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Ditjen KSDAE yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 adalah pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2016

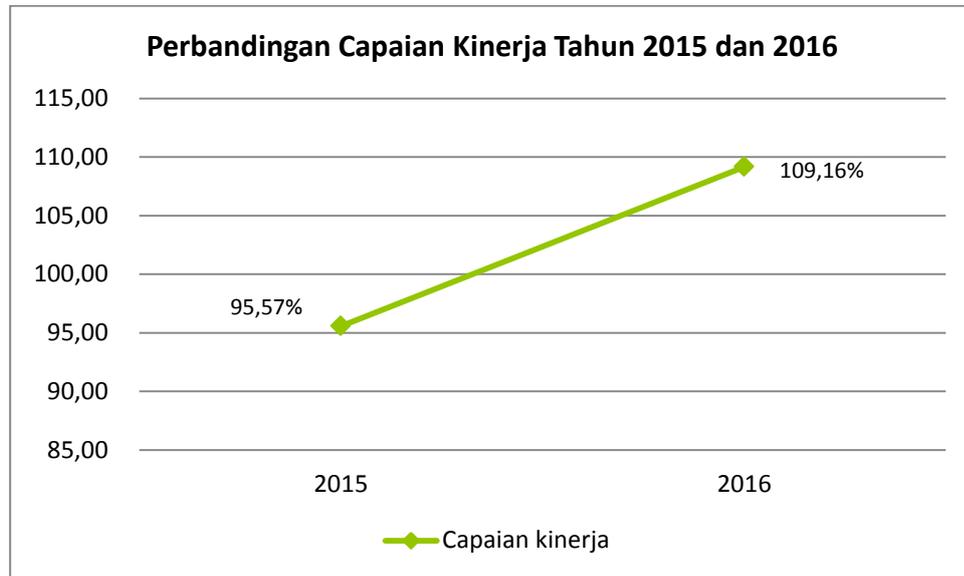
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. Triliun	5	6,5	130,95
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan mancanegara	250.000	481.518	150 (192,61)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan nusantara	4.000.000	7.698.550	150 (192,46)
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit)	Unit	26	122	150 (395,00)
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	50	29	58
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi	Unit	80	37	46,25
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>)	%	2	3,95	150 (197,5)
		Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	Unit	13	8	61,54
		Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	6	85,71
Rata-rata Capaian Kinerja Program						109,16

Capaian indikator kinerja program pada tahun 2016 (109,16%) meningkat jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 (97,57%). Peningkatannya adalah sebesar 11,88%. Peningkatan kinerja tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan baik di





tingkat Pusat ataupun UPT sebagai ujung tombak pencapaian target-target kinerja. Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran disampaikan berikut ini.

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Sasaran 1 ini dicapai melalui 4 indikator kinerja yaitu :

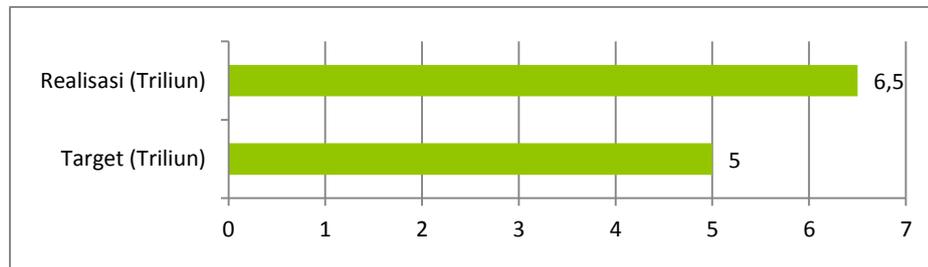
1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* dengan target Rp. 5 Trilyun;
2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 250.000 orang wisatawan mancanegara;
3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 4.000.000 orang wisatawan nusantara;
4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 26 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit).

Capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:





Indikator Kinerja Sasaran 1 :
Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Trilyun



Gambar 9. Capaian Nilai Ekspor Pemanfaatan Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam Serta *Bioprospecting*

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 6.547.512.373.876,-**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (Rp. 5 Trilyun), maka capaian kinerja sebesar **130,95%**. Pendapatan devisa negara tahun 2016 bersumber dari beberapa komoditi, antara lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Komoditi Sumber Nilai Ekspor TSL

No.	Jenis Komoditi	No.	Jenis Komoditi
1.	Amphibi	7.	Ikan
2.	Arthropoda	8.	Koral
3.	Buaya	9.	Mamalia
4.	Burung	10.	Moluska
5.	Flora	11.	Pakis
6.	Gaharu	12.	Reptil

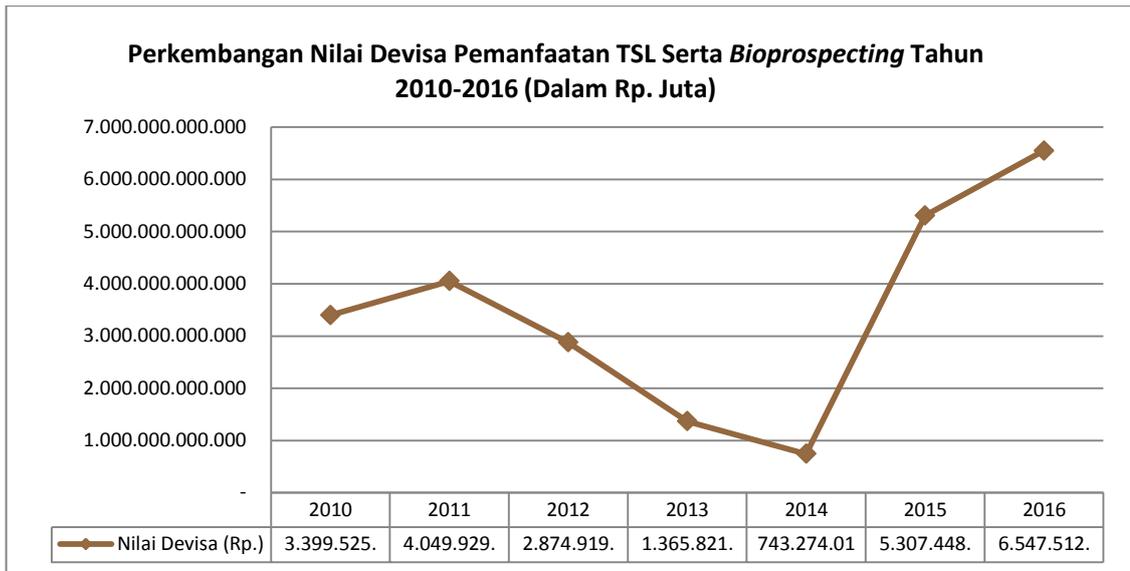
Komoditi ekspor dijual ke beberapa negara dari negara tetangga di Benua Asia hingga merambah ke Benua lain. Daftar komoditi beserta jumlah dan negara tujuan ekspor tersaji dalam Lampiran 3. Ekspor vaksin polio dari Biofarma berkurang cukup besar pada tahun 2016 karena hanya tinggal 2 negara saja yang belum bebas polio, sehingga pihak UNESCO mengurangi pemberian vaksin tersebut, dan lambat laun akan ditiadakan ketika dunia dinyatakan bebas polio, hal tersebut memperkecil nilai devisa untuk jenis *Macaca fascicularis*. Akan tetapi di tahun 2016 ini terdapat jenis TSL yang baru mulai di ekspor yaitu satwa buru Kepiting kenari (*Birguslastro*), yang menambah nilai devisa. Dan nilai ekspor gaharu dan koral juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai devisa di tahun 2016.

Tabel 23. Nilai Devisa dari Pemanfaatan TSL Serta *Bioprospecting*

Tahun	Nilai Devisa (Rp.)	% Peningkatan/Penurunan
2010	3.399.525.540.000	
2011	4.049.929.491.570	19,13
2012	2.874.919.368.600	-29,01
2013	1.365.821.077.410	-52,49
2014	743.274.018.000	-45,58
2015	5.307.448.015.075	614,06
2016	6.547.512.373.876	23,36

Sumber: Direktorat KKH, 2016





Gambar 10. Perkembangan Nilai Devisa Pemanfaatan TSL Serta *Bioprospecting* Tahun 2010-2016 (Dalam Rp. Juta)

Berdasarkan gambar di atas, terdapat kenaikan nilai devisa mulai tahun 2015, hal ini disebabkan karena naiknya nilai dollar dari Rp. 9000,- menjadi Rp. 13.000,-. Selain itu karena adanya peningkatan harga patokan, serta tertib administrasi pelaporan nilai ekspor. Dan di tahun 2015, data nilai devisa selain didapat dari realisasi dikalikan dengan harga patokan dan nilai rupiah saat itu, juga didapat dari *invoice*/PEB dari masing-masing eksportir sehingga data yang didapat lebih akurat.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja ini adalah Tercapainya target Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2016.



Gambar 11. Penangkaran Buaya



Gambar 12. Komoditi Ekspor Kulit Buaya

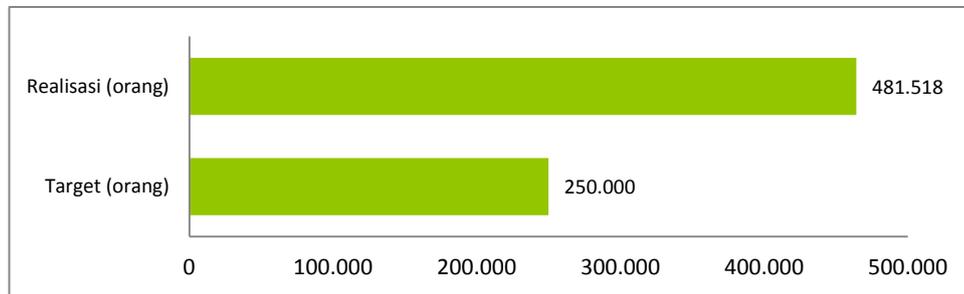


Gambar 13. Komoditi Ekspor Kulit Biawak





**Indikator Kinerja Sasaran 2 :
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara**



Gambar 14. Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Ke Kawasan Konservasi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah sebanyak **481.518** orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (250.000 orang), maka capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **192,61%**. Dikarenakan capaian kinerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar **150%**.

Jumlah wisman tersebut merupakan gabungan antara jumlah wisman tahun 2015 yang belum terhitung pada capaian tahun 2015 dan jumlah wisman pada periode Januari-Desember 2016. Jumlah wisman tahun 2015 yang belum terhitung pada laporan capaian tahun 2015 sebanyak 160.325 orang dan jumlah wisman pada Januari-Desember 2016 sebanyak 321.193 orang. Kondisi kawasan konservasi yang sebagian besar merupakan remote area dan akses serta kecepatan internet yang tidak sama pada semua kawasan konservasi menyebabkan rekapitulasi data wisman tahun 2015 dari 48 UPT Taman Nasional dan 26 UPT KSDA baru selesai pada pertengahan tahun 2016, sehingga sebagian data wisatawan mancanegara tahun 2015 masuk dalam capaian tahun 2016.

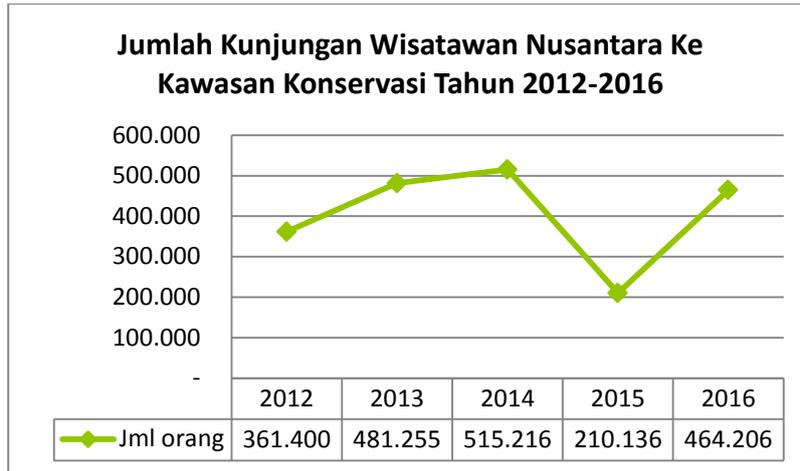
Pencapaian jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi apabila dibandingkan dengan tahun 2015, mengalami peningkatan sebesar 271.382 orang atau 129,15%. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2012	361.400	+ 29,68
2013	481.255	+ 33,16
2014	515.216	+ 7,06
2015	210.136	- 59,21
2016	481.518	+ 129,15
Jumlah	2.049.525	+ 139,83
Rata-Rata/ Thn	409.905	+ 27,97

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 27,97% per tahun. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara selama tahun 2012-2016 disampaikan pada gambar berikut.





Gambar 15. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 691.654 orang wisman, sedangkan target Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2016 terhadap target kinerja jangka menengah/selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 46,11%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja lima tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

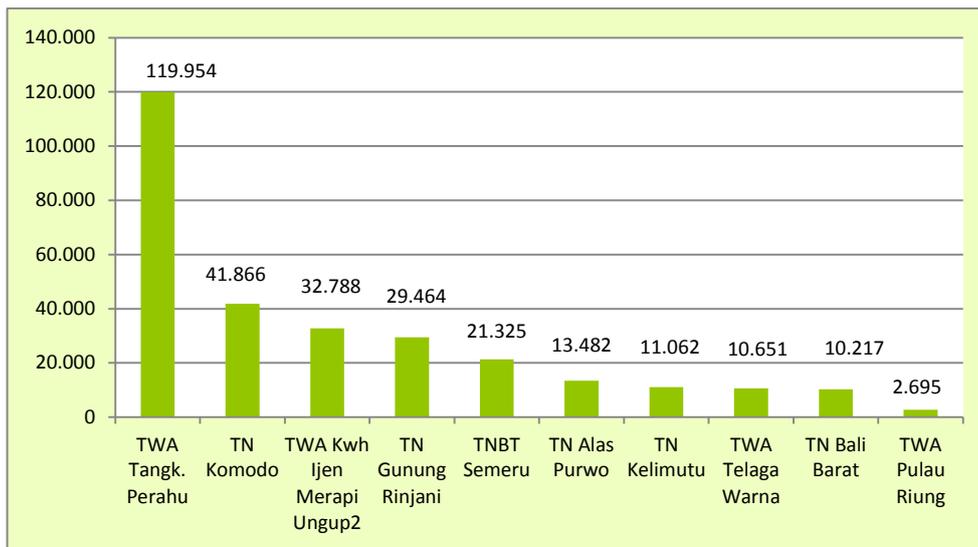


Gambar 16. Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisman Tahun 2015-2016 Dibandingkan Target 5 Tahun

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2016 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Gunung Ciremai, TN Bukit Barisan Selatan, TN Was Kambas, TN Kerinci Seblat, TN Ujung Kulon, TN Kalimutu, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Jawa Tengah, dan BKSDA Nusa Tenggara Barat.



Wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 tidak tersebar secara merata pada 52 kawasan Taman Nasional (49 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 11 taman buru (28 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisman dan sebagian lainnya dikunjungi wisman dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisman terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahun (Jawa Barat), TN Komodo, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (Jawa Timur), TN Gunung Rinjani, TN Bromo Tenger Semeru, TN Alas Purwo, TN Kelimutu, TWA Telaga Warna, TN Bali Barat dan TWA Pulau Riung (Nusa Tenggara Timur) dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 17. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2016

Secara nasional rata-rata jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada periode 2012-2016 adalah 9.418.942 orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah 409.905 orang/tahun pada periode yang sama. Persentase jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi terhadap jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada periode 2012-2016 berkisar antara 2,02% - 5,47% atau rata-rata per tahun jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebesar 4,29% per tahun dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia

Tahun	Jumlah wisman ke Indonesia	Jumlah wisman ke kawasan konservasi	Prosentase Σ wisman ke KK terhadap Σ wisman ke Indonesia (%)
2012	8.044.462	361.400	4,49 %
2013	8.802.129	481.255	5,47 %
2014	9.435.411	515.216	5,46 %
2015	10.406.759	210.136	2,02 %
2016 (Nov)	10.405.947	481.518	4,63 %
Jumlah	47.094.708	2.049.525	22,07 %
Rata-rata/Th	9.418.942	409.905	4,41 %

Sumber : Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kemenparekraf 2013 dan Kemenpar 2016





Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusaha pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- PP Nomor: 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peningkatan jumlah wisman pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan seperti melalui media seperti media cetak maupun elektronik, penyelenggaraan sejumlah *sail event* di kawasan konservasi dan event olah raga yang melintasi kawasan konservasi cukup menarik minat wisman untuk berkunjung ke kawasan konservasi serta adanya kebijakan penambahan jumlah negara yang dikenakan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Selain itu kondisi pertumbuhan wisatawan mancanegara di dunia secara tidak langsung juga menjadi penyebab peningkatan wisman ke kawasan konservasi. Berdasarkan publikasi UNWTO, *Tourism Towards 2030/Global Overview* memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 2010-2030. Tahun 2015 dan selanjutnya, tren pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan masih akan terus berlanjut. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisman di negara-negara berkembang akan mengungguli tingkat kunjungan wisman negara-negara maju.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya;





- 2) Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak;
- 3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi;
- 4) Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- 5) Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisman yang besar dan sebagian lainnya sangat sedikit;
- 6) Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; dan
- 7) belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.
- 8) Belum optimalnya penanganan dampak negative aktivitas pengunjung seperti sampah dan lain sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa:

- 1) Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain;
- 2) Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah;
- 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor: NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015 ;
- 4) Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan *Korea Forest Service* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project “Community based ecotourism di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi;
- 6) melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan dan tata tertib pengunjung;
- 7) Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan
- 8) Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.





Gambar 18. Pameran Indogreen Dalam Rangka Promosi dan Pemasaraan dan Menjaring Wisatawan Mancanegara

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manfaat tidak langsung berupa *multiplier effect* dari kunjungan wisman. Manfaat tidak langsung kunjungan wisman ke kawasan konservasi diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain berupa penerimaan daerah dan kesempatan penyerapan jumlah tenaga kerja di bidang wisata alam. Sedangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, dan lain-lain sebagainya.



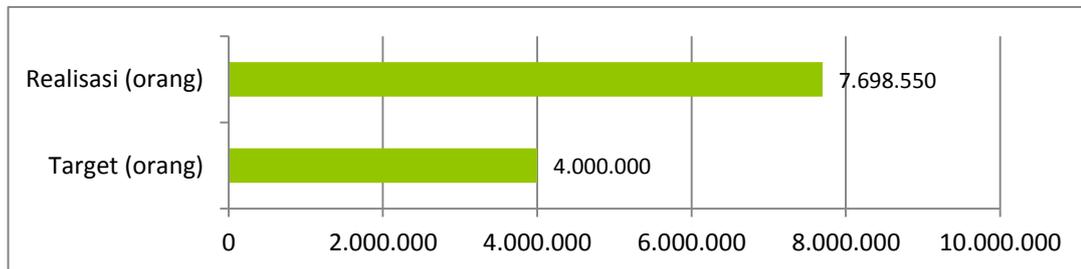
Gambar 19. Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur

Gambar 20. Aktivitas Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur





**Indikator Kinerja Sasaran 3 :
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara**



Gambar 21. Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara Ke Kawasan Konservasi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah sebanyak **7.698.550** orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (4.000.000 orang), maka capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **192,46%**. Dikarenakan capaian kinerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar **150%**.

Jumlah wisnus tersebut merupakan gabungan antara jumlah wisnus tahun 2015 yang belum terhitung pada capaian tahun 2015 dan jumlah wisnus pada periode Januari-Desember 2016. Jumlah wisnus tahun 2015 yang belum terhitung pada laporan capaian tahun 2015 sebanyak 1.102.826 orang dan jumlah wisnus pada Januari-Desember 2016 sebanyak 6.595.724 orang wisnus. Kondisi kawasan konservasi yang sebagian besar merupakan remote area data kses serta kecepatan internet yang tidak sama pada semua kawasan konservasi menyebabkan rekapitulasi data wisnus tahun 2015 dari 48 UPT Taman Nasional dan 26 UPT KSDA baru selesai pada pertengahan tahun 2016, sehingga sebagian data wisatawan nusantara tahun 2015 masuk dalam capaian tahun 2016.

Pencapaian kinerja terkait data kunjungan wisnus diperoleh dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2016 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Gunung Ciremai, TN Bukit Barisan Selatan, TN Was Kambas, TN Kerinci Seblat, TN Ujung Kulon, TN Kalimutu, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Jawa Tengah, dan BKSDA Nusa Tenggara Barat.

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3.660.480 orang wisnus atau 190,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisnus selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.



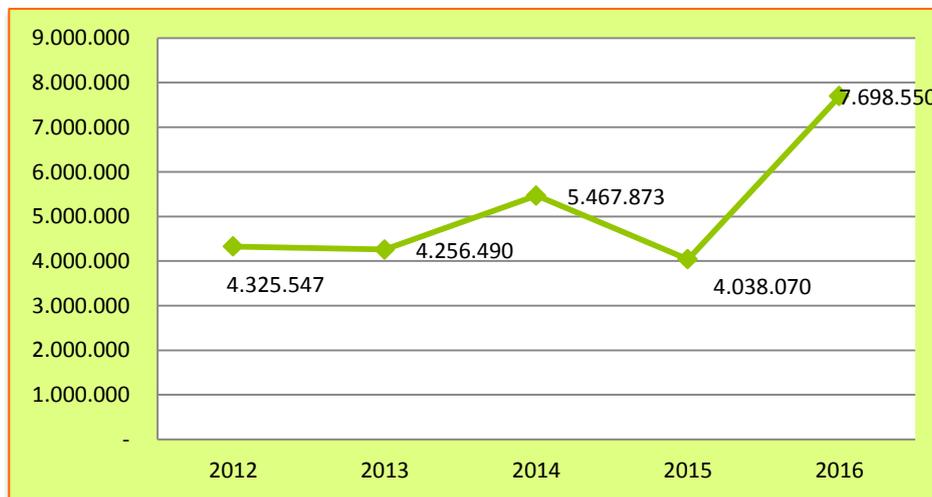


Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 juta Orang Wisatawan Nusantara 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Wisnus (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2012	4.325.547	- 10,14
2013	4.256.490	-1,60
2014	5.467.873	+ 28,46
2015	4.038.070	- 26,15
2016	7.698.550	+ 90,65
Jumlah	25.786.530	+ 81,22
Rata-Rata/ Thn	5.157.306	+ 16,24

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2012, 2013, 2014, 2015; Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

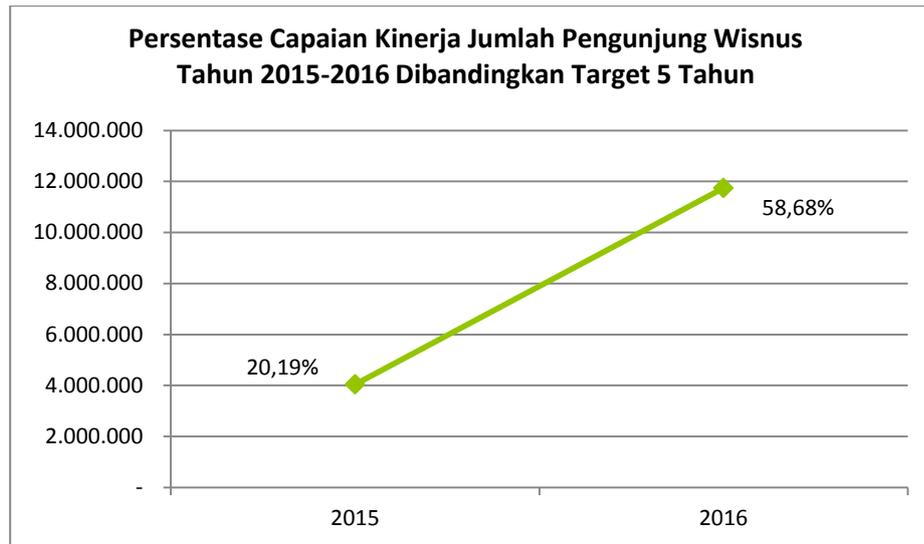
Rata-rata jumlah wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 5.157.306, sedangkan rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 16,24% per tahun. Perkembangan jumlah wisnus 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 22. Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2016

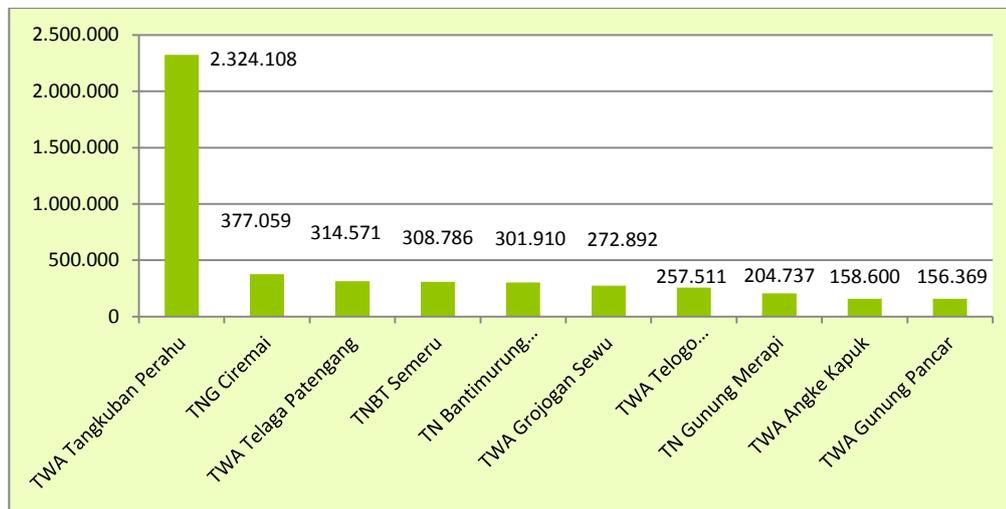
Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 11.736.620 orang wisnus sedangkan target jangka menengah sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2016 terhadap target pencapaian kinerja jangka menengah/selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 58,68%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 23. Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisnus Tahun 2015-2016 Dibandingkan Target 5 Tahun

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 tidak tersebar secara merata pada 52 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisnus dan sebagian lainnya dikunjungi wisnus dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisnus terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahu, TN Gunung Ciremai, TWA Telaga Patengan, TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TWA Grojogan Sewu, TWA Telogo Warno Telogo Pengilon, TN Gunung Merapi, TWA Angke Kapuk dan TWA Gunung Pancar, dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 24. Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2016

Secara nasional rata-rata jumlah wisnus pada periode 2012-2015 adalah 250.395.000 orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah 5.157.306 orang/tahun pada periode yang sama. Persentase jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi terhadap jumlah wisnus keseluruhan periode 2012-2015 berkisar antara 1,58% - 2,18% atau rata-rata per tahun jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebesar 1,81% per tahun, sebagaimana tabel berikut.





Tabel 27. Perbandingan Jumlah Wisman Ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisnus Secara Keseluruhan

Tahun	Jumlah Wisatawa Nusantara secara nasional	Jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi	Persentase (%)
2012	245.290.000	4.325.547	1,76 %
2013	250.040.000	4.256.490	1,70 %
2014	251.200.000	5.467.873	2,18 %
2015	255.050.000	4.038.070	1,58 %
2016	NA	7.698.550	
Jumlah	1,001,580,000	25,786,530	7.23 %
Rata-Rata/ Thn	250,395,000	5.157.306	1.81 %

Sumber: Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kememparekrat 2013 dan Kemepar 2016

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain peningkatan minat masyarakat untuk melakukan wisata ke alam, peran media sosial dan media elektronik yang sangat besar terutama dimotori oleh kaum muda, meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga kegiatan wisata menjadi suatu kebutuhan.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya;
- 2) Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak;
- 3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi;
- 4) Kunjungan wisnus tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya dukung;
- 5) Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisnus yang besar dan mengarah pada mass tourism, sedangkan sebagian kawasan konservasi lainnya sangat sedikit dikunjungi wisnus;
- 6) Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung; dan
- 7) belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa :

- 1) Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain;
- 2) Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah;
- 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015;





- 4) Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan *Korea Forest Service (KFS)* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project “*Community based ecotourism* di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi;
- 6) Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan pengunjung;
- 7) Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan
- 8) Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisnus selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk menghindari *mass tourism*.



Gambar 25. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2016



Gambar 26. Aktivitas Pengunjung (Wisatawan Nusantara) Berkemah Dan Mendaki di Taman Nasional Tambora



Gambar 27. Aktivitas Wisatawan Nusantara di Taman Nasional Lorentz



**Indikator Kinerja Sasaran 4 :
Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 26 unit**

Indikator Kinerja ini memuat 3 indikator yaitu :

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 20 unit dari baseline 2013 (target tahun 2016);
2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 5 unit (target tahun 2016);
3. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 1 unit (target tahun 2016).

Sampai dengan tahun 2016, capaian indikator-indikator tersebut disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Capaian IKK Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebanyak 26 Unit

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2016	Realisasi	%
1	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	Unit	20	89	150 (445)
2	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	32	150 (640)
3	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1	1	100
Rata-rata		Unit	26	122	150 (395)

Penjelasan capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 20 unit dari baseline 2013 (target tahun 2016)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2016 dengan jumlah target tahun 2016 sebanyak 20 unit. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah IUPSWA dan IUPJWA bertambah sebanyak **89 unit**, yang terdiri dari 9 unit IUPSWA dan 80 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar **445,00%**. Dikarenakan capaian kerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar **150%**.

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN. Tanjung Puting, TN Kepulauan Seribu, TN Meru Betiri, TN Kutai, TN Bogani Nani Wartabone, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Takabonerate, TN Kelimutu, TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas, TN Baluran, TN Betung Kerihun, TN Bali Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Wakatobi, TN Manusela, TWA Buyan Tamblingan, TWA Panelokan, TWA Batu Angus dan TWA Carita.

Pada tahun 2016 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 89 unit yang terdiri dari 9 unit IUPSWA dan 80 unit IUPJWA. Sembilan unit IUPSWA tersebut yaitu:

- a. PT. Segara Komodo Lestari di TN Komodo





- b. PT. Asri Indah Lestari di TWA Gunung Papandayan, BBKSDA Jawa Barat
- c. PT. Prabu Alam Lestari di TWA Tanjung Tumpa, BKSDA NTB
- d. PT. Kopeng Alam Wisata di TN Gunung Merbabu
- e. PT. Bangko-Bangko Lestari di TWA Bangko-Bangko, BKSDA NTB
- f. PT. Bunaken Oasis Dive Resort di TN Bunaken
- g. PT. Relief Property Management di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB
- h. PT. Karyapratama Rekajaya di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB
- i. PT. Balimatama Propertindo di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB

Dari 9 unit IUPSWA tersebut di atas terdapat 1 unit IUPSWA terbit di tahun 2015 tetapi belum masuk realisasi tahun 2015 dikarenakan Surat Keputusan IUPSWA diterima pada bulan Januari 2016 sehingga dimasukkan dalam realisasi 2016 yaitu atas nama PT. Segara Komodo Lestari yang berada di Taman Nasional Komodo.

Sedangkan untuk 80 unit IUPJWA terbagi atas:

- a. Perseorangan
 - 1) 17 unit IUPJWA di TN Gunung Ciremai
 - 2) 9 unit IUPJWA di TWA Telogo Warno Telogo Pengilon, BKSDA Jawa Tengah
 - 3) 49 unit IUPJWA di TWA Kawah Ijen, BBKSDA Jawa Timur
- b. Badan Usaha Milik Swasta
 - 1) 1 unit IUPJWA (CV. Prakarsa Mulia) di TWA Telaga Patengan, BBKSDA Jawa Barat
 - 2) 1 unit IUPJWA (CV. Pesona Malasari) di TN Gunung Halimun Salak
- c. Koperasi unit IUPJWA (Koperasi Karyawan Alam Lestari) di TWA Kawah Kamojang, BBKSDA Jawa Barat sebanyak 3 unit.

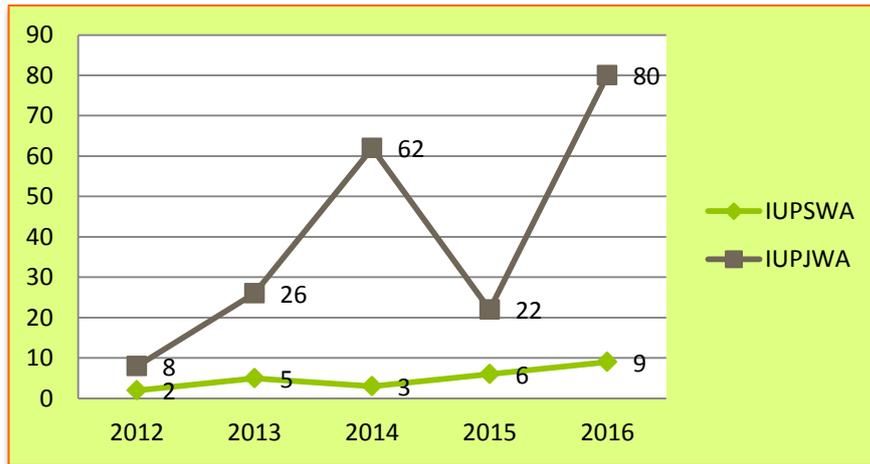
Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di kawasan konservasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 61 unit atau 277,27% dibandingkan tahun 2015. Dimana terjadi peningkatan IUPSWA sebanyak 3 unit dan IUPJWA sebanyak 58 unit. Perbandingan jumlah IUPSWA dan IUPJWA 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah IUPSWA dan IUPJWA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2012	10	-
2013	31	+ 210,00
2014	65	+ 109,78
2015	28	- 56,92
2016	89	+ 217,86
Jumlah	223	480,72
Rata-rata/ Thn	45	120,18

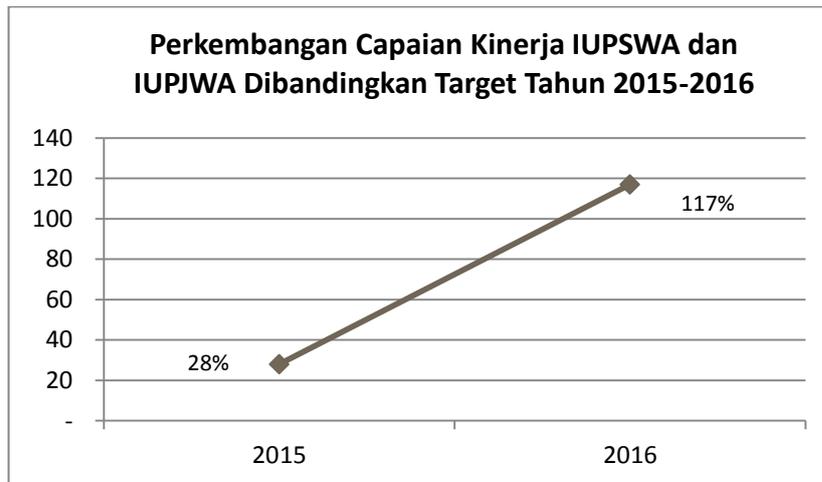
Rata-rata perkembangan (kenaikan datau penurunan) IUPSWA dan IUPJWA per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 120,18% per tahun. Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di kawasan konservasi 5 lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 28. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah tercapai kinerja sebesar 117 unit dari target jangka menengah sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 17 unit atau telah tercapai sebesar 117%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.





- Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor : P.5/IV-Set/2015.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Tama Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2016, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis usaha IUPSWA, antara lain ini terjadi disebabkan oleh:

- a. meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.
- b. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat *trend* pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir





dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2016 ada beberapa hambatan yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang yaitu:

- a. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik; dan
- b. Permasalahan administrasi dalam proses penerbitan IUPSWA.

Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT; dan
- b. Perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pencapaian kinerja yang diperoleh memberikan outcome diantaranya efektifitas pengelolaan meningkat karena ada pemegang IUPSWA dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan adanya pemegang IUPJWA sehingga masyarakat ikut dalam menjaga kawasan. Selain itu juga dengan adanya pemegang IUPSWA dan IUPJWA dapat meningkatkan PNBPN, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi dan perekonomian masyarakat. Peningkatan PNBPN melalui Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) dan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA). Sampai dengan akhir tahun 2016, nilai PNBPN dari PIPPA adalah sebesar Rp. 2.799.639.691,-, sedangkan nilai PNBPN dari IHUPA adalah sebesar Rp. 858.049.998,-.



Gambar 30. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di Taman Wisata Alam (TWA) Lembah Harau, BKSDA Sumatera Barat



Gambar 31. Sarana Prasarana Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Alam di TWA Gunung Papandayan, BBKSDA Jawa Barat



Gambar 32. Sarana Prasarana yang Dibangun oleh Pemegang IUPSWA (PT. Pelengkap Indah Wisata) di TN Alas Purwo





2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 5 unit (target tahun 2016)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2016 dengan jumlah target tahun 2016 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2016 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak **32 unit**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar **640%**, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar **150%**.

Sampai akhir Desember 2016, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 22 lokasi. Terdiri dari 6 (enam) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara) dan TWA Danau Matano (BKSDA Sulawesi Selatan). Sedangkan 16 lokasi berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, TN Maupeu Tanah Daru dan TN Bukit Tiga Puluh.

Sebanyak 8 lokasi sedang dalam proses pengusulan penetapan Areal Pemanfaatan Air adalah TN Teluk Cenderawasih, SM Kateri (Balai Besar KSDA NTT), TWA Baumata (Balai Besar KSDA NTT), TWA Camplong (Balai Besar KSDA NTT), TWA Ruteng (Balai Besar KSDA NTT), SM Bukit Rimba Bukit Baring (Balai KSDA Riau), TN Komodo, dan Balai Besar KSDA Papua.

Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, maka ditetapkan lokasi target untuk pencapaian IKK tahun 2016 yaitu TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan TWA Kerandangan.

Pemberian izin terhadap pemanfaatan air baru dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kinerja pada tahun 2016, pada IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 32 Izin pemanfaatan yaitu IUPA sebanyak 1 unit dan IPA sebanyak 9 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 1 unit yaitu : di Taman Nasional Gunung Ciremai. Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 31 unit yaitu di TN BBS (4 Unit), TN Laiwangi dan Manupeu Tana Daru (1 Unit), TN Rawa Aopa Watumohae (4 Unit), TN Lore Lindu (6 Unit), TN Babul (1 Unit), TN Akatajawelolobata (1 Unit), TN Gunung Halimun Salak (4 Unit), TN Gunung Merbabu (2 Unit), TN Gunung Merapi (3 Unit), TN Gunung Palung (1 Unit), TN Bromo Tengger Semeru (2 Unit), Balai Besar KSDA Jatim (1 Unit).

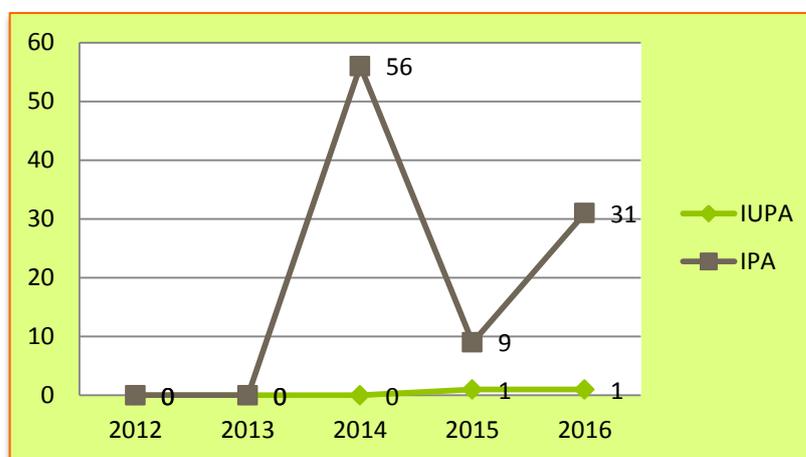
Pencapaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian IUPA sama dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 1 (satu) izin, sedangkan untuk IPA terjadi penambahan sebesar 244,45%. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut.



Tabel 30. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir

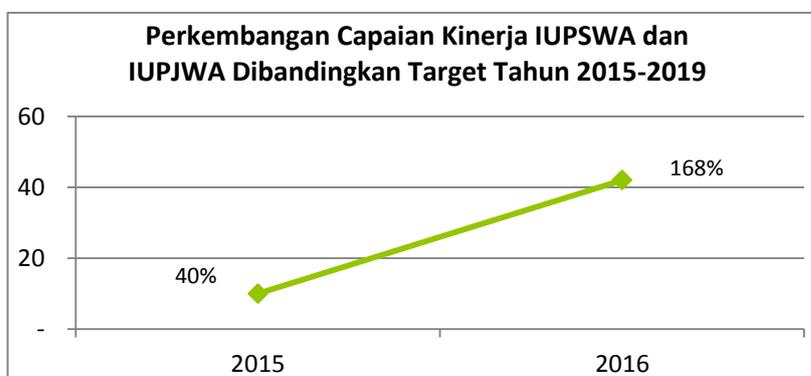
Tahun	Jumlah IUPA dan IPA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2012	0	0
2013	0	0
2014	56	+ 560,00
2015	10	- 83,93
2016	32	+ 244,44
Jumlah	98	720,51
Rata-rata/ Thn	20	144,102

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 144,102% per tahun. Perkembangan IUPA dan IPA di kawasan konservasi 5 lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 33. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2012-2016

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah tercapai kinerja sebesar 42 unit dari target jangka menengah sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 17 unit atau telah tercapai sebesar 168%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 34. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)



Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor: P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seperti halnya bimbingan teknis berupa sosialisasi mengenai peraturan P.64 dan tata cara dalam proses izin pemanfaatan air di kawasan SM, TN, Tahura dan TWA kepada para pemanfaat maupun calon pemanfaat jasa lingkungan air. Sinergisitas antar anggota forum pemanfaat air dengan UPT juga tercipta dengan baik melalui kegiatan penguatan kelembagaan. Kegiatan pertemuan teknis merupakan jembatan yang menghubungkan antara Ditjen KSDAE dengan instansi-instansi yang terkait di dalam bidang pemanfaatan air. Kegiatan pembahasan/ penilaian perusahaan PJA Air juga turut membantu di dalam mempercepat proses perijinan berupa pemberian penilaian dan arahan mengenai proses perijinan sehingga waktu penyelesaian proses perijinan lebih efektif. Evaluasi dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan air di UPT.

Permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan air, antara lain:

- a. Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 22 UPT dari 74 UPT);
- b. Regulasi pemanfaatan air untuk menunjang industri belum di atur dan masa waktu izin energi air yang pendek sehingga mengurangi minat investasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diterapkan antara lain:

- a. Intensif melakukan bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air;
- b. Penyempurnaan Permenhut Nomor: 64 tahun 2013.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 64.917 KK dan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka usaha pemanfaatan air di kawasan konservasi kurang lebih 379 orang.





Gambar 35. Bak Penampungan dan Penjernihan Air PDAM Tirta Sakti di Taman Nasional Kerinci Seblat yang Baru Dibangun tahun 2016

3. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 1 unit (target tahun 2016)

Kebutuhan manusia akan energi terutama listrik dari hari kehari makin meningkat, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan serta sumber penyedia energi nasional. Salah satu sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia adalah panas bumi. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal termasuk panas bumi yang berada di kawasan konservasi. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi baru terbarukan.

Potensi panas bumi yang berada di kawasan konservasi saat ini yang sudah teridentifikasi sebanyak 48 titik dengan potensi sebanyak 6.157 mega watt. Potensi tersebut menyebar di beberapa kawasan konservasi yaitu:

- a. Taman Nasional Gunung Leuser di Propinsi Aceh.
- b. Taman Nasional Batang Gadis di Propinsi Sumatera Utara.
- c. Cagar Alam Malampah Alahan Panjang di Propinsi Sumatera Barat.
- d. Taman Nasional Kerinci Seblat di Propinsi Jambi.
- e. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Propinsi Lampung.
- f. Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Propinsi Jawa Barat.
- g. Cagar Alam Gunung Simpang di Propinsi Jawa Barat.
- h. Cagar Alam Kawah Kamojang di Propinsi Jawa Barat.
- i. Cagar Alam Telaga Bodas di Propinsi Jawa Barat.
- j. Taman Nasional Gunung Ciremai di Propinsi Jawa Barat.
- k. Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang di Propinsi Jawa Timur.
- l. Taman Wisata Alam Anggaranu Buyan /Anggaranu Tamblingan di Propinsi Bali.
- m. Taman Nasional Gunung Rinjani di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- n. Taman Wisata Alam Ruteng di Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- o. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Propinsi Sulawesi Utara.
- p. Cagar Alam Gunung Ambang di Propinsi Sulawesi Utara.
- q. Cagar Alam Gunung Lokon di Propinsi Sulawesi Utara.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah target tahun 2016 sebanyak 1 unit. Sampai akhir tahun 2016 jumlah IPJLPByang telah terbit





sebanyak **1 unit**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar **100%**. Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Gunung Halimun Salak, CA Papandayan, CA Kamojang, CA Ambang dan TN Rinjani.

IPJLPB yang telah diterbitkan adalah IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016 An. PT. Pertamina Geothermal Energy-Chevron Geothermal Salak, LTD di TN Gunung Halimun Salak dengan kapasitas listrik terpasang dari energi panas bumi sebesar 377 MW.

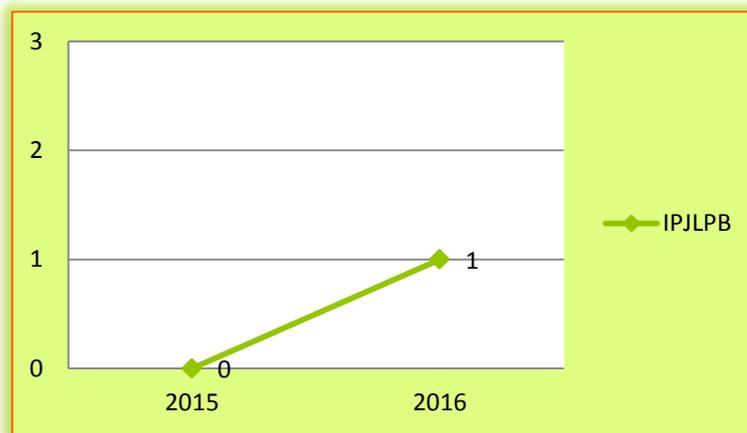
Selain itu sedang diproses permohonan IPJLPB Tahap Pemanfaatan An. PT. Pertamina Geothermal Energy-Chevron Geothermal Salak, LTD di TN Gunung Halimun Salak. Progres permohonan tersebut sudah sampai pada tahapan penerbitan IPJLPB yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK kepada Menteri LHK melalui ND Nomor: ND.2418/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pencapaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka capaian IPJLPB lebih tinggi dimana sebelumnya tidak ada izin, tetapi tahun 2016 ada izin sebanyak 1 unit. Kinerja kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi baru dilakukan pada tahun 2015, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja ini. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 dan 2016 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Perbandingan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Jumlah IPJLPB (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	0	0
2016	1	+ 100

Perkembangan pencapaian kinerja tahun 2015 dan 2016 pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada gambar berikut.



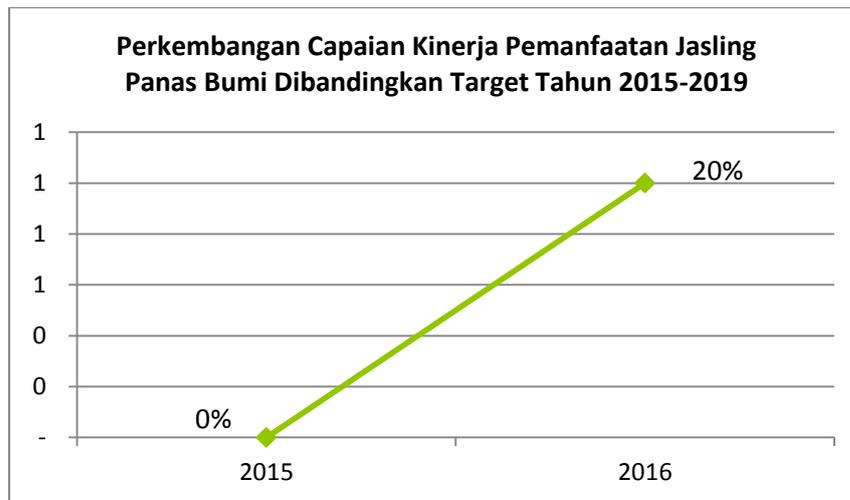
Gambar 36. Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2016

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah tercapai kinerja sebesar 1 unit dari target jangka menengah sebesar 5 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai yaitu sebanyak 1 unit atau sebesar 20%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016





dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat dilihat pada dilihat pada gambar berikut.



Gambar 37. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2015-2019)

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan yaitu :

1. Penyusunan/penyempurnaan NSPK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
3. Sinkronisasi / Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
4. Focus Group Discussion Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi.
5. Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di daerah.
6. Penyusunan Buku Informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
7. Fasilitasi/Pendampingan Program Pengembangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
8. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya untuk memproses izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang sudah ada (eksisting) di kawasan konservasi melalui Bimbingan Teknis, Sinkronisasi/Koordinasi dan *Focus Group Discussion* Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi yang intensif.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi eksisting di Cagar Alam Kamojang dan Papandayan belum dapat diproses IPJLPB karena status/fungsi kawasan yang diperkenankan untuk mendapatkan IPJLPB hanya di kawasan TN, TWA dan TAHURA. Terhadap permasalahan ini, pihak Unit Pelaksana Teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat telah mengajukan evaluasi fungsi kawasan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBPNP kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha





Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.



Gambar 38.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN Gunung Halimun Salak

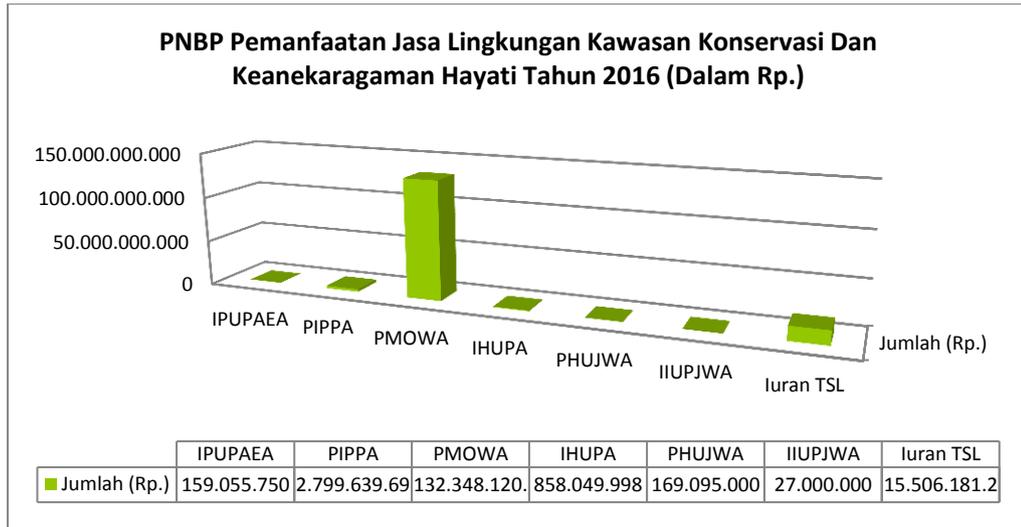


Gambar 39.
Potensi Panas Bumi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Berdasarkan data capaian pada 4 indikator pada sasaran 1 di atas, dapat disampaikan bahwa seluruhnya tercapai melebihi target. *Outcome* yang diperoleh adalah meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang berdampak pada meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi diperoleh melalui:

1. Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air (IPUPAEA),
2. Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA),
3. Pungutan Masuk Objek Wisata Alam (PMOWA),
4. Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA),
5. Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA), dan
6. Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IIUPJWA).

Sedangkan PNBP keanekaragaman hayati dari Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar (Iuran TSL). Sampai dengan akhir tahun 2016, PNBP yang diterima dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut.

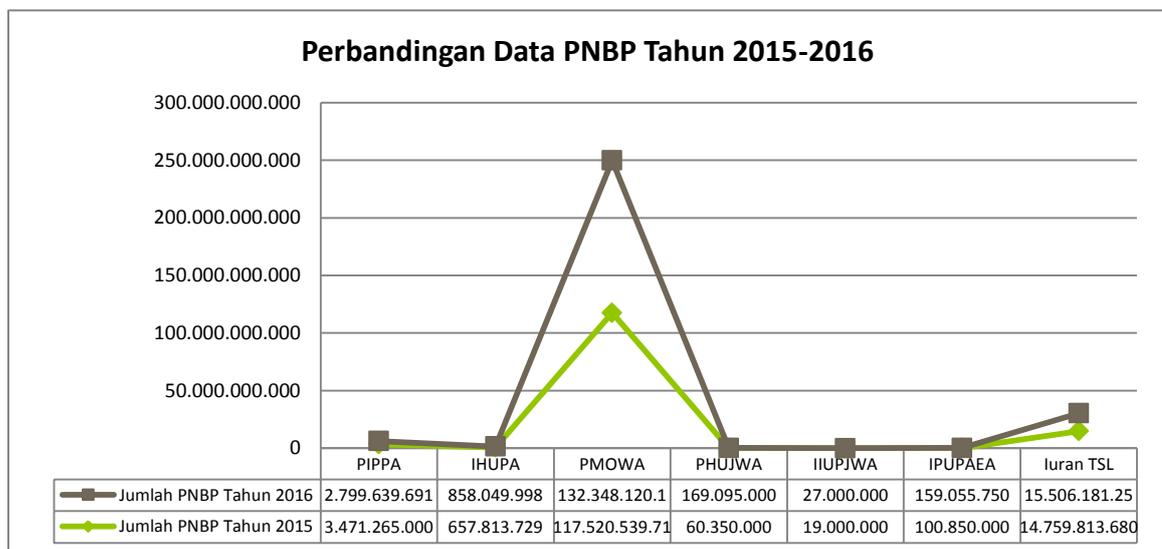


Gambar 40. PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keekaragaman Hayati Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, PNBP tertinggi adalah dari Pungutan MOWA atau karcis masuk, disusul dari Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar. Data PNBP tersebut dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 32. PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keekaragaman Hayati Tahun 2012-2016

No.	Jenis PNBP	Jumlah PNBP Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	PIPPA	357.718.000	55.788.000	6.540.410.000	3.471.265.000	2.799.639.691
2	IHUPA	188.262.278	241.623.598	257.082.092	657.813.729	858.049.998
3	PMOWA	20.039.871.992	36.073.742.293	61.363.436.962	117.520.539.716	132.348.120.112
4	PHUJWA	N/A	N/A	N/A	60.350.000	169.095.000
5	IIUPJWA	N/A	N/A	N/A	19.000.000	27.000.000
6	IPUPAEA	N/A	N/A	N/A	100.850.000	159.055.750
7	luran TSL	6.430.980.457	6.887.573.334	12.823.091.487	14.759.813.680	15.506.181.256
	Jumlah (Rp.)	27.016.832.727	43.258.727.225	80.984.020.541	136.589.632.125	151.867.141.807



Gambar 41. Perbandingan Data PNBP Tahun 2015-2016





Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati

Indikator Kinerja Sasaran 5 :

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 50 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia banyak menghadapi permasalahan baik bersifat eksternal berupa ancaman aktivitas yang merusak kawasan (penebangan liar, perambahan, perburuan satwa liar dan lain lain), maupun karena masalah internal lemahnya kapasitas pengelolaan.

Pihak pengelola pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi dalam mengelola kawasan konservasi tersebut, namun mendapat kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan, prioritas alokasi sumber daya, serta mengetahui apakah pengelolaan yang dijalankan sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan. Oleh karena perlu suatu sistem untuk mengukur efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi, sehingga memungkinkan pihak pengelola untuk menerapkan *adaptive management* sesuai kebutuhan pengelolaan dari waktu ke waktu berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan. Kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini di Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga pengelolaan menjadi tidak terarah, tidak efektif dan tidak efisien dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu *framework* yang dikembangkan untuk penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia adalah *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT).

Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015, tahapan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KK seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 33. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Pengelolaan

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat						
2	Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
3	Penetapan nilai awal METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
4	Penilaian METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
5	Upaya Peningkatan Efektivitas	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						

Berdasarkan tabel di atas dan pada peraturan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tersebut disebutkan bahwa penilaian hanya dilakukan 3 (tiga) kali selama periode 2015-2019, yaitu penilaian awal tahun 2015, penilaian tengah tahun 2017 dan penilaian akhir 2019. Sehingga pada tahun 2016 difokuskan pada kegiatan-kegiatan prakondisi dan kegiatan intervensi dalam upaya peningkatan efektivitas baik di pusat maupun di UPT. Penilaian dilakukan setiap 2 (dua) tahun agar kegiatan peningkatan efektivitas pada tingkat tapak berjalan optimal, apabila dilakukan setiap tahun maka sumberdaya yang dimiliki UPT akan terkonsentrasi pada proses penilaian bukan pada peningkatan efektivitas.

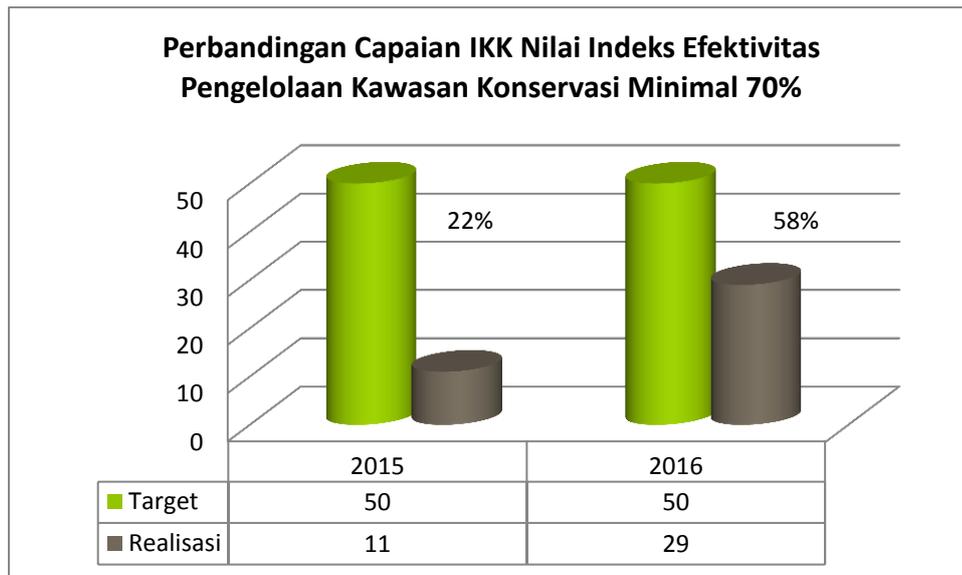


Pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Capaian IKK Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Minimal 70% (Kategori Baik) Pada Minimal 50 Unit Dari 521 Unit KK Di Seluruh Indonesia

IKK	Capaian Kinerja 2016		
	Target	Realisasi	%
Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	29	58

Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dapat disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 42. Perbandingan Capaian IKK Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Minimal 70%

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada IKK “Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia” dari 11 unit atau 22% pada tahun 2015 menjadi **29 unit atau 58%** pada tahun 2016, sehingga capaian selama 2 tahun (2015-2016) adalah sebanyak **40 unit kawasan konservasi**. Daftar kawasan yang telah mencapai nilai METT 70% adalah sebagai berikut.

Tabel 35. Daftar Kawasan Konservasi Dengan Nilai METT Mencapai 70%

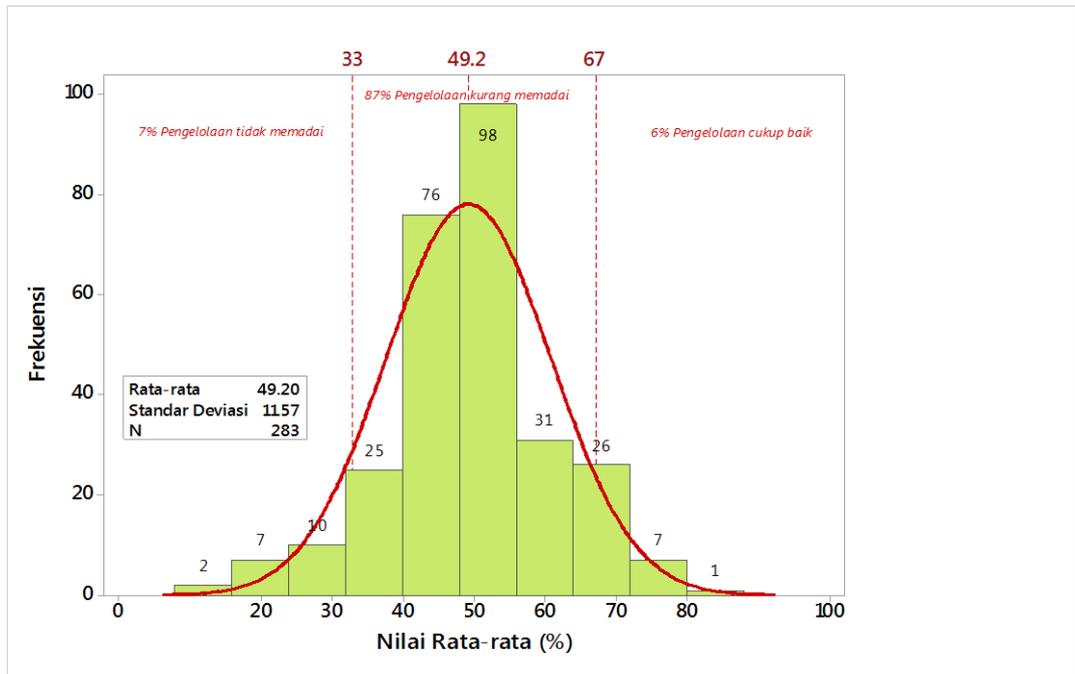
No	Jenis KK	Nama Kawasan	Propinsi	Nilai METT (%)
CAPAIAN TAHUN 2015				
1	TN	Bali Barat	Bali	73
2	TN	Ujung Kulon	Banten	77
3	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80
4	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71
5	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75
6	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70
7	TN	Wasur	Papua	70
8	TN	Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Jenis KK	Nama Kawasan	Propinsi	Nilai METT (%)
9	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71
10	TNL	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	77
11	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74
CAPAIAN TAHUN 2016				
12	TN	Gunung Merapi	DIY	70
13	TN	Bukit Dua Belas	Jambi	70
14	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	70
15	TN	Baluran	Jawa Timur	71
16	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	71
17	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	70
18	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	70
19	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	70
20	TN	Tanjung Putting	Kalimantan Tengah	71
21	TN	Kutai	Kalimantan Timur	70
22	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	71
23	TN	Waykambas	Lampung	71
24	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	70
25	TN	Manusela	Maluku	71
26	TN	Gunung Rinjani	NTB	70
27	TN	Kelimutu	NTT	70
28	TN	Komodo	NTT	70
29	TN	Manupeu TanaDaru	NTT	70
30	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	70
31	TN	Siberut	Sumatera Barat	70
32	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	71
33	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	70
34	TN	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara	70
35	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	70
36	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	70
37	TWA	Lejja	Sulawesi Selatan	70
38	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat	70
39	THR	Ir. H.Djuanda	Jawa Barat	74
40	THR	Mangkunegoro	Jawa Tengah	71





Gambar 43. Histogram Distribusi Normal Rata-Rata Nilai Efektivitas Pengelolaan di Indonesia

Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif diketahui bahwa kisaran nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 13%-80% dengan nilai rata-rata 49,2% (standar deviasi 11,57). Sejumlah 142 (50,18%) kawasan memiliki nilai efektivitas di bawah rata-rata nasional. Nilai rata-rata efektivitas pengelolaan di Indonesia lebih tinggi dari wilayah Afrika bagian Timur sebesar 41,9% dari 217 kawasan (Knights *et al.*, 2014) dan hampir sama dengan Afrika Selatan sebesar 49% dari 230 kawasan (Cowan *et al.*, 2010). Nilai rata-rata di Indonesia lebih rendah dari nilai rata-rata efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat global yaitu 53% dari 4.151 kawasan yang dinilai (Leverington *et al.*, 2010).

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK adalah sebagai berikut:

1. *Training of Trainer (ToT)* fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT)

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Direktorat Kawasan Konservasi dengan GIZ-Forclime, USAID-Lestari dan *the Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS – IP)*. Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari di Banyuwangi pada tanggal 11–15 April 2016. Salah satu keuntungan pemilihan lokasi adalah kedekatan dengan kawasan-kawasan konservasi yang dijadikan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Lokasi yang dijadikan tujuan kunjungan adalah Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran.

Peserta *ToT* sebanyak 32 orang yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal KSDAE (Direktorat Teknis dan UPT), Pusdiklat LHK, akademisi, dan mitra LSM, sedangkan narasumber yaitu Prof. Marc Hockings dan Fiona Leverington, Phd dari *University of Queensland*. Kedua narasumber tersebut merupakan penulis sejumlah publikasi mengenai pemantauan efektivitas pengelolaan kawasan lindung, serta *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*.



Peserta *ToT* kemudian ditetapkan sebagai fasilitator nasional melalui Surat Keputusan Direktur Kawasan Konservasi Nomor: SK.27/KK/PPKK.1/ KSA.1/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

2. Penetapan nilai awal METT sebagai *baseline*

Penetapan nilai awal METT pada tahun 2016 sebagai tahap kedua penetapan *baseline* nilai awal melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA dan KPA di Indonesia.

3. Ekspose Hasil Penilaian Awal METT

Kegiatan ekspose laporan hasil kegiatan METT dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 di Hotel Savero Bogor yang dibuka oleh Dirjen KSDAE dan dihadiri oleh perwakilan Eselon II, Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE, Akademisi dan mitra kerja Ditjen KSDAE.

Adapun tujuan kegiatan *workshop* adalah memaparkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 283 kawasan konservasi dan menggalang dukungan para pihak dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mendapatkan masukan dan saran serta tanggapan terhadap hasil penilaian awal maka Eselon II lingkup Ditjen KSDAE, Direktur Kehutanan dan konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Inspektur Wilayah II Kementerian LHK, Perwakilan Biro Perencanaan KLHK, dan Ir. Haryanto R. Putro (IPB).

4. Pelaporan Hasil Penilaian METT

Pelaporan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi disajikan dalam bentuk cetakan berupa Buku Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dan *digital* yang sementara saat ini dapat diakses sidak.ksdae.menlhk.go.id/mett. Untuk proses pencantuman dalam website Ditjen KSDAE masih dalam proses dengan alamat subdomain <http://mett.ksdae.menlhk.go.id>.

Hasil penilaian Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia dengan menggunakan METT juga telah disampaikan pada *IUCN World Conservation Congress 2016* di Hawaii pada bulan September 2016 dan dilaporkan pada sidang CBD di Cancun Mexico pada Bulan Desember 2016.

5. Monitoring dan evaluasi upaya tindak lanjut

Sesuai skema pencapaian IKK ini, bahwa penilaian akan dilakukan pada tahun 2017 sebagai monitoring peningkatan efektivitas terhadap penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Untuk mengetahui rencana aksi setiap kawasan dalam rangka peningkatan nilai efektivitas minimal 70% Direktur Kawasan Konservasi menyampaikan kepada Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk menyusun laporan tindak lanjut melalui surat Nomor: S.201/KK/PPKK1/KSA.1/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Laporan Tindak Lanjut Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (METT) dan Surat Nomor: S.219/KK/PPKK1/KSA.1/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Surat Keputusan Dirjen KSDAE tentang penetapan KK prioritas dan penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan.





Pada bulan Agustus 2016 dari 283 kawasan yang dinilai baru 40 kawasan yang menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian Direktur Konservasi Kawasan melalui surat Nomor: S.297/KK/PPKK1/KSA.1/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Tindak Lanjut Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (METT). Perkembangan sampai akhir Desember 2016 kawasan konservasi yang telah menyusun rencana tindak lanjut 111 kawasan konservasi.

6. Persiapan adopsi Sistem SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*)

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KK, elemen pengelolaan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan efektivitasnya adalah input, proses, dan output. Ketiga elemen tersebut memiliki kecenderungan nilai efektivitas yang rendah di setiap kategori kawasan. Kelemahan yang sering muncul diantaranya tidak cukup informasi esensial yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, sistem perlindungan kawasan masih lemah, pengelolaan kawasan belum berbasis riset, monitoring terhadap tujuan pengelolaan lemah, dan masih terbatasnya monitoring sistematis dan berkelanjutan terhadap nilai-nilai kawasan.

Alternatif peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi antara lain dengan membangun *Team Work* yang terstruktur, solid, dinamis dan adaptif, mengembalikan Investasi ke lapangan sehingga SDM dipaksa ke lapangan, penyediaan sistem pendataan tingkat pusat sampai resort agar data dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi di berbagai level manajemen. SMART merupakan salah satu perangkat untuk merencanakan, mendokumentasikan, menganalisis, melaporkan dan mengelola data keanekaragaman hayati, patroli dan tindakan–tindakan intervensi manajemen di tingkat tapak yang penerapannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam rangka adopsi dan implementasi sistem SMART tersebut, Direktur Jenderal KSDAE telah membentuk Kelompok Kerja SMART melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.220/KSDAE/SET/ KSA.1/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang beranggotakan unsur dari Ditjen KSDAE (Setditjen KSDAE, Direktorat KK, Direktorat PIKA, dan Direktorat KKH), Pusdiklat LHK serta mitra kerja Ditjen KSDAE yaitu USAID Lestari, WCS–IP, ZSL, FFI, WWF, YABI dan Forum Harimau Kita.

Pokja SMART telah mempersiapkan sistem SMART dengan menyusun draft pedoman implementasi SMART yang terdiri dari Pedoman implementasi SMART di Kawasan Konservasi, Modul Penggunaan Aplikasi SMART dan Panduan Pencatatan Data Kegiatan Patroli SMART.

Terkait dengan persiapan implementasi SMART dalam kerangka RBM (*Resort Based Management*) secara berjenjang dari tingkat tapak sampai dengan tingkat pusat telah melakukan kegiatan simulasi implementasi pedoman SMART di tingkat tapak untuk melihat sejauh mana pedoman ini dapat memenuhi kebutuhan pengelola kawasan dan pengguna lainnya. Kegiatan dimaksud telah diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 Desember 2016 di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan yaitu:





- a. Pemahaman akan **konteks** dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.
- b. **Perencanaan** terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- c. Alokasi sumberdaya (**input**), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
- d. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (**proses**).
- e. Produk dan jasa (**output**) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan.
- f. Dampak atau **outcome** yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Jika dilihat dari struktur elemen utama siklus pengelolaan tersebut maka, pencapaian Kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan KK berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE merupakan *resultante* dari capaian kinerja dari seluruh unsur dan bagian di dalam Ditjen KSDAE, sehingga nilai akhir METT dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan bagian Ditjen KSDAE mulai dari Pusat sampai Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 44. Penyusunan Rencana Aksi di SM Rawa Singkil



Gambar 45. Pelatihan ToT Fasilitator METT



Gambar 46. Penyusunan Rencana Aksi di TN Kayan Mentarang



Gambar 47. Uji coba SMART di TN GHS





Indikator Kinerja Sasaran 6 :

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 80 Unit KPHK

Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan serta upaya pelestarian sumber daya hutan yang tersisa, dalam 5 tahun terakhir Pemerintah telah mendorong Pembentukan Kesatuan Hutan (KPH) sebagai solusi jangka panjang. Dengan pembentukan KPH diharapkan upaya tata kelola hutan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga terwujud kelestarian fungsi dan manfaat hutan secara ekonomis, ekologis dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.6/Menhut-II/2009 (Pasal 1) KPH didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, sebagaimana diamanatkan pembentukannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 1 Tahun 1999 (Pasal 17), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 44 Tahun 20014 (Pasal 28) dan PP Nomor: 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor: 3 Tahun 2008.

Selama periode tahun 2010 – 2014, telah terbangun KPH melalui pembentukan KPH Model sebanyak 120 unit KPH terdiri dari KPH Lindung (40 unit) dan KPH Produksi (80 unit), serta pembentukan KPH Konservasi (50 unit) sebagai salah satu Program Prioritas Nasional.

Selanjutnya dalam RPJMN untuk periode 2015 -2019, pembangunan KPH kembali menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dengan target Operasionalisasi 579 Unit KPH, terdiri dari 347 unit KPH, 182 unit KPHL dan 50 unit KPHK Bukan Taman Nasional.

Secara bertahap sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, telah ditetapkan 50 unit KPHK yang terdiri atas 38 KPHK TN dan 12 unit KPHK Non TN. Sejak ditetapkannya ke-50 unit KPHK tersebut, pengelolaannya masih dibawah unit Balai Besar/Balai Taman Nasional dan Balai Besar/Balai KSDA.

Harapan bahwa KPHK terkelola secara mandiri dan dapat beroperasi secara maksimal belum sepenuhnya terealisasi. Dari analisis permasalahan disebabkan karena belum terbentuknya kelembagaan, anggaran terbatas dan SDM yang memadai dan mumpuni. Selain itu, penyebab adalah belum adanya acuan dan panduan untuk pengelolaan KPHK. Progres saat ini telah tersusun draft final Petunjuk Teknis Operasional KPHK.

Operasionalisasi KPHK tahun 2015 diarahkan pada 12 lokasi KPHK Non Taman Nasional yang sudah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu KPHK Rawa Singkil di Aceh, KPHK Arau Hilir di Sumatera Barat, KPHK Kerumutan di Riau, KPHK Dangku Bentayan di Sumatera Selatan, KPHK Guntur Papandayan di Jawa Barat, KPHK Tambora di Nusa Tenggara Barat, KPHK Ruteng di Nusa Tenggara Timur, KPHK Gunung Melintang di Kalimantan Barat, KPHK Towuti di Sulawesi Selatan, KPHK Morowali di Sulawesi Tengah, KPHK Nantu di Gorontalo, dan KPHK Jayawijaya di Papua. Namun dari 12 unit KPHK tersebut sebenarnya hanya 9 unit KPHK saja yang operasional di lapangan. Tiga KPHK yang belum operasional tahun 2015 adalah KPHK Tambora karena berubah fungsi menjadi taman nasional, KPHK Jayawijaya karena Balai Besar KSDA Papua akan merelokasi dengan unit KPHK yang lain dan KPHK Morowali yang mengajukan untuk penambahan luas kawasan KPHK.

Sesuai dengan Juknis Operasionalisasi KPHK (Nomor: P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016), maka suatu unit KPHK dikatakan beroperasi setelah memenuhi





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

persyaratan mutlak yaitu meliputi : 1) Wilayah KPHK; 2) Organisasi KPHK; 3) SDM; 4) Sarana dan Prasarana; dan 5) Ketersediaan Dana/Anggaran. Kesemua syarat mutlak dimaksud hanya dapat dipenuhi apabila KPHK Non Taman Nasional telah ditetapkan dengan SK Menteri KLHK.

Sampai dengan akhir tahun 2016, dari 56 Unit KPHK Non Taman Nasional telah diterbitkan penempatannya melalui SK Menteri KLHK, yang dapat dikategorikan operasional adalah sebanyak **37 unit KPHK**, data unit KPHK adalah sebagai berikut.

Tabel 36. Daftar KPHK yang Operasional Tahun 2016

No.	Nama Unit KPHK	SK KPHK	UPT Pengelola
1.	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	SK Menteri LHK No.SK. 467/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDAE Riau
2.	Kawah Ijen	SK Menteri LHK No.SK. 725/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Timur
3.	Jakarta	SK Menteri LHK No.SK. 731/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA DKI Jakarta
4.	Muara Kendawangan	SK Menteri LHK No.SK. 737/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Kalimantan Barat
5.	Gunung Nyiut	SK Menteri LHK No.SK. 738/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Kalimantan Barat
6.	Simpang Tilu	SK Menteri LHK No.SK. 739/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Barat
7.	Burangrang Tangkuban Perahu	SK Menteri LHK No.SK. 740/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Barat
8.	Padang Sugihan	SK Menteri LHK No.SK. 743/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sumatera Selatan
9.	Harlu	SK Menteri LHK No.SK. 744/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA NTT
10.	Gunung Mutis	SK Menteri LHK No.SK. 745/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA NTT
11.	Gunung Dako Pinjan Tanjung Matop Dolangon	SK Menteri LHK No.SK. 465/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
12.	Pangi Binangga	SK Menteri LHK No.SK. 463/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
13.	Gunung Tinombala Tanjung Santigi	SK Menteri LHK No.SK. 464/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
14.	Pamona Bancea Tomata	SK Menteri LHK No.SK. 462/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Sulawesi Tengah
15.	Waigeo	SK Menteri LHK No.SK. 459/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
16.	Gunung Meja Sidei Kaironi	SK Menteri LHK No.SK. 457/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
17.	Arfak	SK Menteri LHK No.SK. 458/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
18.	Bolmalit Maghlit	SK Menteri LHK No.SK. 450/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
19.	Sorong Klamono	SK Menteri LHK No.SK. 456/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai Besar KSDA Papua Barat
20.	Kuala Lupak	SK Menteri LHK No.SK. 466/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Selatan
21.	Cilacap	SK Menteri LHK No.SK. 472/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Jawa Tengah
22.	Pati Barat	SK Menteri LHK No.SK. 471/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Jawa Tengah
23.	Pararawen	SK Menteri LHK No.SK. 473/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Tengah
24.	Sei Lamandau	SK Menteri LHK No.SK. 474/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Kalimantan Tengah
25.	Bedugul – Sangeh	SK Menteri LHK No.SK. 475/Menlhk/ Setjen/	Balai KSDA Bali





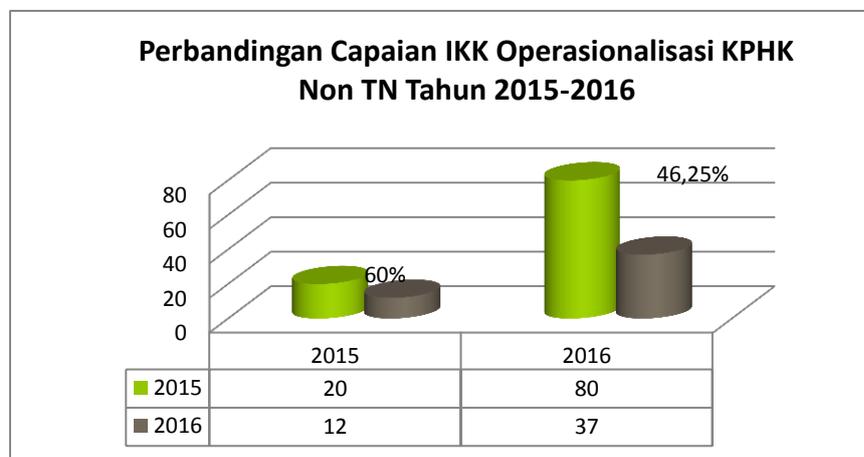
No.	Nama Unit KPHK	SK KPHK	UPT Pengelola
		PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	
26.	Kintamani	SK Menteri LHK No.SK. 476/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Bali
27.	Enggano	SK Menteri LHK No.SK. 470/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/6/2016, tgl 17 Juni 2016	Balai KSDA Bengkulu
28.	Dataran Tinggi Yang	SK Menteri LHK No.SK. 726/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Jawa Timur
29.	Cycloops Youtefa	SK Menteri LHK No.SK. 727/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Papua
30.	Lambusango	SK Menteri LHK No.SK. 726/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
31.	Peropa	SK Menteri LHK No.SK. 734/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
32.	Barumun	SK Menteri LHK No.SK. 694/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
33.	Sicike cike	SK Menteri LHK No.SK. 724/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
34.	Pulau Weh	SK Menteri LHK No.SK. 746/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Aceh
35.	Lingga Isaq	SK Menteri LHK No.SK. 747/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Aceh
36.	Tangkoko	SK Menteri LHK No.SK. 748/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Sulawesi Utara
37.	Yogyakarta	SK Menteri LHK No.SK. 749/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/9/2016, tgl 20 September 2016	Balai KSDA Yogyakarta

Dengan demikian, capaian IKK Operasionalisasi KPHK Non Taman Nasional Tahun 2016 adalah **37 unit** atau **46,25%** dari target 80 Unit yang menjadi target pada Renstra KSDAE 2015-2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 37. Capaian IKK Jumlah KPHK Pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional Yang Beroperasi Sebanyak 80 unit KPHK Tahun 2016

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 80 unit KPHK	80 unit	37 unit	46,25%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian IKK ini adalah sebagai berikut.



Gambar 48. Perbandingan Capaian IKK Operasionalisasi KPHK Non TN Tahun 2015-2016





KPHK yang sudah beroperasi tahun 2015 adalah 12 unit KPHK dari 20 unit KPHK yang ditargetkan. Volume target tidak dapat dicapai sesuai target karena dari 12 KPHK yang sudah ditetapkan tahun 2013 ada 3 KPHK yang tidak dapat beroperasi, yaitu : KPHK Tambora telah berubah fungsi menjadi taman nasional, KPHK Jayawijaya oleh Balai Besar KSDA Papua akan digantikan dengan KPHK yang lain, dan KPHK Morowali oleh Balai Besar KSDA Sulsel memasukan CA Tanjung Api dan TWAL Pulau Tokobae sebagai KPHK. Sedangkan 8 unit KPHK yang seharusnya masuk dalam target 2015 baru ditetapkan sebagai KPHK oleh Menteri LHK pada 17 Juni 2016.

Sedang untuk tahun 2016, KPHK yang sudah operasional adalah 37 Unit KPHK. Adapun output kegiatannya difokuskan untuk Penyusunan NSPK Draft Petunjuk Teknis Operasional KPHK, Bimbingan Teknis dan Supervisi, Sosialisasi Juknis, Pembangunan Basis Data, serta Penyiapan SDM dan Sarpras pada 10 Unit KPHK Non Taman Nasional di atas.

Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.

Strategi pencapaian IKK ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Pengendalian/Dukungan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan pada kegiatan dalam mengawal dan menjamin unit-unit KPHK Non TN agar dapat beroperasi dengan baik. Kegiatan ini meliputi :
 - a) Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Operasionalisasi KPHK; Saat ini sudah terbit Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor :P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional KPHK. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pengelola kawasan konservasi untuk mengelola kawasannya sebagai KPHK. Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.
 - b) Penyusunan edaran Direktur Jenderal/Direktur terkait Operasionalisasi KPHK; Surat Dirjen PHKA No.S.349/IV-KKBHL/2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Operasionalisasi KPHK. Dirjen PHKA meminta untuk mengalokasi personil di lapangan, pengadaan sarana prasarana pendukung operasional KPHK, melakukan kegiatan operasional minimal KPHK dan melakukan penyusunan dokumen perencanaan (RPJP dan penataan blok).
 - c) Bimbingan Teknis dan Supervisi; Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada Balai/Balai besar KSDA terkait operasionalisasi KPHK
 - d) Pembinaan dan Koordinasi; Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pimpinan untuk dapat memberikan pembinaan kepada Balai/Balai Besar KSDA yang berkaitan dengan operasional KPHK dan koordinasi pimpinan kepada pihak-pihak lain terkait yang menjadi stakeholders Balai/Balai Besar KSDA dalam pengelolaan kawasan.





e) Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan operasionalisasi KPHK. Kegiatan ini juga menghasilkan data dan informasi dalam bentuk buku profile KPHK.

2. Pelaksanaan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan pada kewajiban-kewajiban UPT dalam melaksanakan tahapan-tahapan operasionalisasi KPHK.

Dalam pencapaian IKK, terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Capaian kinerja IKK “Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK” dapat dicapai setelah unit KPHK dimaksud sudah ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai KPHK. Dari target 100 unit KPHK yang harus beroperasi sampai dengan 2019, hanya 12 unit KPHK yang sudah ditetapkan tahun 2013, itupun dari 12 KPHK tersebut hanya 9 KPHK yang operasional. Untuk yang 9 unit KPHK ini menjadi capaian kinerja tahun 2015. Selanjutnya 22 unit KPHK ditetapkan pada 17 Juni 2016 dan 24 unit KPHK ditetapkan pada 20 September 2016. Sehingga dari 56 unit KPHK yang ditetapkan pada tahun 2016, tidak semua KPHK melakukan penganggaran pada DIPA UPT pengelola kawasan dimaksud.
2. Pada tahun 2016 ini, terjadi 3 kali penghematan anggaran kegiatan yaitu penghematan untuk APBN-P Tahap 1, PABN-P Tahap 2 dan *Sharing* Tunjangan Kinerja. Sehingga bagi UPT yang sempat mengalokasi anggaran kegiatan untuk operasional KPHK dengan sangat terpaksa di *saving* untuk memenuhi kebutuhan penghamatan dimaksud.

Atas permasalahan yang ada, solusi yang dilakukan antara lain:

- a. Direktorat KK telah menyusun Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor :P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional KPHK. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pengelola kawasan konservasi untuk mengelola kawasannya sebagai KPHK. Operasionalisasi KPHK merupakan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dilaksanakan secara efisien dengan memenuhi persyaratan mutlak, utama dan pendukung dalam mencapai tujuan kelestarian keanekaragaman hayati. KPHK dinyatakan operasional apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu mutlak, utama dan pendukung.
- b. Telah dilakukan sosialisasi terhadap Perdirjen KSDAE Nomor: P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 kepada UPT yang mengelola kawasannya sebagai KPHK.
- c. Koordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan terkait percepatan terhadap penetapan unit KPHK dalam bentuk rapat pembahasan dan persuratan.





Gambar 49. Sarana Prasarana Pendukung Operasional KPHK





Indikator Kinerja Sasaran 7 :
Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 2% dari baseline data tahun 2013

Pada tahun 2016, Direktorat KKH telah menyusun dan menyempurnakan Roadmap Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Terancam Punah yang salah satu isinya terkait dengan Metode Pemantauan Populasi untuk setiap spesies. Daftar 25 satwa terancam punah prioritas yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK. 180/IV-KKH/2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 38. Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas

No	Satwa	No	Satwa	No	Satwa
1	Harimau Sumatera	10	Maleo	18	Surili
2	Gajah Sumatera	11	Babi Rusa	19	Tarsius
3	Badak	12	Anoa	20	Monyet Hitam Sulawesi
4	Banteng	13	Elang	21	Julang sumba
5	Owa	14	Kakatua	22	Nuri Kepala Hitam
6	Orangutan	15	Macan Tutul Jawa	23	Penyu
7	Bekantan	16	Rusa Bawean	24	Kanguru Pohon
8	Komodo	17	Cendrawasih	25	Celepek Rinjani
9	Jalak Bali				

Sumber : Direktorat KKH, 2015

Untuk tahun 2016 data hasil monitoring populasi dari 272 site monitoring yang ada, laporan yang masuk sebanyak 115 site atau 42,28%. Sebagian besar UPT yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatannya dikarenakan adanya penghematan anggaran kegiatan. Sebagian besar anggaran untuk kegiatan monitoring spesies sebagian besar bersumber dari PNBP dan dilaksanakan di akhir tahun anggaran dengan adanya kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun 2016, rata rata peningkatan populasi 25 satwa prioritas terancam punah sebesar **30,84%**, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2015 peningkatan populasi satwa terancam punah sebesar **26,89%**, sehingga meningkat sebesar **3,95%**, jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu **2%**, maka capaian kerjanya adalah sebesar **197,5%**. Karena capaian melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi **150%**. Daftar data peningkatan populasi spesies disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Data Peningkatan Populasi 25 Satwa Terancam Punah

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
1	Harimau Sumatera	Tambling	28	32	4	14,29
2		Pegunungan Bendahara (Kabupaten Aceh Tenggara dan Langkat) luas 68.880 Ha	5	5	0	0,00
3		TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara	8	7	-1	-12,50
4		TB Semidang Bukit Kabut	12	3	-9	-75,00
5		Hamparan HL Raja Mandara, Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur	2	5	3	150,00
6		CA Danau tes	1	1	0	0,00
7		TN Berbak	15	19	4	26,67
8	Gajah Sumatera	Way Haru - Way Canguk	21	22	1	4,76
9		Sikundur (Kabupaten Langkat)	23	23	0	0,00
10		TWA Seblat (eks HPKH PLG seblat) kabupaten Bengkulu Utara	71	30	-41	-57,75





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)	
11	Badak	Tenumbang - Way Krui - Liwa	12	11	-1	-8,33	
12		Lembah Mamas (Kabupaten Aceh Tenggara)	7	12	5	71,43	
13	Banteng	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi)	22	18	-4	-18,18	
14		Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember	20	2	-18	-90,00	
15		Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kaloloro dan Blok Kaliganteng	5	2	-3	-60,00	
16		Blok Bekol, Bama dan sekitarnya (resort Bama SPTN I Bekol); Blok Palongan, Semiang, Dungbiru dan sekitarnya (resort Perengan, SPTN I Bekol); Blok Panjaitan, Curah Tangis dan sekitarnya (resort Bitakol, SPTN Wilayah II karangtekok)	33	45	12	36,36	
17		Feeding ground sadengan	117	114	-3	-2,56	
18		Blok Lodadi, Manung dan sekitarnya (Resort Bandealit, SPTN II ambulu)	43	43	0	0,00	
19		Blok 90an, Blok 60an, Blok Pantai dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I sarongan)	17	19	2	11,76	
20		Tj Layar, Cidaon, Nyiur, Nyawaan, Citelang, Cigenter, Ciermokla, Cikalajetan, Karang Ranjang, Cibandawoh, Cikeusik, Citadahan dan Cibunar; Luas 38.000 Ha	124	70	-54	-43,55	
21		Owa	CA gunung Tilu	31	40	9	29,03
22			CA Burangrang	8	9	1	12,50
23	CA Luwung Sancang		19	22	3	15,79	
24	Cikaniki		26	27	1	3,85	
25	Ciptarasa-Ciptagelar		20	23	3	15,00	
26	G. Luhur		15	18	3	20,00	
27	Stasiun riset cabang panti		21	26	5	23,81	
28	Orangutan	Site Buluh, SM Sungai lamandau	192	98	-94	-48,96	
29		Site Teringin, SM Sungai lamandau	21	28	7	33,33	
30		Site Tuanan, KPHL Model Kapuas	22	23	1	4,55	
31		Sangkima	341	923	582	170,67	
32		Mentoko	188	882	694	369,15	
33		Menamang	280	409	129	46,07	
34		Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga Pinoh)	25	10	-15	-60,00	
35		Suaq Balimbing (kabupaten aceh selatan)	21	22	1	4,76	
36		Stasiun riset Cabang Panti	63	56	-7	-11,11	
37	Bekantan	TWA P. Bakut	30	61	31	103,33	
38		TWA P. Kembang	21	30	9	42,86	
39		SM P. Kaget	74	73	-1	-1,35	
40		Handil Bahagia, mercu suar, SM Kuala Lupak	170	158	-12	-7,06	
41		Sungai Batu Barat-Matan	455	468	13	2,86	
42		Sungai Pari, Teluk Lombok	16	17	1	6,25	
43		Sungai Sanggata	24	87	63	262,50	
44		Sungai Teluk Pandan, sungai selimpus dan sungai kanduung	22	27	5	22,73	
45		S. Sangkima - S. Padang	25	9	-16	-64,00	
46	Komodo	Pulau Komodo	2919	2100	-819	-28,06	





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
47	Jalak Bali	Lampu Merah/ Segara Rupek	22	6	-16	-72,73
48		Teluk Brumbun	7	26	19	271,43
49		Tanjung Gelap	9	12	3	33,33
50	Maleo	Saluki (BPTNW I Saluki)	499	828	329	65,93
51		SM Bangkiriang, Kabupaten Banggai (luas 0.009 Ha)	22	0	-22	-100,00
52		SM Pinjan Tanjung Matop, Kabupaten Tolitoli	36	0	-36	-100,00
53	Babi Rusa	Lindu (Tumavu)	13	22	9	69,23
54		CA Gunung Tinombala, Kabupaten Parigi moutong, kabupaten tolitoli, kabupaten buol (luas 80 Ha)	55	55	0	0,00
55	Anoa	Site Pongko, cagar alam Faruhumpenai	162	97	-65	-40,12
56		Site Balabba, cagar alam Faruhumpenai	32	31	-1	-3,13
57	Elang	CA Telaga Warna	9	13	4	44,44
58		CA/TWA Kamojang	2	8	6	300,00
59		CA/TWA Tangkuban Parahu	3	5	2	66,67
60		Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi	3	6	3	100,00
61		Cikaniki	8	9	1	12,50
62		Blok Cilengkrang (5,29 ha) dan blok awilwga (3,12 Ha), Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	7	9	2	28,57
63		Plawangan-Turgo	2	6	4	200,00
64		Tegal Mulyo	1	0	-1	-100,00
65		Senaru (130 Ha), Torean (130 Ha), Sembalun (130 Ha), Sajang (130 Ha)	3	9	6	200,00
66		Pos Moin (96,5 Ha), Waturaka (210 Ha), Wolojita (193 Ha) SPTN Wilayah I Moni	2	5	3	150,00
67	Wolokoro (29,5 Ha), Okisobe (70 Ha) SPTN wilayah II Detusoko	2	1	-1	-50,00	
68	Kakatua	Pulau Masakambing, Kab. Sumenep	23	23	0	0,00
69		Ai Manis	32	36	4	12,50
70		Brang Sedo	73	78	5	6,85
71		Brang Singa	32	34	2	6,25
72		Pulau Komodo	524	522	-2	-0,38
73		Pulau Rinca	40	52	12	30,00
74		Pulau Bero	82	108	26	31,71
75		Ubukora	6	11	5	83,33
76		Lokuwatungodu	8	2	-6	-75,00
77		Lokuhuma	11	10	-1	-9,09
78		Kokur	17	14	-3	-17,65
79		Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I)	4	10	6	150,00
80		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II)	6	5	-1	-16,67
81		Billa	17	18	1	5,88
82		Praingkareha	10	14	4	40,00
83		Mahaniwa	9	17	8	88,89





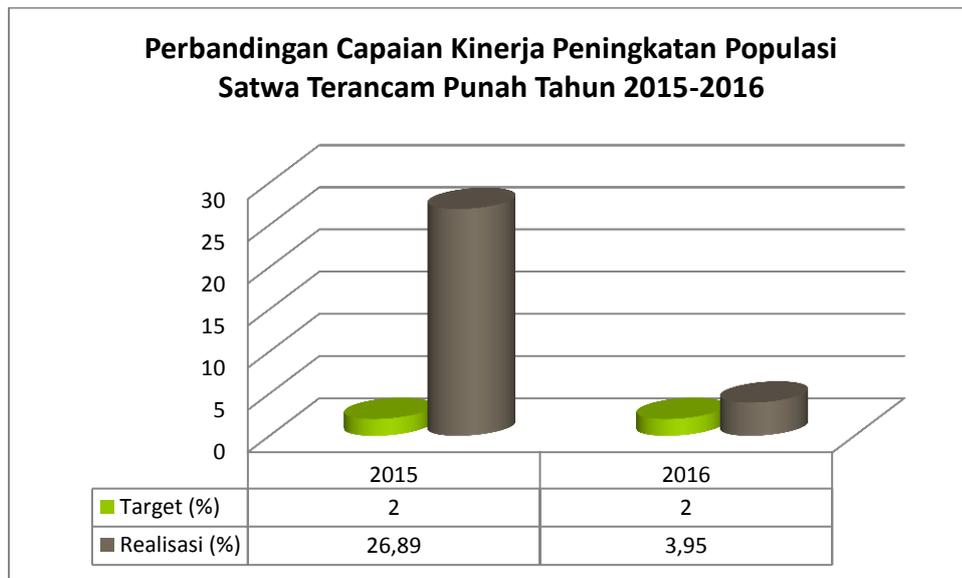
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2016 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2016 (%)
84	Macan Tutul Jawa	Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	1	3	2	200,00
85		Cikaniki	3	4	1	33,33
86		Gunung Luhur (luas 975.5)	3	3	0	0,00
87		Wates Cisoka (luas 271.6)	2	3	1	50,00
88	Rusa Bawean	Blok Gunung Nangka (CA Pulau Bawean); blok Kumasala, Blok gunung batu, Blok Gunung Besar, Blok Tanah Poteh (SM Pulau Bawean)	275	303	28	10,18
89	Cendrawasih	Dusun Samleber	0	0	0	0,00
90		Dusun Tabutar	0	0	0	0,00
91		Dusun Yakyu	0	0	0	0,00
92		Dusun Samleber	0	1	1	0,00
93		Dusun Tabutar	0	15	15	0,00
94		Baraway	16	20	4	25,00
95		Amay	9	10	1	11,11
96	Surili	Blok Sikendi (Jalur Pendakian Wekas)	10	11	1	10,00
97		Blok Pandean (Jalur pendakian Selo)	5	0	-5	-100,00
98		Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha	169	103	-66	-39,05
99	Tarsius	Sungai Pattanuang, luas 86,75 Ha	82	90	8	9,76
100	Monyet Hitam Sulawesi	Karaenta (kelompok), luas 29,27 Ha	31	35	4	12,90
101	Julang sumba	Billa	10	16	6	60,00
102		Ubukora	12	3	-9	-75,00
103		Taman Mas (Maloba)	3	2	-1	-33,33
104		Wacutidung	3	7	4	133,33
105		Lokuhuma	2	4	2	100,00
106	Nuri kepala Hitam	Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I)	4	3	-1	-25,00
107		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II)	4	6	2	50,00
108	Penyu	SPTN Wilayah I Tarupa	135	2	-133	-98,52
109		Pulau Wairundi	6	10	4	66,67
110		Pantai Sukamade (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan)	280	223	-57	-20,36
111		Pulau Peteloran Barat	1.819	907	-912	-50,14
112		Pulau Peteloran Timur	2.272	1628	-644	-28,35
113		seluruh pulau di kawasan TN Karimunjawa	42	64	22	52,38
114		Kanguru Pohon	Sugapa, Kabupaten Intan jaya	10	10	0
115	Celepuk Rinjani	Senaru kembang Kuning	27	260	233	862,96
Rata-rata						30,84

Sumber: Direktorat KKH, 3 Februari 2017



Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 50. Perbandingan Capaian Kinerja Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah Tahun 2015-2016

Upaya peningkatan populasi spesies di site monitoring tidak hanya dilihat dari adanya penambahan individu baru akan tetapi harus didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan. Sesuai dengan SK Dirjen KSDAE Nomor: 180/IV-KKH/2015, terdapat 6 kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. inventarisasi/monitoring populasi (jumlah individu, jumlah sarang, jumlah kelahiran, jumlah kematian)
- b. Pembinaan habitat (ha atau unit)
- c. Penyadartahuan (jumlah kegiatan/thn/UPT)
- d. Perlindungan dan Pengamanan (km.hari/orang) dan (jumlah laporan kegiatan ilegal)
- e. Penanggulangan Konflik (individu-persentase jumlah korban menurun)
- f. Penyelamatan, Rehabilitasi, dan Pelepasliaran (individu-jumlah individu yang diselamatkan atau yang dilepaliarkan).

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu di dalam suatu populasi karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk berkembangbiak. Badak betina memerlukan waktu hampir 3 tahun sebelum bisa bereproduksi lagi termasuk waktu bunting selama 15-16 bulan, waktu bunting gajah yaitu 18-22 bulan sementara untuk orangutan 9-11 bulan. Oleh karena itu, penghitungan kenaikan populasi sebaiknya dihitung pada awal tahun renstra (sebagai baseline) dan akhir tahun renstra (2019) mengingat biologi reproduksi tiap satwa berbeda.



Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja adalah Peningkatan Populasi 25 satwa terancam punah prioritas sesuai dengan The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 2%.



Gambar 51. Kakatua Kecil Jambul Kuning yang Termonitor di Site Ai Manis



Gambar 52. Kakatua Kecil Jambul Kuning yang termonitor di Site Brang Singa



Gambar 53. Monitoring Populasi Orangutan



Gambar 54. Monitoring Populasi Monyet Hitam Sulawesi



Gambar 55. Monitoring Populasi Tarsius





Indikator Kinerja Sasaran 8 :

Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 13 unit

Perlindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) ditujukan bagi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk memelihara proses ekologis penting yang menunjang kelangsungan kehidupan, mengawetkan keanekaragaman genetik, serta pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya. Upaya perlindungan KEE dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan menjamin terlindunginya KEE serta terkelolanya KEE sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut, mencakup: (1) pembentukan kelembagaan perlindungan KEE, (2) pengelolaan KEE berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi, (3) pemanfaatan KEE secara berkelanjutan dan (4) monitoring dan evaluasi perlindungan KEE.

Pembentukan kelembagaan KEE dimulai dengan pembentukan forum kolaborasi dukungan perlindungan KEE yang bertujuan menghimpun para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan suatu KEE. Para pihak tersebut mencakup Pemda setempat (tingkat provinsi/kabupaten/kota), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun pihak-pihak terkait lainnya. Forum ini akan menjadi wadah diskusi serta penyusunan konsep usulan penetapan KEE dan pengelola KEE yang akan diajukan kepada kepala daerah.

Pengelola KEE bertanggung jawab melaksanakan perlindungan KEE baik dengan melaksanakannya sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak lainnya. Pengelola KEE wajib menyiapkan dokumen perencanaan, menjamin pendanaan perlindungan KEE, pelaksanaan pengelolaan KEE, serta pelaporan hasil perlindungan KEE.

Pemanfaatan KEE dilaksanakan apabila pengelolaan KEE telah mantap baik secara struktur, penganggaran dan mekanisme pengelolaannya. Hal ini penting agar kegiatan pemanfaatan tidak membebani keseluruhan upaya pengelolaan KEE bila pengelolaan KEE belum mencapai tahap mantap.

Monitoring dan evaluasi perlindungan KEE adalah upaya konsisten untuk menjaga mutu dan rangkaian pengelolaan KEE agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan oleh Dit BPEE, UPT KSDA serta forum kolaborasi untuk dilaporkan kepada pimpinan masing-masing sesuai jenjang pelaporan yang berlaku. Dit BPEE akan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi ini untuk menyusun NSPK baru, merevisi NSPK yang ada, menyusun/menyesuaikan arahan perlindungan KEE, merevisi peta indikatif KEE dan menetapkan peta definitif KEE.

Berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dan Renstra Dit BPEE Tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan target jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 13 unit. Hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 memperoleh capaian jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak **8 kawasan ekosistem esensial**, meliputi kawasan taman kehati, kawasan koridor, serta kawasan mangrove. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (13 unit), maka capaian kinerja untuk tahun 2016 (8 unit) adalah **61,54%**. Secara kumulatif,

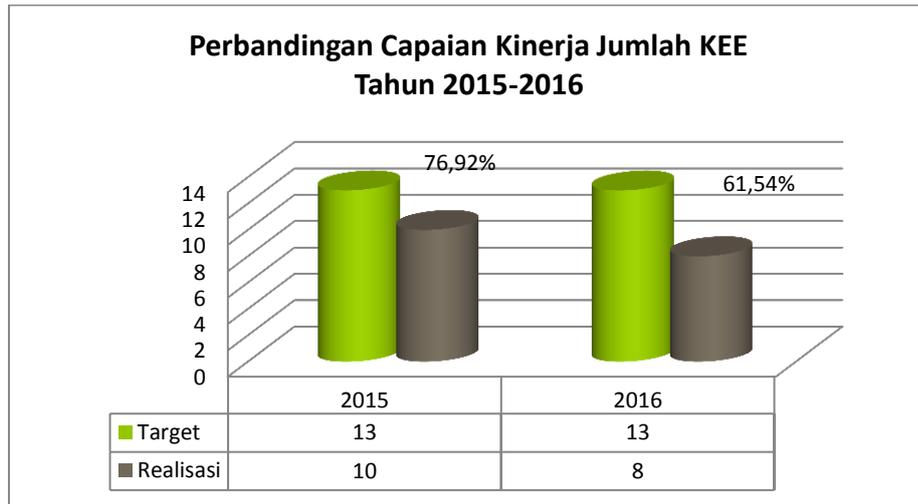




dibandingkan dengan target 5 tahun (48 unit), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015 (10 unit) dan 2016 (8 unit) dengan total sebanyak 18 unit adalah **37,50%**.

Tabel 40. Capaian IKK Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 13 unit	13 unit	8 unit	61,54%



Gambar 56. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah KEE Tahun 2015-2016

Delapan kawasan ekosistem esensial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Taman Kehati Pelawan (Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Pembangunan Taman Kehati Hutan Pelawan didorong kesadaran masyarakat lokal yang ingin melindungi kawasannya sebagai sumber mata pencaharian, sehingga pada tahun 2015 dibentuklah tim Pengelola Taman Kehati Hutan Pelawan ini melalui SK Bupati Bangka Tengah Nomor 185.45/347/BLH/2015, dimana semua anggota tim pengelola merupakan anggota masyarakat. Mengingat pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam hal pengelolaan Keanekaragaman hayati ini, maka SK Bupati Bangka Tengah tahun 2015 diperbaharui melalui **Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/635/BLH/2016** tanggal 30 September 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Adapun tim pengelola tersebut berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dibantu oleh:

- Unsur Bappeda
- Dinas Pendidikan
- Dinas Pertanian dan Peternakan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Kepala Desa Namang
- Masyarakat lokal
- Kelompok peduli lingkungan





Gambar 57. Fasilitas di Taman Kehati Pelawan

2. Taman Kehati Kokolomboi (Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)

Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 912 tahun 2016** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan. Pengelola Taman Kehati Kokolomboi ini berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dan melibatkan:

- Bappeda kabupaten Banggai Kepulauan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala Desa Leme-Leme
- Kelompok Adat Togong Tanga
- Kelompok Masyarakat Lokal

Taman Kehati Kokolomboi ini masih mengalami beberapa kendala dalam program pengembangan Taman Kehati, diantaranya restrukturisasi organisasi sebagai konsekuensi UU Nomor: 23 Tahun 2014 dan PP Nomor: 18 Tahun 2016 serta Per MenLHK Nomor: P.74 tahun 2016 perihal Perangkat Daerah, sehingga belum memiliki DED (*Detail Engineering Design*).



Gambar 58. Jalan Setapak di Taman Kehati Kokolomboi

3. Taman Kehati Bedegung (Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)

Taman Kehati Bedegung Kabupaten Muara Enim ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 903/KPTS/BLH/2016** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Bedegung Kabupaten Muara Enim tanggal 14 November 2016. Penyusunan DED dan pembangunan Taman Kehati ini dibantu oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Pada bulan Mei 2016 telah dilakukan serah terima pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Pengelolaan Taman Kehati ini dilakukan secara kolaboratif dengan



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim karena lokasi Taman Kehati berada di Kawasan Wisata Air Terjun Bedegung, dan dibantu pula oleh instansi-instansi lainnya, yaitu:

- Bappeda Kabupaten Muara Enim
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Perkebunan
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Perguruan Tinggi
- Kepala Desa Bedegung
- Kelompok Tani Masyarakat
- Forum CSR Kabupaten Muara Enim



Gambar 59. Taman Bedegung, Kab. Muara Enim

4. Taman Kehati Universitas Tadulako (Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah)

Taman Kehati Universitas Tadulako kota Palu ditetapkan melalui **Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 2945/UN28/KP/2016** tentang Pengangkatan Pengurus Taman Tim Pengurus Taman Kehati terdiri dari dosen-dosen dalam lingkup Universitas Tadulako, dengan Rektor sebagai pengarah Taman Kehati. Pada saat ini, areal yg akan dibangun menjadi Taman Kehati sudah ada, namun belum ada pembangunan fisik yang telah dilakukan. Beberapa batang pohon yang akan dimasukkan ke dalam Taman Kehati sudah diletakkan di beberapa spot di sekitar Fakultas FMIPA UNTAD berupa kebun botani. Beberapa jenis tumbuhan tersebut adalah Kayu hitam (*Diospyros celebica* Bakh.), Mangga dodol (*Mangifera minor*), serta tumbuhan yang punya kepentingan konservasi dan khas daerah seperti Cendana (*Santalum album*), dan Tapak dara (*Harrisonia perforate*).

5. Kawasan Mangrove Desa Mojo Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang pada saat periode 1990–1997 mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat dari pembukaan lahan mangrove untuk perluasan tambak udang windu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1999, masyarakat mulai menyadari peran dan manfaat mangrove bagi lingkungan. Masyarakat bersama instansi daerah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang rusak tersebut secara rutin, salah satunya melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan tanah timbul seluas 14,5 Ha.

Kawasan Mangrove Desa Mojo diusulkan menjadi KEE oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang karena adanya hutan mangrove pada hamparan (tanah timbul) dengan kondisi tumbuhan masih bagus berusia sekitar 5 tahun. Dalam rencana pengembangannya, kawasan hutan mangrove tersebut akan dipertahankan dan dijadikan sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna, tempat sumber benih kepiting, tempat sumber benih tanaman dan tempat tujuan wisata dan edukasi dengan tetap menjaga keasliannya. Berdasarkan hasil identifikasi BKSDA Jawa Tengah tahun 2013, kawasan mangrove ini dinilai layak untuk dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial.





Gambar 60. Mangrove di Desa Mojo Kabupaten Pemalang

Tahapan usulan pembentukan KEE Mangrove Desa Mojo yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan hasil survey ekosistem esensial kawasan mangrove Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Tengah;
- b. Rapat Koordinasi Pengembangan Jasa Lingkungan tanggal 27 Januari 2016. Pada kesempatan tersebut usulan terhadap pembentukan KEE mangrove Desa Mojo disampaikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan KEE Di Provinsi Jawa Tengah) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang (Pengelolaan hutan mangrove di Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang sebagai kawasan ekosistem esensial);
- c. Rapat dalam rangka usulan penetapan kawasan ekosistem esensial Desa Mojo Kec. Ulujami Kab. Pemalang dan persiapan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan ekosistem esensial tahun 2017 tanggal 18 Agustus yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bupati Pemalang telah menerbitkan SK Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Nomor: 1884/660/2016 tahun 2016.

6. Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea – Kelay

Kelembagaan koridor hidupan liar berupa Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 308,882 ha, ditetapkan melalui **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.214/2016** pada tanggal 6 April 2016, dengan *leading sector* (ketua) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Kawasan ekosistem esensial koridor Orangutan di bentang alam Wehea-Kelay yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu habitat terpenting bagi populasi Orangutan di Provinsi Kalimantan Timur. Diperkirakan populasi Orangutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelay, yang juga termasuk bentang alam Wehea, berjumlah \pm 2.500 individu.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan





dengan pola pengelolaan kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), Provinsi Kalimantan Timur dan *The Nature Conservancy* (TNC) sejak tahun 2015. Komunikasi secara intensif antar *stakeholder* terkait telah dilakukan untuk membangun kerjasama pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di kawasan bentang alam Wehea-Kelay. Pada tanggal 17 April 2015, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay oleh *stakeholder* terkait yaitu BKSDA Kalimantan Timur, BLH Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Perusahaan, Lembaga Adat Wehea dan TNC.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK membentuk kelompok kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar pada tanggal 21 April 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Jendral KSDAE Nomor: 122/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016. Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Wehea Kelay dicanangkan pada Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2016 yang diselenggarakan di TN Bali Barat pada tanggal 10 Agustus 2016.



Gambar 61. Penyerahan Dokumen KEE Wehea-Kelay ke Dirjen KSDAE Kementerian LHK



Gambar 62. Dokumen Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay

7. Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat

Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat bersama-sama dengan BKSDA Nusa Tenggara Barat dan pelaku usaha sector wisata dan masyarakat pelestari penyu di Kabupaten Lombok Barat. Para pihak ini kemudian disatukan dalam suatu wadah berupa forum *stakeholder* yang bertujuan mendukung upaya konservasi Penyu di Kabupaten Lombok Barat melalui **Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 807/06/BLH/2016** tanggal 15 September 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu Kabupaten Lombok Barat. Pada tanggal 4 Oktober 2016, BLH Kabupaten Lombok Barat mengadakan sosialisasi tentang keberadaan Forum tersebut dan mengusulkan kawasan ekosistem esensial berupa koridor penyu di Kabupaten Lombok Barat. Lokasi KEE Koridor Penyu di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan habitat peneluran penyu adalah di Pantai Kuranji yang merupakan habitat peneluran penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*), di Pantai Kerandangan yang merupakan habitat peneluran Penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae*) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan di Pantai Gili Nanggu yang merupakan habitat peneluran Penyu Sisik (*Eretmochelys*





imbricata). Penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial berupa koridor satwa penyu di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan guna mendukung upaya pengelolaan konservasi penyu dan pengembangan jasa lingkungan (ekowisata berbasis penyu).

Pada tanggal 22-25 November 2016, Direktorat BPEE melakukan fasilitasi Penetapan KEE Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk penyusunan konsep SK Penetapan KEE, yang saat ini telah diajukan kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk ditandatangani.

8. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Direktorat BPEE telah melakukan koordinasi awal kepada Dinas Kehutanan dan BLH Kabupaten Ciamis untuk inisiasi pembentukan kelembagaan KEE ABKT di Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis telah menetapkan 10 desa konservasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 522/KPTS.679-HUK/2016 tentang penunjukan tempat-tempat tertentu sebagai kawasan konservasi ekosistem esensial Kabupaten Ciamis. Adapun ke-10 desa tersebut adalah Wanasigra, Ciomas, Bahara, Sadewata, Pagerbumi, Bunter, Payung Agung, Sagalaherang, Karangpaninggal, dan Kawali. Pada lokasi-lokasi tersebut terindikasi keberadaan satwa Macan tutul jawa (*Panthera pardus*) dan Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) serta beberapa situs budaya yang dikeramatkan. Bupati Kabupaten Ciamis juga telah menetapkan pembentukan forum kolaborasi pengelolaan KEE ABKT di Kabupaten Ciamis berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 522/KPTS.694-HUK/2016**.



Gambar 63. Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa target lokasi yang telah dimulai proses pembentukannya namun terkendala penyelesaiannya hingga akhir tahun 2016 disebabkan oleh beberapa hal. Kendala dimaksud antara lain:

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai konsekuensi atas berlakunya UU 23 Tahun 2014 dan turunannya (PP 18 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor: P.74 Tahun 2016)

Sebagai konsekuensi atas terbitnya UU Nomor: 23 Tahun 2014 serta peraturan turunannya, maka terjadi peleburan OPD sektor kehutanan dari tingkat Kabupaten ke tingkat sektor provinsi. Peleburan ini berkonsekuensi pada pengalihan kewenangan terkait sektor kehutanan, termasuk pengelolaan ekosistem esensial, dari kabupaten ke provinsi. Akibatnya,





pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektor kehutanan khususnya pada akhir tahun 2016 mengalami pelambatan/penundaan menunggu selesainya proses penataan OPD yang baru. Beberapa lokasi target pembentukan kelembagaan KEE yang tertunda penyelesaiannya akibat penataan perangkat daerah ini adalah :

- Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang (Jawa Tengah)
- Mangrove Torosiaje Kabupaten Pohuwato (Gorontalo)
- Koridor Orangutan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat)

2. Adanya proses penerbitan Peraturan Daerah/Kepala Daerah terkait pengelolaan ekosistem esensial

Kawasan Karst Gunung Sewu (DIY) yang semula akan ditetapkan sebagai ekosistem esensial belum dapat diproses lebih lanjut menunggu terbitnya Peraturan Gubernur DIY tentang penetapan KEE DIY. Peraturan ini akan menunjuk dan menetapkan kawasan-kawasan KEE lingkup DIY, baik yang merupakan lahan basah (mangrove, karst), koridor satwaliar maupun taman kehati, sebagai dasar perlindungan KEE di DIY.

3. Adanya proses pembahasan kerja sama antara para pihak terkait pengelolaan KEE

Taman Kehati PT. Pupuk Kujang Kabupaten Karawang (Jawa Barat) belum dapat dibentuk kelembagaannya, karena belum ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu BLH Kabupaten Karawang dan PT Pupuk Kujang.

4. Belum adanya kesepakatan mengenai luas taman kehati yang akan dibentuk oleh pihak swasta

Kelembagaan Taman Kehati PT Tirta Investama (± 10 ha) dan Taman Kehati PT Aqua Golden Mississippi (± 5 ha) Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat) sudah terbentuk, namun dalam prosesnya belum melibatkan Pemda. Selain itu, masih ada masalah internal perusahaan terkait kepastian luasan taman kehati, mengingat sebagian lahan yang ditunjuk sebagai KEE masih mungkin dikelola kembali oleh perusahaan untuk tujuan bisnis, sehingga dapat mengurangi luasan KEE yang tersedia.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan kelembagaan KEE dan berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pertemuan para pihak terkait pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Mojo (Kabupaten Pemalang) telah dilakukan beberapa kali, baik yang difasilitasi oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah maupun Pemda Kabupaten Pemalang. Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan kesepakatan para pihak untuk melakukan perlindungan ekosistem Mangrove Mojo melalui penetapannya sebagai KEE. Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten Pemalang juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembentukan kelembagaan KEE ini. Penyelesaian pembentukan kelembagaan KEE Mangrove Mojo terkendala, karena adanya proses penataan OPD (walaupun konsep kelembagaan telah diajukan kepada Bupati Pemalang) dan diharapkan dapat dilanjutkan kembali pada awal tahun 2017.
2. Penyusunan peta indikasi KEE dengan mengacu pada dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Indonesia (2010) dan data-data yang diperoleh dari internal Kementerian LHK, UPT KSDA, Kementerian dan Lembaga terkait (Kementerian ATR/BPN, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR), LSM, dan Pemerintah Daerah. Peta indikatif ini disusun oleh Dit BPEE dan akan dipakai oleh UPT KSDA, Pemda dan para pihak terkait lainnya sebagai acuan dalam perlindungan KEE dengan melakukan survei calon KEE





dan penetapan KEE pada lokasi-lokasi yang diindikasikan sebagai ekosistem penting atau ekosistem penghubung. Peta ini perlu di-*overlay* dengan peta-peta sebaran satwaliar dan tumbuhan liar endemik/langka/dilindungi, HGU perkebunan, lahan pertanian berkelanjutan, wilayah pertambangan serta peta-peta pemanfaatan lahan lainnya sehingga diperoleh indikasi jelas mengenai lokasi-lokasi yang layak ditetapkan sesuai kriteria yang ada sebagai KEE.

3. Pelaksanaan monitoring dan pengkayaan data/informasi taman keanekaragaman hayati di 10 lokasi guna koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini penting mengingat Taman Kehati dibangun oleh Pemda sehingga peran sentral pengelolaan Taman Kehati berada pada pemda setempat (OPD atau UPTD).
4. Dukungan pihak swasta untuk mendukung taman keanekaragaman hayati terkait pelaksanaan PROPER. Kontribusi swasta penting untuk didorong lebih lanjut mengingat sejumlah populasi keanekaragaman hayati yang endemik/langka/dilindungi berada di dalam wilayah kerja/HGU swasta. Perlu dibangun mekanisme kerja sama dan kolaborasi antara Pemda setempat dengan swasta melalui fasilitasi/koordinasi oleh UPT KSDA.
5. Rapat penyempurnaan/Finalisasi NSPK Pengelolaan Ekosistem Esensial Karst sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dan April 2016. Kegiatan ini berupa pembahasan draft rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan KEE Karst.
6. Lokakarya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Hotel Peninsula. Lokakarya ini menghimpun para pihak terkait pengelolaan Taman Kehati dan dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan, kesepakatan, dan dukungan pengelolaan kehati di tingkat daerah melalui pembentukan Taman Kehati.
7. Inventarisasi dan pengkayaan data/informasi dalam rangka pengelolaan kawasan ekosistem karst di Kabupaten Karawang sebagai calon lokasi KEE Karst dan melakukan konsultasi dengan pakar Hidrologi Karst Indonesia Universitas Gajah Mada (Tjahyo Nugroho Adji) terkait pengelolaan karst di Yogyakarta.
8. Rapat penyusunan kebijakan pengelolaan ekosistem karst berupa pembahasan penataan pengelolaan kawasan karst yang dilaksanakan pada bulan Februari 2016 di Jakarta.

Pencapaian kinerja Dit BPEE pada tahun 2016 diharapkan menghasilkan beberapa *outcome* yang bermanfaat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) melalui:

1. Tumbuhnya dukungan dan kontribusi nyata para pihak, utamanya Pemda dan pihak swasta, dalam upaya KSDAHE di tingkat daerah, khususnya pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi namun berada di luar jaringan kawasan konservasi (KSA dan KPA).
2. Tersedianya sumber daya alternatif diluar anggaran pemerintah (APBN) untuk melaksanakan kegiatan perlindungan KEE, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah saat ini.
3. Meluasnya informasi mengenai perlindungan KEE sebagai upaya melindungi kawasan-kawasan penting yang memiliki nilai konservasi tinggi atau nilai budaya tinggi.
4. Tersedianya data dan informasi mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di luar KK sebagai kontribusi atas upaya konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional,





regional dan global (misalnya capaian Renstra Kementerian LHK, capaian *Millenium Development Goals/Sustainable Development Goals*).

5. Tersedianya lokasi alternatif wisata alam, khususnya pada Taman Kehati, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat dan menjadi sumber pendapatan APBD melalui retribusi Pemda.
6. Mendukung target nasional untuk peningkatan populasi konservasi jenis-jenis keanekaragaman hayati yang endemik/langka/dilindungi, khususnya 25 jenis prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah.
7. Memberikan kontribusi terbentuknya jaringan ekosistem alami pada alur migrasi jenis-jenis satwa liar migran (misalnya jenis-jenis burung migran dari, jenis-jenis *cetacean* serta penyu laut).





Indikator Kinerja Sasaran 9 :

Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)

Berdasarkan PP Nomor: 8 Tahun 1999 telah diatur pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dengan prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Pemanfaatan TSL berasal dari habitat alam di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru) dan hasil penangkaran yang bersumber dari informasi ilmiah terkait kondisi habitat dan populasi jenis yang ditetapkan.

Tumbuhan dan satwa liar diatas berasal dari habitat alam di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru) dan hasil penangkaran yang bersumber dari informasi ilmiah terkait kondisi habitat dan populasi jenis yang ditetapkan serta realisasi pengambilan dan penangkapan TSL tahun sebelumnya sebagai alat kontrol pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) sehingga tidak melebihi kemampuan pertambahan populasi pada setiap jenisnya dan tercipta tertib peredaran guna menunjang kelestarian populasi di alam. Kegiatan penyusunan kuota melibatkan LIPI sebagai *scientific authority*, dan BKSDA/KSDA.

Selain kegiatan kuota, KLHK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya BLH Provinsi untuk kegiatan penyusunan Profil Kehati Daerah. KLHK melakukan supervisi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi ketersediaan informasi dengan menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah yang berisi potensi, kondisi dan status keanekaragaman hayati di daerah. Profil Keanekaragaman Hayati Daerah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah dan pemanfaatannya.

Dalam upaya memenuhi ketersediaan data dan informasi, Subdit SDG melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2016 adalah pelaksanaan koordinasi dilakukan di beberapa wilayah Sumatera, yaitu BKSDA Sumatera Utara, BKSDA Sumatera Selatan dan BKSDA Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah akan potensi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi data kekayaan keanekaragaman hayati.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan kuota maka perlu dilaksanakan kegiatan pendukung berupa bimbingan teknis penyusunan kuota dan melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik.

Bimbingan teknis penyusunan kuota dilakukan sebagai upaya meminimalisir permasalahan prosedur pengusulan Kuota sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan sehingga pelaksanaan pengusulan kuota lebih efisien dan efektif. Bimbingan teknis diberikan kepada setiap UPT di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan pengetahuan dalam memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar sesuai ketersediaan alam dan rekomendasi LIPI.

Selain itu, dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya





pemanfaatan sumber daya genetik, tahun 2016 dilakukan koordinasi di beberapa provinsi wilayah Sumatera yaitu Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara.

Hasil koordinasi diketahui bahwa Propinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2015, namun belum memiliki Profil Kehati Daerah dan Rencana Induk Pengelolaan sesuai mandat Permen LH Nomor: 29 Tahun 2009. Dalam laporan SLHD 2015, informasi mengenai gambaran keadaan umum daerah untuk penyusunan Profil sudah ada, sedangkan data dan informasi mengenai kebijakan dan kelembagaan pengelolaan kehati belum ada, sehingga perlu lebih melibatkan SKPD, UPT, dan pakar terkait keanekaragaman hayati untuk menyusun Profil Kehati Daerah.

Sesuai dengan target pencapaian matrik RPJMN tahun 2015-2019, jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua.

Sampai dengan tahun 2016, telah terkumpul data identifikasi potensi tanaman obat dan Profil Kehati Daerah untuk wilayah Jawa dan Kalimantan (2014), wilayah Sulawesi (2015) dan Wilayah Sumatera (2016). Yang masuk dalam periode Renstra Ditjen KSDAE (2015-2016) adalah 2 wilayah yaitu Sulawesi dan Sumatera, sehingga capaian tahun 2016 adalah **6 Ekoregion**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (7 Ekoregion), maka capaian kinerjanya adalah sebesar **85,71%**. Data capaian adalah sebagai berikut.

Tabel 41. Ketersediaan Paket Data tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jumlah ekoregion	Keterangan
1	2014	2	Ekoregion Jawa dan Kalimantan
2	2015	1	Ekoregion wilayah Sulawesi (BTN. Bantimurung, BKSDA Sulawesi Utara, BTN. Bogani Nani Wartabone
3	2016	3	Ekoregion Sumatera, Kepulauan Sunda Kecil, Papua



Gambar 64. Perbandingan Capaian Kinerja Ketersediaan Paket Data Tahun 2015-2016





Data sebaran berupa Profil Kehati Daerah dan identifikasi potensi tanaman obat yang terkumpul tahun sebelumnya yaitu data di region Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maka tahun 2016 ini data yang tersedia telah bertambah yaitu data Profil Kehati Daerah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Limapuluh, dan identifikasi tanaman obat di Taman Nasional Bukit Dua Belas, serta di ekoregion Kepulauan Sunda Kecil dan Papua. Data selengkapnya disampaikan dalam Lampiran 4.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja ketersediaan paket data, antara lain karena : pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk kegiatan identifikasi potensi tanaman obat dapat dilakukan cukup besar sehingga di 2 wilayah sekaligus yaitu Jawa dan Kalimantan, hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang tersedia. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016, alokasi anggaran kegiatan ini lebih kecil dari tahun sebelumnya sehingga kegiatan ini hanya mencakup 1 wilayah saja. Untuk menyesuaikan kegiatan dengan alokasi anggaran yang ada, maka kegiatan yang sebelumnya dikerjakan oleh pihak konsultan, sejak tahun 2015 kegiatan identifikasi dilakukan dengan melibatkan UPT.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja adalah data dan informasi yang telah dicapai untuk tahun 2016, akan menambah database keanekaragaman hayati yang akan diupload pada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG (ABS CH).

Balai Kliring ini akan memuat data dan informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik, yaitu (1) data identifikasi tanaman obat, yang saat ini sudah ada datanya untuk wilayah Jawa dan Kalimantan (2014), Sulawesi (2015) dan Sumatera (2016); (2) sistem aplikasi database kuota berbasis web, yang merupakan forum antara pemerintah, provider, dan pengguna; dan (3) Sistem perijinan online bagi peneliti, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi peneltii (akan dilaksanakan pada tahun 2017).



Gambar 65. Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat Di Demplot Pengembangan Tanaman Obat TN Dua Belas, Jambi





B. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

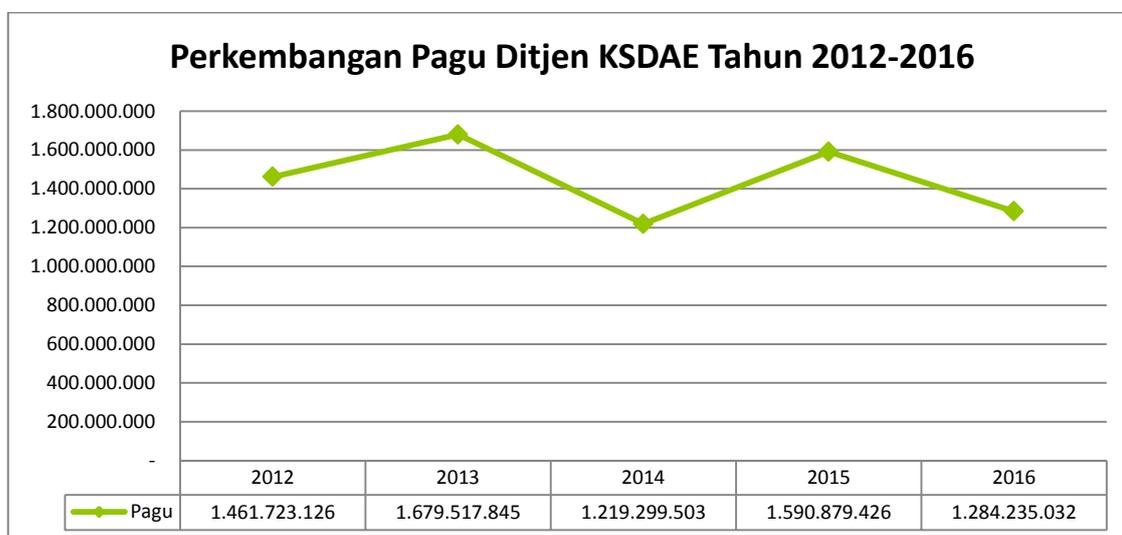
1. Pagu Anggaran 2016

Pagu anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 pada Renja Ditjen tahun 2016 merupakan pagu indikatif yaitu sebesar Rp. 1.521.710.000.000,-. Selanjutnya terdapat beberapa perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

- a. Pagu alokasi sebesar Rp. 1.317.378.000.000,-. Pengurangan pagu anggaran tersebut dikarenakan pemotongan untuk pembelian helikopter pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
- b. Revisi APBN-P melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2016 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.332/menlhk/Setjen/Set.1/7/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal Usulan Revisi RKA-KL APBN-P KLHK TA.2016, APBN Ditjen KSDAE mengalami perubahan semula Rp. 1.317.378.000.000,- menjadi Rp. 1.258.644.984.000,-.
- c. Adanya penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2, pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar Rp. 124.065.791.000,- dari pagu APBNP sebesar Rp. 1.258.644.984.000,-.
- d. Revisi pagu Ditjen KSDAE (penambahan), yaitu:
 - Hibah Langsung Luar Negeri pada Ditjen KKH sebesar Rp. 7.276.455.000,-
 - Penambahan pagu belanja pegawai dari Eselon I lain untuk menutupi belanja pegawai yang minus yaitu sebesar Rp. 18.313.593.000,-

Sehingga pagu Ditjen KSDAE tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1.284.235.032.000,-.

Kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2016 didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2015 (Rp. 1.590.879.426.000,-), mengalami penurunan sebesar 19,28%. Gambaran selengkapny perkembangan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2012-2016 (dalam ribuan) adalah sebagai berikut.



Gambar 66. Perkembangan Pagu Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016





Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 digunakan untuk membiayai satu program dan 8 kegiatan. Alokasi anggaran per kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan Tahun 2016

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	%
1	5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	62.152.214.000	4,84
2	5420 Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	10.936.551.000	2,13
3	5421 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	27.326.950.000	0,85
4	5422 Konservasi Spesies dan Genetik	18.335.053.000	1,43
5	5423 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	9.187.220.000	0,72
6	5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	7.779.138.000	0,61
7	5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.626.437.000	39,22
8	5426 Pengelolaan Taman Nasional	644.891.469.000	50,22
Jumlah		1.284.235.032.000	100

Berdasarkan data di atas, alokasi pagu anggaran terbesar adalah pada kegiatan Pengelolaan Taman Nasional (50,22%) diikuti oleh kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (39,22%), sedangkan yang terendah adalah pada kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial (0,61%). Pada kegiatan Pengelolaan Taman Nasional digunakan untuk membiayai 48 UPT Taman Nasional dan pada kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati digunakan untuk membiayai 26 UPT KSDA.

Delapan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan Satker Pusat dan UPT di daerah. Alokasi anggaran per jenis Satker adalah sebagai berikut.

Tabel 43. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Satker Tahun 2016

No	Satker	Pagu	%
A	SATKER PUSAT	135.717.126.000	10,57
1	Sekretariat Ditjen KSDAE	62.152.214.000	
2	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	10.936.551.000	
3	Direktorat Kawasan Konservasi	27.326.950.000	
4	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	18.335.053.000	
5	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	9.187.220.000	
6	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	7.779.138.000	
B	UPT	1.148.517.906.000	89,43
1	Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.442.797.000	
2	Balai Besar/ Balai Taman Nasional	644.258.189.000	
Jumlah A + B		1.284.235.032.000	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan persentase alokasi anggaran di Pusat dan daerah, yaitu lebih besar di daerah (89,43%). Akan tetapi anggaran ini digunakan untuk membiayai 74 UPT, sedangkan di pusat yaitu sebesar 10,57% dari keseluruhan pagu Ditjen KSDAE hanya untuk membiayai kegiatan pada 6 Satker pusat.

Pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.



**Tabel 44. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE 2016 Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Pagu	%
1	Belanja Pegawai	749.953.960.000	58,40
2	Belanja Barang	459.860.839.000	35,81
3	Belanja Modal	74.420.233.000	5,79
	Jumlah	1.284.235.032.000	100,00

Berdasarkan komposisi pagu anggaran 2016 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat bahwa belanja pegawai mempunyai alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya, yaitu sebesar 58,40%, terbesar kedua yaitu anggaran untuk belanja barang yaitu sebesar 35,81%, dan terendah pada belanja modal sebesar 5,79%. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai paling tinggi disebabkan jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE cukup banyak yaitu 7.133 orang. Komposisi pagu per jenis belanja Ditjen KSDAE dari tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Komposisi Pagu Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Dari Tahun 2012-2016

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Belanja Sosial (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2012	430.805.801.000	810.698.731.000	218.793.594.000	975.000.000	1.461.273.126.000
2013	444.620.275.000	879.562.737.000	355.334.833.000	-	1.679.517.845.000
2014	460.781.668.000	632.531.211.000	125.986.624.000	-	1.219.299.503.000
2015	764.520.745.000	633.943.725.000	192.414.956.000	-	1.590.879.426.000
2016	749.953.960.000	459.860.839.000	74.420.233.000	-	1.284.235.032.000

Pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 terdiri dari beberapa sumber dana, yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLL). Pagu anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 46. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE 2016 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	%
1	RM	1.068.669.006.000	83,21
2	PNBP	179.779.571.000	14,00
3	HLN	28.510.000.000	2,22
4	Hibah Langsung Luar Negeri	7.276.455.000	0,57
	Jumlah	1.284.235.032.000	100,00

Pagu anggaran berdasarkan sumber dana yang tertinggi adalah bersumber dana RM sebesar 83,21%. Sedangkan yang bersumber dana PNBP adalah sebesar 14,00%. Anggaran yang bersumber dana RM lebih memudahkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan yang bersumber dana PNBP lebih sulit karena harus menunggu Surat Edaran dari Kemenkeu tentang besaran pencairan dana PNBP yang diperkenankan.





2. Realisasi Anggaran 2016

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2015 sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.126.868.520.807,-** atau **87,75%** (Sumber: SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 3 Februari 2017). Pada tahun 2016 terdapat kebijakan penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2. Pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar **Rp. 124.065.791.000,-**. Besarnya *self blocking* ini mempengaruhi persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE. Jika menggunakan pagu dikurangi *self blocking* yaitu sebesar **Rp. 1.159.969.241.000,-** maka persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **97,15%**. Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 berdasarkan kegiatan disajikan dalam berikut.

Tabel 47. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Dibandingk an Pagu Awal	% Realisasi Dibandingk an Pagu Dikurangi SB
1	5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	62.152.214.000	59.738.013.000	58.012.729.136	93,34	97,11
2	5420 Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	10.936.551.000	8.696.551.000	8.461.531.282	77,37	97,30
3	5421 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	27.326.950.000	25.676.950.000	12.747.804.407	46,65	49,65
4	5422 Konservasi Spesies dan Genetik	18.335.053.000	16.694.844.000	16.520.811.396	90,11	98,96
5	5423 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	9.187.220.000	6.817.220.000	6.733.436.770	73,29	98,77
6	5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	7.779.138.000	5.978.709.000	5.592.888.791	71,90	93,55
7	5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.626.437.000	455.072.677.000	448.010.757.281	88,96	98,45
8	5426 Pengelolaan Taman Nasional	644.891.469.000	581.294.277.000	570.788.561.744	88,51	98,19
	Jumlah	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

Keterangan: SB = *Self Blocking*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi adalah untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (93,34%) jika menggunakan pagu awal. Sedangkan jika menggunakan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (98,96%) dan realisasi terendah pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru (49,65%). Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut karena terdapat





penambahan pagu HLN sebesar Rp. 19,2 Milyar, yang sampai dengan akhir tahun belum dapat sepenuhnya terealisasi.

Delapan kegiatan tersebut dilakukan di Pusat dan juga UPT, realisasi per jenis Satker disampaikan pada tabel berikut. Dan secara lebih rinci realisasi per Satker disampaikan pada Lampiran 5.

Tabel 48. Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Per Jenis Satker

No	Satker	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Dibandingkan Pagu Awal	% Realisasi Dibandingkan Pagu Dikurangi SB
A	SATKER PUSAT	135.717.126.000	123.602.287.000	108.069.201.782	79,63	87,43
1	Sekretariat Ditjen KSDAE	62.152.214.000	59.738.013.000	58.012.729.136	93,34	97,11
2	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	10.936.551.000	8.696.551.000	8.461.531.282	77,37	97,30
3	Direktorat Kawasan Konservasi	27.326.950.000	25.676.950.000	12.747.804.407	46,65	49,65
4	Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati	18.335.053.000	16.694.844.000	16.520.811.396	90,11	98,96
5	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	9.187.220.000	6.817.220.000	6.733.436.770	73,29	98,77
6	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	7.779.138.000	5.978.709.000	5.592.888.791	71,90	93,55
B	UPT	1.148.517.906.000	1.036.366.954.000	1.018.799.319.025	88,71	98,30
1	Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	503.626.437.000	455.072.677.000	448.010.757.281	88,96	98,45
2	Balai Besar/ Balai Taman Nasional	644.891.469.000	581.294.277.000	570.788.561.744	88,51	98,19
	Jumlah A + B	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

Pada Direktorat Kawasan Konservasi, terdapat Hibah Langsung Tidak Terencana sejumlah Rp. 9.598.753.792,-, yang terdiri dari hibah *Mitsui Sumitomo Insurance, Co.Ltd.* sejumlah Rp. 4.700.000.000,- dan *Iapan International Cooperation System (IICS)* sejumlah Rp. 4.898.753.792,-. Jika ditambahkan dengan hibah tersebut, maka realisasi Direktorat Kawasan Konservasi adalah sebesar Rp. 22.346.558.199,- atau 60,52% jika dibandingkan dengan pagu Rp. 27.326.950.000,-.

Sedangkan realisasi Ditjen KSDAE tahun 2016 jika dilihat dari jenis belanja, maka realisasi tertinggi adalah belanja pegawai (98,40%), sedangkan terendah adalah belanja modal (91,82%). Secara lebih jelas realisasi Ditjen KSDAE tahun 2016 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 49. Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Pagu Awal	% Pagu Dikurangi SB
1	Belanja Pegawai	749.953.960.000	749.953.960.000	737.981.930.100	98,40	98,40
2	Belanja Barang	459.860.839.000	355.130.667.000	338.493.601.814	73,61	95,32
3	Belanja Modal	74.420.233.000	54.884.614.000	50.392.988.893	67,71	91,82
	Jumlah	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15





Jika dilihat dari sumber dana yang ada, maka realisasi terbesar adalah pada sumber dana RM yaitu sebesar 98,47%, sedangkan terendah adalah melalui sumber dana HLN yaitu sebesar 47,94%. Data realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut.

Tabel 50. Realisasi Ditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana

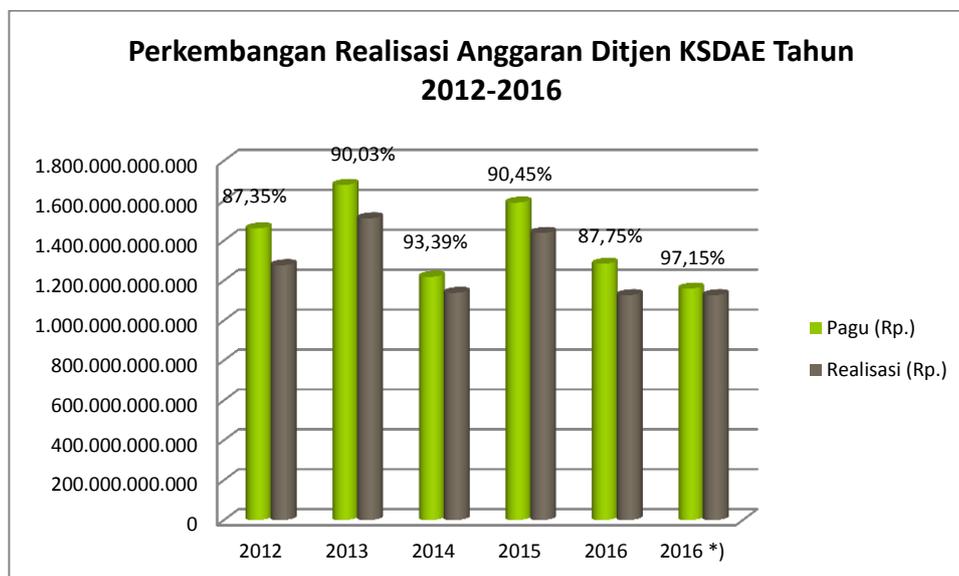
No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Pagu Dikurangi SB (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Pagu Awal	% Pagu Dikurangi SB
1	RM	1.068.669.006.000	1.015.080.493.000	999.556.256.744	93,53	98,47
2	PNBP	179.779.571.000	109.102.293.000	106.514.721.890	59,25	97,63
3	HLN	28.510.000.000	28.510.000.000	13.667.339.544	47,94	47,94
4	Hibah Langsung Luar Negeri	7.276.455.000	7.276.455.000	7.130.202.629	97,99	97,99
	Jumlah	1.284.235.032.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15

Perkembangan penyerapan anggaran Ditjen KSDAE selama tahun 2012-2016 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 50. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2012	1.461.723.126.000	1.276.820.152.364	87,35
2013	1.679.517.845.000	1.512.033.328.897	90,03
2014	1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39
2015	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45
2016	1.284.235.032.000	1.126.868.520.807	87,75
2016 *)	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	97,15

Ket : *) Pagu setelah dikurangi *Self Blocking*



Gambar 67. Perkembangan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 (97,15%) dengan pagu setelah dikurangi *self blocking* meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2015 (90,45%), dengan peningkatan sebesar 6,75%. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE tahun 2016 diantaranya adalah adanya kebijakan penghematan (*self blocking*) sehingga banyak kegiatan di Pusat maupun di UPT yang tidak dapat dilaksanakan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ada, mencari sumber pendanaan lainnya dengan mitra terkait ataupun





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Daerah, sehingga kinerja yang ditargetkan dapat tetap terlaksana dengan baik. Serta penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya.





BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2016 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2016. Dalam laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.

Capaian kinerja berdasarkan IKP yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **109,16%**. Capaian indikator kinerja program pada tahun 2016 (109,16%) meningkat jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 (97,57%), dengan peningkatan sebesar 11,88%. Peningkatan kinerja tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Pusat ataupun UPT sebagai ujung tombak pencapaian target-target kinerja.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pagu sebesar **Rp. 1.284.235.032.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.126.868.520.807,-** atau **87,75%** (Sumber: SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 3 Februari 2017). Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2016 antara lain adanya kebijakan penghematan (*self blocking*) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2, pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar **Rp. 124.065.791.000,-**. Besarnya *self blocking* ini mempengaruhi persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE. Jika menggunakan pagu dikurangi *self blocking* yaitu sebesar **Rp. 1.159.969.241.000,-** maka persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar **97,15%**. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 (97,15%) dengan pagu setelah dikurangi *self blocking* meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2015 (90,45%), dengan peningkatan sebesar 6,75%.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan,

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015-2019

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
	<i>Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati</i>					
	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	260 KK
	2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13 Unit	26 Unit	39 Unit	43 Unit	48 Unit
	5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	<i>Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati</i>					
	1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit)	25 Unit	51 Unit	77 Unit	103 Unit	130 Unit
5420	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i>					
	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit



Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
5422	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjamainya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i>					
	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	5. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	7. Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC
	8. Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekrayasa Genetik	4 PRG	8 PRG	12 PRG	16 PRG	20 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjamainya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i>					
	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit



Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
5424	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial</i>					
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolannya pada 6 Kawasan	-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies
5425	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%



Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5426	Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi



Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	11.Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	12.Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	13.Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	14.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	15.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	16.Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	17.Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	18.Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	19.Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	20.Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
	21.Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	22.Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5419	Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i>					
	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin



LAMPIRAN 2.

PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTUR JENDERAL KSDAE TAHUN 2016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M. Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2015

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M. Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi	Rp. 5 Triliun 250.000 orang wisatawan mancanegara 4.000.000 orang wisatawan nusantara 26 Unit
b.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolannya Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)	50 unit KK 80 Unit 2% 13 Unit 7 Paket Data

SM/1



No.

- Program/Kegiatan**
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.
 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi.
 3. Konservasi Spesies dan Genetik.
 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
 5. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial
 6. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
 7. Pengelolaan Taman Nasional.
 8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Anggaran (x Rp. 1.000,-)
1.317.378.000

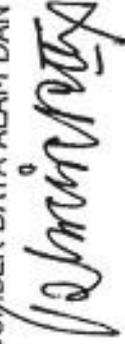
MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jakarta, Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



LAMPIRAN 3.

DATA KOMODITAS ESKPOR TSL DAN NEGARA TUJUAN

1. Amphibi

No	Negara	Jumlah (ekor)
1	CANADA	525
2	CZECH REPUBLIC	550
3	HONG KONG	2.250
4	JAPAN	640
5	KOREA, REPUBLIC OF	3.297
6	NETHERLANDS	2.942
7	RUSSIAN FEDERATION	460
8	TAIWAN	200
9	UNITED KINGDOM	1.668
10	UNITED STATES	28.484
		41.016

2. Arthropoda

No	Negara	Jumlah (ekor)
1	CHINA	3.512
2	FINLAND	21
3	FRANCE	2.290
4	GERMANY	4.068
5	ITALY	72
6	JAPAN	1.518
7	KOREA, REPUBLIC OF	620
8	MALAYSIA	34
9	NETHERLANDS	35
10	NEW ZEALAND	90
11	RUSSIAN FEDERATION	1.676
12	SINGAPORE	21.225
13	SPAIN	20
14	UNITED STATES	7.916
		43.097

3. Buaya

No	Negara	Jumlah
1	AUSTRALIA	176
2	CHINA	115
3	GERMANY	5
4	HONG KONG	6.171
5	ITALY	57
6	JAPAN	3.798



No	Negara	Jumlah
7	KOREA, REPUBLIC OF	25
8	SAUDI ARABIA	100
9	SINGAPORE	1.707
10	SLOVAKIA	10
11	THAILAND	1.600
12	TURKEY	18
13	UNITED ARAB EMIRATES	35
14	UNITED STATES	5
		13.822

4. Burung

No	Negara	Jumlah
1	AUSTRALIA	300
2	BANGLADESH	922
3	CANADA	2.000
4	CZECH REPUBLIC	25
5	GERMANY	6
6	HONG KONG	47.550
7	JAPAN	300
8	JORDAN	495
9	KUWAIT	40
10	LEBANON	42
11	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	564
12	MOZAMBIQUE	96
13	NEPAL	426
14	OMAN	632
15	PAKISTAN	560
16	SINGAPORE	10.970
17	TAIWAN	3.700
18	UNITED ARAB EMIRATES	120
19	UNITED KINGDOM	4
20	UNITED STATES	7.671
		76.423

5. Flora

No	Negara	Jumlah
1	JAPAN	41.056
2	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	1.500
3	KOREA, REPUBLIC OF	18.500
4	SINGAPORE	24.000
5	TAIWAN	210
6	THAILAND	29
7	UNITED STATES	10



No	Negara	Jumlah
		85.305

6. Gaharu

No	Negara	Jumlah
1	BAHRAIN	1.000
2	CHINA	7.760
3	HONG KONG	1.295
4	INDIA	20.960
5	KOREA, REPUBLIC OF	700
6	KUWAIT	3.533
7	MALAYSIA	280
8	OMAN	1.100
9	QATAR	694
10	SAUDI ARABIA	281.658
11	SINGAPORE	86.511
12	TAIWAN	79.932
13	UNITED ARAB EMIRATES	45.177
14	VIET NAM	6.600
15	YEMEN	3.000
		540.200

7. Ikan

No	Negara	Jumlah
1	CHINA	81.556
2	HONG KONG	1.058
3	JAPAN	1.411
4	KOREA, REPUBLIC OF	276
5	MALAYSIA	107
6	NETHERLANDS	200
7	PHILIPPINES	2.202
8	SINGAPORE	9.276
9	SWEDEN	5
10	TAIWAN	7.231
11	THAILAND	1.307
12	UNITED KINGDOM	56
13	UNITED STATES	1
14	VIET NAM	671
		105.357

8. Koral

No	Negara	Jumlah
1	ALGERIA	627
2	ARGENTINA	300
3	AUSTRIA	9.739
4	BELGIUM	9.944



No	Negara	Jumlah
5	BRAZIL	7.134
6	BULGARIA	356
7	CANADA	40.137
8	CHINA	29.739
9	CYPRUS	900
10	CZECH REPUBLIC	2.788
11	DENMARK	7.129
12	FRANCE	80.155
13	GERMANY	120.970
14	GREECE	3.942
15	HONG KONG	23.165
16	HUNGARY	200
17	INDIA	2.503
18	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	5.189
19	IRELAND	1.468
20	ISRAEL	12.106
21	ITALY	65.867
22	JAPAN	50.261
23	JORDAN	845
24	KOREA, REPUBLIC OF	22.989
25	KUWAIT	9.120
26	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	200
27	LEBANON	671
28	MALAYSIA	3.725
29	MEXICO	2.449
30	MOROCCO	200
31	NETHERLANDS	55.467
32	NEW ZEALAND	349
33	NORWAY	2.554
34	PAKISTAN	164
35	PERU	450
36	POLAND	15.787
37	PORTUGAL	518
38	QATAR	2.031
39	ROMANIA	876
40	RUSSIAN FEDERATION	17.514
41	SAUDI ARABIA	180
42	SINGAPORE	6.849
43	SOUTH AFRICA	7.721
44	SPAIN	11.621
45	SRI LANKA	350
46	SWEDEN	6.698
47	SWITZERLAND	21.101
48	TAIWAN	12.603
49	TONGA	400



No	Negara	Jumlah
50	TURKEY	5.514
51	UKRAINE	2.056
52	UNITED ARAB EMIRATES	4.420
53	UNITED KINGDOM	107.760
54	UNITED STATES	438.232
		1.236.033

9. Mamalia

No	Negara	Jumlah
1	AUSTRALIA	48
2	BANGLADESH	483
3	CHINA	101
4	INDONESIA	2
5	ITALY	1.582
6	JAPAN	104
7	KOREA, REPUBLIC OF	178
8	MOLDOVA, REPUBLIC OF	12
9	NETHERLANDS	16
10	OMAN	609
11	QATAR	1
12	SAUDI ARABIA	400
13	SLOVAKIA	63
14	TAIWAN	26.700
15	THAILAND	28
16	UNITED KINGDOM	369
17	UNITED STATES	7.115
		37.811

10. Moluska

No	Negara	Jumlah
1	BELGIUM	325
2	FRANCE	450
3	GERMANY	270
4	NETHERLANDS	400
5	POLAND	220
6	UNITED STATES	1.675
		3.340

11. Pakis

No	Negara	Jumlah
1	TAIWAN	50.775
		50.775



12.Reptil

No	Negara	Jumlah
1	BELGIUM	25
2	BRAZIL	1.955
3	CANADA	1.473
4	CHINA	944.982
5	CZECH REPUBLIC	2.075
6	FRANCE	1.156
7	GERMANY	797
8	HONG KONG	39.383
9	INDONESIA	1
10	ITALY	74.955
11	JAPAN	20.920
12	KOREA, REPUBLIC OF	10.090
13	KUWAIT	7
14	KYRGYZSTAN	20
15	MADAGASCAR	20
16	MALAYSIA	22
17	MEXICO	7.360
18	NETHERLANDS	6.580
19	RUSSIAN FEDERATION	1.484
20	SAUDI ARABIA	929
21	SINGAPORE	146.450
22	SLOVAKIA	305
23	SOUTH AFRICA	464
24	SPAIN	11.829
25	SWITZERLAND	8.125
26	TAIWAN	456
27	THAILAND	625
28	TURKEY	539
29	UNITED ARAB EMIRATES	503
30	UNITED KINGDOM	4.142
31	UNITED STATES	68.237
		1.355.909



LAMPIRAN 4.

DATA KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEBARAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK YANG VALID DAN RELIABLE PADA 7 WILAYAH BIOGEOGRAFI

NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT	JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA
A EKOREGION SUMATERA			
1	BBKSDA SUMATERA UTARA		
2	BKSDA RIAU		
3	BKSDA SUMATERA BARAT		
4	BKSDA BENGKULU DAN LAMPUNG	-	-
5	BKSDA JAMBI	-	Buku informasi satwa liar yang diperdagangkan di Jambi
6	BKSDA SUMATERA SELATAN	1 Laporan Identifikasi Potensi KSA/KPA Bangka Belitung	1 Buletin Rimau Kito
			2 Buletin Rimau Kito
			3 Buletin Rimau Kito
7	BKSDA ACEH	1 Pengetahuan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat di Sabang, Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam	2 Jenis tumbuhan anggrek epifit di kawasan cagar alam Jantho, Kab. Aceh Besar
8	BBBTN KERINCI SEBLAT		
9	BBTN GUNUNG LEUSER	1 Daftar jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Ketambe, kecamatan Badar - Aceh Tenggara	
10	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	1 Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di kawasan Hutan Krui Taman Nasional BBS Lampung Barat	1 Seminar Nasional HUT Kebun Raya Cibodas ke 150
			2 Buletin Siamang edisi 1
11	BTN BATANG GADIS	1 Daftar Data Informasi Tanaman Obat sebagai Potensi Bioprospeksi di Taman Nasional Batang Gadis	
12	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	1 Eksploirasi Tumbuhan Obat di TN Berbak	1 Orchid of Jambi (Anggrek Alam Jambi)
			2 Studi Keanekaragaman Jenis Kantong Semar di TN Berbak
13	BTN WAY KAMBAS		
14	BTN TESSO NILO		
15	BTN SIBERUT		
16	BTN BUKIT TIGA PULUH	1 Laporan Identifikasi Pemanfaatan TSL oleh Suku Talang Mamak di TNBT (Suku Talang Mamak di desa Rantau Langsung Resort Siambul)	
17	BTN BUKIT DUA BELAS	1 Buku Pengenalan Tumbuhan Obat Taman Nasional Bukit Dua Belas	
		2 Laporan Identifikasi Tumbuhan Obat di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	
B EKOREGION JAWA			
1	BBKSDA JAWA BARAT	1 Studi Potensi Tumbuhan Obat di CA dan TWA Pananjung Pangandaran	- -
		2 Pemanfaatan Tradisional Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan CA Gunung Tilu, Jawa Barat	
		3 Pemanfaatan Tumbuhan Berkhasiat Obat oleh Masyarakat Sekitar Cagar Alam	



NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT	JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA
		Gunung Simpang, Jawa Barat	
		4 Pembuatan Plot Sampel Permanen Tanaman Anggrek di CA Gunung Tilu	
2	BBKSDA JAWA TIMUR	1 Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Cagar Alam P. Sempu	
		2 Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	
		3 Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Cagar Alam Gunung Sigogor	
		4 Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Hutan Lindung Sigogor,	
3	BKSDA JAKARTA		1 Ensiklopedia Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Muara Angke
			2 Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya
			3 Informasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Pulau Rambut
			4 Informasi Potensi Perairan Suaka Margasatwa Pulau Rambut
			5 Film Dokumenter Ramsar Site Suaka Marga Satwa Pulau Rambut
4	BKSDA JATENG	-	1 Film Dokumenter Lembaga Desa Konservasi Pulau Untung Jawa
5	BKSDA YOGYAKARTA	1 Inventarisasi Tanaman Obat di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul	-
6	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	1 Tanaman Obat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	-
7	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	1 Penelitian Mahasiswa dengan judul "Etnobotani Masyarakat Suku Tengger : Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang"	-
8	BTN UJUNG KULON	Daftar Jenis Tanaman Obat di Taman Nasional Ujung Kulon	
9	BTN KEP SERIBU		
10	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	1 Laporan Eksplorasi : Potensi Lamiaceae, Begoniaceae dan Rubiaceae sebagai bahan baku obat dan aspek konservasinya	1 Keragaman Bryophyta Taman Nasional Gunung Halimun Salak
			2 Eksplorasi Keragaman Lumut (Bryophyta) di Resort Cidahu, Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak
			3 A Photographic Guide to the Common Insects of Gunung Halimun Salak National Park
			4 Five Hundred Plants Species in Gunung Halimun Salak National Park, West Java
			5 Jenis-jenis Anggrek Taman Nasional Gunung Halimun



NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT		JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA	
				6	Serangga Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Bagian Barat
				7	Spesies dan Functional Diversity of Soil Microflora at Gunung Halimun National Park
				8	Mamals of Gunung Halimun national Park, West Java
11	BTN MERU BETIRI	1	Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wanafarma Propinsi Jawa Timur : TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN Baluran dan TN Alas Purwo	1	Laporan Inventarisasi Anggrek TNMB
		2	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna TNMB		
		3	Hasil Penelitian Skripsi		
13	BTN BALI BARAT	1	Buku Informasi Tumbuhan Obat di Taman Nasional Bali Barat	1	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Bali Barat
				2	Burung-burung Taman Nasional Bali Barat
14	BTN GUNUNG CIREMAI	1	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Taman Nasional Gunung Ciremai	1	Daftar Jenis Potensi Tanaman Hias di Taman Nasional Gunung Ciremai
				2	Daftar Jenis Kantong Semar/Nepenthes di Taman Nasional Gunung Ciremai
15	BTN KARIMUN JAWA	1	Daftar Jenis Tanaman Obat di Taman Nasional Karimun Jawa		-
16	BTN GUNUNG MERBABU	1	Data Tumbuhan Berkhasiat Obat di TNMB	1	Seri Panduan Lapangan Tanaman Hias
17	BTN GUNUNG MERAPI	1	Laporan Hasil Identifikasi Tumbuhan Berpotensi Bioprospeksi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi		-
18	BTN BALURAN				
19	BTN ALAS PURWO		-	1	Seri buku informasi dan promosi pengelolaan bambu TN Alas Purwo
				2	Seri buku informasi dan promosi mangrove TN Alas Purwo
				3	Seri buku informasi dan promosi burung air TN Alas Purwo
				4	Panduan Lapangan Mamalia TN Alas Purwo
				5	Panduan Lapangan Herpetofauna (Amphibi dan Reptil) TN Alas Purwo
C	EKOREGION SULAWESI				
1	BBKSDA SULAWESI SELATAN	1	Tanaman obat	1	Inventarisasi Anggrek di CA. Faruhumpenai
				2	Inventarisasi Anggrek di SM. Komara
				3	Inventarisasi Anggrek di TWA Malino
				4	Inventarisasi Rusa di SM Komara
				5	Monitoring Rusa di SM Komara



NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT	JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA	
			6	Monitoring Rusa (<i>Cervus timorensis</i>) di SM Komara
			7	Inventarisasi Eboni di CA. Kalena
			8	Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di CA Ponda-Ponda
			9	Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di SM Komara
			10	Inventarisasi dan Identifikasi jenis satwa burung di SM Mampie
			11	Inventarisasi Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>) di Desa Kambunong, Kab. Mamuju
			12	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			13	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			14	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			15	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			16	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			17	Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			18	Inventarisasi <i>Macaca maura</i> di TWA. Lejja
			19	Identifikasi jenis ikan Introduksi pada TWA Danau Matano
2	BKSDA SULTENG	-	1	Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi Anggrek di Cagar Alam Gunung Dako
			2	Laporan Identifikasi Potensi Anggrek di Cagar Alam Gunung Tinombala Kabupaten Parigi Moutong
3	BKSDA SULTRA	-		-
4	BKSDA SULUT	-		-
5	BTN LORE LINDU	1		Statistik BTN Lore Lindu
6	BTN WAKATOBI	1		Identifikasi Tanaman Obat
			1	Monitoring Burung Pantai
			2	Monitoring Mangrove
			3	Monitoring Lamun
			4	Monitoring Cetacea
			5	Monitoring Penyau
			6	Monitoring Karang
			7	Monitoring SPAGs
7	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	-		-
8	BTN KEP TOGEAN			
9	BTN BOGANI NANI WARTABONE	1		Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Bolonsio dan Toraut di Balai TN Bogani Nani Wartabone
10	BTN TAKA BONE RATE			NIHIL
11	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	1		Laporan Identifikasi dan Sebaran Tanaman Obat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja dan Dusun Pattunuang, Desa Samangki di TN Bantimurung Saraung



NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT		JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA	
		2	Identifikasi dan Pemetaan Tanaman Obat di Resort Pattunuang	2	Identifikasi Keragaman Kupu-Kupu (Papilionoidea) di TN Bantimurung Bulusaraung
12	BTN BUNAKEN	1	Pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan bunaken, Kota manado, provinsi sulawesi utara : http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ococos/article/viewFile/7189/6681 Tahun 2013		-
		2	Potensi Spons Petrosia sp Sebagai Bahan Antikanker : http://elsanurman.blogspot.co.id/2013/06/potensi-spons-petrosia-spsebagai-bahan.html Tahun 2013		
D	EKOREGION KALIMANTAN				
1	BKSDA KALTENG	1	(Data potensi bioprospeksi Balai KSDA Kalteng, hasil inventarisasi dan identifikasi tanaman obat di TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung Keluang, SM Lamandau dan CA Pararawen pada tahun 2011)		-
2	BKSDA KALSEL		-	1	Inventarisasi Tanaman Jenis Rhododendron sp di Pegunungan Meratus
				2	Inventarisasi Anggrek Alam di CA Gunung Kentawan
				3	Survey Anggrek Dilindungi di Pelaihari Tanah Laut
				4	Survei Anggrek Dilindungi di Meratus Hulu Sungai Tengah
				5	Identifikasi Anggrek di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel
				6	Identifikasi Rotan Di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Barabai
3	BKSDA KALBAR	1	Laporan identifikasi dan analisis tumbuhan obat dan TWA Bukit Kelam, Kabupaten Sintang		
4	BKSDA KALTIM				
5	BTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM				
6	BTN TANJUNG PUTING				
7	BTN SEBANGAU	1	Laporan Penelitian Flora Taman Nasional Sebangau (penelitian LIPI)		
8	BTN KAYAN MENTARANG				
9	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	1	Data base potensi keanerakaragaman hayati tahun 2010 - 2014 TN BBR		
10	BTN GUNUNG PALUNG	1	Daftar Jenis Tumbuhan Obat di Stasiun Penelitian Cabang Panti, Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Kalbar		
11	BTN KUTAI				
E	EKOREGION KEPULAUAN SUNDA KECIL				
1	BKSDA Bali				
2	BTN BALI BARAT	1	Buku Informasi Tumbuhan Obat di Taman Nasional Bali Barat	1	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati



NO	NAMA UPT	JUDUL PUBLIKASI TANAMAN OBAT		JUDUL PUBLIKASI BIOPROSPECTING LAINNYA	
					Taman Nasional Bali Barat
				2	Burung-burung Taman Nasional Bali Barat
3	BKSDA NTB	1	Tabel Data Potensi Tanaman Obat di Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam		
4	BTN KOMODO				
5	BTN MANUPEU TANAH BARU	1	Kajian Etnobotani Dan Keragaman Jenis Tumbuhan Obat dalam Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru		
6	BTN LAIWANGI WANGAMETI				
7	BTN GUNUNG RINJANI	1	Tanaman Obat Kawasan TNGR (draft)	1	Anggrek TN Gunung Rinjani
				2	Mushrooms Kawasan TN Gunung Rinjani
8	BTN KELIMUTU	1	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu	1	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu
9	BTN TAMBORA				
F	EKOREGION MALUKU				
1	BKSDA MALUKU		-		-
2	BTN AKETAWAJAWE LOLOBATA		BELUM ADA PAKET DATA		
3	BTN MANUSELA				
G	EKOREGION PAPUA				
1	BBKSDA PAPUA				
2	BBKSDA PAPUA BARAT	1	(CA. Waigeo Timur)	1	(CA. Teluk Bintuni)
		2	(CA. Pegunungan Arfak)	2	(CA. Peg. Kumawa)
3	BTN TELUK CENDRAWASIH	1	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat Masyarakat Tradisional Isenebual Distrik Rumberopon, Kab. Teluk Wondama	1	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Yopanggar pada BPTN Wilayah II Wasior
		2	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Kampung Aisandami BPTN Wil II Wasior	2	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Waprak pada BPTN Wilayah III Ransiki
		3	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Waprak Pulau Roswar, Distrik Roswar, Kab. Teluk Wondama	3	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Pulau Anggromeos pada BPTN Wilayah I Nabire
4	BTN WASUR				
5	BTN LORENTZ		-	1	Flora dan Fauna Taman Nasional Lorentz
				2	Mengenal Burung Langka <i>Macgregoria pulchra</i>
				3	Burung Migran Taman Nasional Lorentz
KET					
*)	: Jenis tanaman dan satwa lain yang termasuk bioprospecting (Anggrek, Rotan, Jenis satwa dan tanaman liar yang berprospek tinggi, dll)				



LAMPIRAN 5.

REALISASI ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2016

No.	Satker	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	(Pagu - Blokir)	Realisasi (Rp)	% Thp Pagu Awal	% Thp Pagu Dikurangi Blokir
SATUAN KERJA PUSAT							
1	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	7.779.138.000	1.800.429.000	5.978.709.000	5.592.888.791	71,9	93,55
2	Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati	18.335.053.000	1.640.209.000	16.694.844.000	16.520.811.396	90,11	98,96
3	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung	9.187.220.000	2.370.000.000	6.817.220.000	6.733.436.770	73,29	98,77
4	Direktorat Kawasan Konservasi	27.326.950.000	1.650.000.000	25.676.950.000	12.747.804.407	46,65	49,65
5	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	10.936.551.000	2.240.000.000	8.696.551.000	8.461.531.282	77,37	97,3
6	Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	62.152.214.000	2.414.201.000	59.738.013.000	58.012.729.136	93,34	97,11
	JUMLAH PUSAT	135.717.126.000	12.114.839.000	123.602.287.000	108.069.201.782	79,63	87,43
SATUAN KERJA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM							
1	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	28.989.779.000	2.392.100.000	26.597.679.000	25.990.933.948	89,66	97,72
2	Balai Besar KSDA Riau	22.339.746.000	1.519.500.000	20.820.246.000	20.666.645.759	92,51	99,26
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	39.585.954.000	3.239.300.000	36.346.654.000	35.836.964.600	90,53	98,6
4	Balai Besar KSDA Jawa Timur	27.171.723.000	727.500.000	26.444.223.000	25.873.493.970	95,22	97,84
5	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	31.357.909.000	3.843.600.000	27.514.309.000	27.131.210.897	86,52	98,61
6	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	24.018.383.000	1.605.800.000	22.412.583.000	22.334.586.659	92,99	99,65
7	Balai Besar KSDA Papua	20.461.757.000	2.074.960.000	18.386.797.000	18.156.223.637	88,73	98,75
8	Balai Besar KSDA Papua Barat	18.057.504.000	1.148.700.000	16.908.804.000	16.195.547.213	89,69	95,78
9	Balai KSDA DKI Jakarta	14.678.843.000	973.200.000	13.705.643.000	13.290.854.219	90,54	96,97
10	Balai KSDA Jawa Tengah	17.911.183.000	2.160.700.000	15.750.483.000	15.603.434.438	87,12	99,07
11	Balai KSDA Yogyakarta	12.620.393.000	2.020.200.000	10.600.193.000	10.520.861.093	83,36	99,25
12	Balai KSDA Aceh Darusalam	16.000.038.000	1.541.200.000	14.458.838.000	14.336.026.676	89,6	99,15
13	Balai KSDA Sumatera Barat	15.336.127.000	1.690.800.000	13.645.327.000	13.466.406.998	87,81	98,69
14	Balai KSDA Jambi	10.991.206.000	1.243.000.000	9.748.206.000	9.288.474.191	84,51	95,28
15	Balai KSDA Sumatera Selatan	28.843.622.000	4.269.300.000	24.574.322.000	24.299.532.802	84,25	98,88
16	Balai KSDA Bengkulu	22.273.826.000	2.000.000.000	20.273.826.000	20.183.500.677	90,62	99,55
17	Balai KSDA Lampung	4.238.605.000	-	4.238.605.000	4.209.548.999	99,31	99,31
18	Balai KSDA Kalimantan Barat	20.313.023.000	2.700.000.000	17.613.023.000	17.356.071.456	85,44	98,54
19	Balai KSDA Kalimantan Tengah	12.715.146.000	891.200.000	11.823.946.000	11.478.487.872	90,27	97,08
20	Balai KSDA Kalimantan Selatan	13.337.563.000	1.233.800.000	12.103.763.000	12.004.627.327	90,01	99,18
21	Balai KSDA Kalimantan Timur	14.083.780.000	914.700.000	13.169.080.000	13.079.128.852	92,87	99,32
22	Balai KSDA Sulawesi Utara	11.069.576.000	1.590.000.000	9.479.576.000	9.145.317.587	82,62	96,47
23	Balai KSDA Sulawesi Tengah	12.746.445.000	1.142.900.000	11.603.545.000	11.341.633.042	88,98	97,74
24	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	15.813.445.000	2.554.900.000	13.258.545.000	13.178.955.670	83,34	99,4



No.	Satker	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	(Pagu - Blokir)	Realisasi (Rp)	% Thp Pagu Awal	% Thp Pagu Dikurangi Blokir
25	Balai KSDA Maluku	13.611.385.000	916.700.000	12.694.685.000	12.614.578.206	92,68	99,37
26	Balai KSDA Bali	16.283.847.000	1.858.200.000	14.425.647.000	14.226.521.272	87,37	98,62
27	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	18.775.629.000	2.301.500.000	16.474.129.000	16.201.189.221	86,29	98,34
	JUMLAH KSDA	503.626.437.000	48.553.760.000	455.072.677.000	448.010.757.281	88,96	98,45
SATUAN KERJA BALAI TAMAN NASIONAL							
1	Balai Besar TN Gunung Leuser	26.360.128.000	2.096.928.000	24.263.200.000	23.790.218.682	90,25	98,05
2	Balai Besar TN Kerinci Seblat	26.971.512.000	2.025.700.000	24.945.812.000	23.417.059.144	86,82	93,87
3	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	18.252.948.000	1.717.615.000	16.535.333.000	16.389.645.652	89,79	99,12
4	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	27.034.070.000	3.569.700.000	23.464.370.000	22.877.330.507	84,62	97,5
5	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	21.180.067.000	2.800.000.000	18.380.067.000	18.279.626.401	86,31	99,45
6	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	16.632.439.000	2.860.000.000	13.772.439.000	13.593.700.138	81,73	98,7
7	Balai Besar TN Lore Lindu	14.536.112.000	1.405.200.000	13.130.912.000	12.904.763.758	88,78	98,28
8	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	15.534.916.000	1.048.900.000	14.486.016.000	14.333.113.030	92,26	98,94
9	Balai TN Kepulauan Seribu	11.071.476.000	273.400.000	10.798.076.000	10.750.497.347	97,1	99,56
10	Balai TN Gunung Cermai	10.585.845.000	938.638.000	9.647.207.000	9.453.766.220	89,31	97,99
11	Balai TN Gunung Halimun	19.918.492.000	2.392.759.000	17.525.733.000	17.450.578.455	87,61	99,57
12	Balai TN Gunung Merbabu	8.268.573.000	646.500.000	7.622.073.000	7.558.510.975	91,41	99,17
13	Balai TN Karimun Jawa	11.625.396.000	488.000.000	11.137.396.000	10.926.366.566	93,99	98,11
14	Balai TN Gunung Merapi	12.014.164.000	1.557.900.000	10.456.264.000	10.350.011.558	86,15	98,98
15	Balai TN Baluran	14.641.725.000	1.554.100.000	13.087.625.000	13.055.283.608	89,16	99,75
16	Balai TN Meru Betiri	13.295.345.000	1.333.100.000	11.962.245.000	11.899.626.472	89,5	99,48
17	Balai TN Alas Purwo	17.411.665.000	2.000.000.000	15.411.665.000	14.967.555.390	85,96	97,12
18	Balai TN Batang Gadis	7.388.584.000	735.700.000	6.652.884.000	6.503.854.297	88,03	97,76
19	Balai TN Siberut	10.466.359.000	500.000.000	9.966.359.000	9.859.269.923	94,2	98,93
20	Balai TN Teso Nilo	7.596.916.000	618.800.000	6.978.116.000	6.790.555.856	89,39	97,31
21	Balai TN Bukit Tiga Puluh	10.399.841.000	1.324.500.000	9.075.341.000	8.743.068.439	84,07	96,34
22	Balai TN Bukit Dua Belas	7.191.451.000	640.200.000	6.551.251.000	6.439.055.600	89,54	98,29
23	Balai TN Berbak dan Sembilang	15.982.803.000	2.480.000.000	13.502.803.000	13.184.095.582	82,49	97,64
24	Balai TN Sembilang	2.194.542.000	-	2.194.542.000	2.185.037.100	99,57	99,57
25	Balai TN Way Kambas	30.754.299.000	3.206.602.000	27.547.697.000	27.389.589.942	89,06	99,43
26	Balai TN Danau Sentarum	1.909.730.000	-	1.909.730.000	1.903.347.864	99,67	99,67
27	Balai TN Gunung Palung	8.587.251.000	329.100.000	8.258.151.000	8.150.435.210	94,91	98,7
28	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	9.847.901.000	516.800.000	9.331.101.000	9.128.464.796	92,69	97,83
29	Balai TN Tanjung Putting	10.496.410.000	805.100.000	9.691.310.000	9.565.778.460	91,13	98,7
30	Balai TN Sebangau	7.973.310.000	790.598.000	7.182.712.000	7.090.112.870	88,92	98,71
31	Balai TN Kutai	13.426.868.000	1.113.800.000	12.313.068.000	12.208.980.507	90,93	99,15
32	Balai TN Kayan Mentarang	8.011.929.000	781.600.000	7.230.329.000	6.887.977.986	85,97	95,27
33	Balai TN Bogani Nani Wartabone	20.509.499.000	2.392.100.000	18.117.399.000	17.986.485.868	87,7	99,28
34	Balai TN Bunaken	7.860.207.000	300.000.000	7.560.207.000	7.227.494.788	91,95	95,6



No.	Satker	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	(Pagu - Blokir)	Realisasi (Rp)	% Thp Pagu Awal	% Thp Pagu Dikurangi Blokir
35	Balai TN Kepulauan Togean	5.821.157.000	240.100.000	5.581.057.000	5.465.405.342	93,89	97,93
36	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	13.605.277.000	1.606.000.000	11.999.277.000	11.699.316.390	85,99	97,5
37	Balai TN Takabone Rate	7.861.479.000	168.300.000	7.693.179.000	7.581.609.793	96,44	98,55
38	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	11.457.497.000	1.310.100.000	10.147.397.000	9.984.118.246	87,14	98,39
39	Balai TN Wakatobi	9.370.596.000	510.600.000	8.859.996.000	8.776.797.670	93,66	99,06
40	Balai TN Manusella	8.781.777.000	486.700.000	8.295.077.000	8.155.020.561	92,86	98,31
41	Balai TN Bali Barat	20.481.697.000	1.605.252.000	18.876.445.000	18.699.065.428	91,3	99,06
42	Balai TN Gunung Rinjani	14.309.676.000	1.749.200.000	12.560.476.000	12.299.494.932	85,95	97,92
43	Balai TN Komodo	12.626.598.000	1.607.700.000	11.018.898.000	10.958.339.290	86,79	99,45
44	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	11.403.833.000	2.400.000.000	9.003.833.000	8.490.270.435	74,45	94,3
45	Balai TN Manupeu Tanadaru	2.464.088.000	-	2.464.088.000	2.417.967.438	98,13	98,13
46	Balai TN Kelimutu	8.227.611.000	783.600.000	7.444.011.000	7.381.272.386	89,71	99,16
47	Balai TN Lorenzt	10.893.744.000	1.657.300.000	9.236.444.000	9.167.125.352	84,15	99,25
48	Balai TN Wasur	11.139.069.000	1.465.200.000	9.673.869.000	9.164.669.490	82,28	94,74
49	Balai TN Akatajawe Lolobata	10.541.645.000	1.036.000.000	9.505.645.000	9.413.782.062	89,3	99,03
50	Balai TN Ujung Kulon	19.244.434.000	1.727.800.000	17.516.634.000	17.250.176.707	89,64	98,48
51	Balai TN Tambora	728.518.000	-	728.518.000	642.871.231	88,24	88,24
	JUMLAH TN	644.891.469.000	63.597.192.000	581.294.277.000	570.788.561.744	88,51	98,19
	TOTAL	1.284.235.032.000	124.265.791.000	1.159.969.241.000	1.126.868.520.807	87,75	97,15



LAMPIRAN 6.

PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN KSDAE TAHUN 2015-2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Peningkatan/Penurunan (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. Triliun	5	5,31	106,15	5	6,5	130,95	23,36
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan mancanegara	250.000	210.136	84,05	250.000	481.518	192,61 (150)	129,15
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan nusantara	3.500.000	4.038.070	115,37	4.000.000	7.698.550	192,46 (150)	66,81
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit)	Unit	25	38	152 (150)	26	122	395 (150)	159,87
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	50	130	130	50	29	58	-0,55
		a. 10 unit KK meningkat		10	11	110				
		b. 40 unit KK meningkat		40	119	297,5 (150)				
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi	Unit	20	12	60	80	37	46,25	-22,92
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>)	%	2	26,89	1344,5 (150)	2	3,95	197,7 (150)	-85,30
		Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	Unit	13	10	76,92	13	8	61,54	-20,00
		Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	1	14,29	7	6	85,71	499,97
Rata-rata Capaian Kinerja Program						97,57		109,16	11,88	



Photo: Bruno



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK I LANTAI 8
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA, 10270
TELP. (021) 573-0317. EMAIL : evaluator_phka@yahoo.co.id, evaluatorksdae@gmail.com.